



UNIVERSITAS INDONESIA

**PENGARUH PERUBAHAN GIRO WAJIB MINIMUM (GWM)
TERHADAP VOLUME KREDIT DAN SUKU BUNGA KREDIT
PADA BANK UMUM PERIODE TW. I/2000 - TW. III/2011**

TESIS

**SUDONO
0906654683**

**FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN
JAKARTA
DESEMBER 2011**



UNIVERSITAS INDONESIA

**PENGARUH PERUBAHAN GIRO WAJIB MINIMUM (GWM)
TERHADAP VOLUME KREDIT DAN SUKU BUNGA KREDIT
PADA BANK UMUM PERIODE TW. I/2000 - TW. III/2011**

TESIS

**SUDONO
0906654683**

**FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN
KEKHUSUSAN MANAJEMEN KEUANGAN
JAKARTA
DESEMBER 2011**

Universitas Indonesia

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Sudono

NPM : 0906654683

Tanda Tangan :



Tanggal : 30 Desember 2011

Universitas Indonesia

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Sudono
NPM : 0906654683
Program Studi : Magister Manajemen
Judul Tesis : Pengaruh Perubahan Giro Wajib Minimum (GWM)
terhadap Volume Kredit dan Bunga Kredit pada
Bank Umum Periode Tw. I/2000 - Tw. III/2011

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Manajemen pada Program Studi Magister Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Rofikoh Rokhim, Ph.D

(Rofikoh Rokhim)

Penguji : Eko Rizkianto, M.E

(Eko Rizkianto)

Ketua Dewan Penguji : Dr. Dewi Hanggraeni

(Dewi Hanggraeni)

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 30 Desember 2011

Universitas Indonesia

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan karya akhir ini sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Manajemen pada Fakultas Ekonomi Program Magister Manajemen Universitas Indonesia.

Penulisan karya akhir ini tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu peneliti ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan selama penulisan karya akhir ini, antara lain:

1. Bapak Firmanzah, Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
2. Bapak Prof. Rhenald Kasali, Ph.D selaku Ketua Program Studi Magister Manajemen Universitas Indonesia.
3. Ibu Dr. Tengku Ezni Balqiah selaku Sekretaris Program Studi Magister Manajemen Universitas Indonesia.
4. Ibu Rofikoh Rokhim, Ph.D selaku dosen pembimbing yang telah berkenan memberikan waktu, pikiran dan tenaga untuk membimbing peneliti dalam menyelesaikan karya akhir ini.
5. Ibu Dr. Dewi Hanggraeni selaku Ketua Tim Penguji dan Bapak Eko Rizkianto, M.E selaku Anggota Tim Penguji yang telah memberikan masukan yang sangat berharga untuk penyempurnaan karya akhir ini.
6. Segenap dosen dan staf Program Magister Manajemen Universitas Indonesia yang telah membekali peneliti dengan ilmu pengetahuan untuk menyelesaikan studi.
7. Pimpinan Direktorat Sumberdaya Manusia (DSDM) Bank Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan jangka panjang Strata 2 di Program Magister Manajemen Universitas Indonesia.
8. Pimpinan DPB1, Ketua Tim dan rekan kerja di Tim 1.3 (Bp. Y. Dapot T.S, Bp. Eddhie Natallis, Bp. Yusuf Anshori, Bp. Triyoga Laksito, Bp. Ady Yasint

Universitas Indonesia

Sinaga, Dedi, Devi, Ana, Pipin, Azofa dan Adel) Bank Indonesia atas dukungannya kepada penulis dalam menyelesaikan karya akhir ini.

9. Staf Perpustakaan Riset serta pegawai pada Direktorat Statistik Moneter (DSM) dan Direktorat Kebijakan Moneter (DKM) Bank Indonesia yang telah membantu dalam menyediakan data-data yang diperlukan.
10. Sesama mahasiswa di Program Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia angkatan 2009/2, khususnya kelas G.092 (Ami, Anta, Anto, Dhani, Dini, Hana, Hanum, Max, Menta, Nadia, Novi, Oskar, Putut, Rajif, Ranti, Ridzky, Riwi, Roni, Rori dan Yudis) dan KS.092 (Agung, Dino, Eny, Erwin, Heni, Indra, Ivan, Julika, Mb. Ida, Mb Kiky dan Pak Broto) atas kerja sama dan kebersamaan selama menempuh studi.
11. Ibunda Mangku Redjo serta kakak-kakak (Mb. Gatik, Mb. Rumanti, Mb. Sumiratwati dan Mas Wahono) yang telah memberikan dukungan dan doa bagi peneliti untuk menyelesaikan kuliah maupun penyusunan tesis ini.
12. Istri tercinta Sri Murni Setiawati dan putra-putri tercinta M. Farhan Naufal, Kamiliya Nurul Hasna, M. Rafi Aulia dan Amira Zahra Khairunisa yang telah dengan sabar memberikan dukungan serta doa yang menjadi pemacu peneliti untuk menyelesaikan kuliah dan penyusunan tesis ini.
13. Pihak-pihak lain yang telah turut membantu peneliti dalam menyelesaikan kuliah dan penyusunan karya akhir ini yang tidak dapat peneliti sebutkan satu per satu.

Semoga bantuan dan dukungan dari berbagai pihak di atas mendapatkan balasan yang lebih baik dari Allah SWT.

Peneliti menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan karya akhir ini sehingga masukan dan saran dari semua pihak sangat diharapkan untuk kesempurnaan karya akhir ini. Akhir kata semoga karya akhir ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Jakarta, 30 Desember 2011

Peneliti

Universitas Indonesia

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA AKHIR
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sudono
NPM : 0906654683
Program Studi : Magister Manajemen
Fakultas : Ekonomi
Jenis Karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Pengaruh Perubahan Giro Wajib Minimum (GWM) terhadap Volume Kredit dan Suku Bunga Kredit pada Bank Umum Periode Tw. I/2000 - Tw. III/2011

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan karya akhir saya tanpa meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Jakarta
Pada tanggal : 30 Desember 2011

Yang menyatakan



(Sudono)

Universitas Indonesia

ABSTRAK

Nama : Sudono
Program Studi : Magister Manajemen
Judul : Pengaruh Perubahan Giro Wajib Minimum (GWM) terhadap Volume Kredit dan Suku Bunga Kredit Bank Umum Periode Tw. I/2000 - Tw. III/2011

Tesis ini membahas mengenai apakah Giro Wajib Minimum (GWM) atau *reserve requirement* sebagai variabel utama penelitian dan beberapa variabel lainnya sebagai variabel kontrol berpengaruh terhadap volume kredit rupiah dan suku bunga kredit rupiah pada bank umum di Indonesia. Untuk menguji hipotesis tersebut, penelitian dilakukan dengan dua model regresi linier berganda (*multiple linear regression model*) dan metode estimasi OLS, menggunakan data *time series* triwulanan dari Tw. I/2000 sampai dengan Tw. III/2011. Pada model pertama, hasil regresi menunjukkan bahwa rasio GWM rupiah berpengaruh positif terhadap volume kredit rupiah bank umum, meskipun pengaruhnya relatif kecil. Variabel lain yang berpengaruh positif terhadap volume kredit rupiah bank umum adalah Dana Pihak Ketiga (DPK) rupiah dan Indeks Harga Konsumen (IHK), sedangkan variabel yang berpengaruh negatif terhadap volume kredit adalah suku bunga kredit rupiah. Sementara itu, hasil regresi model kedua memperlihatkan bahwa rasio GWM rupiah tidak berpengaruh terhadap suku bunga kredit rupiah bank umum. Variabel penelitian yang memiliki pengaruh positif terhadap suku bunga kredit rupiah adalah suku bunga deposito rupiah berjangka waktu satu bulan dan IHK, sedangkan variabel yang berpengaruh negatif terhadap suku bunga kredit adalah jumlah uang beredar (M2) dan LIBOR.

Kata kunci :

Giro Wajib Minimum (GWM), *reserve requirement*, volume kredit, suku bunga kredit

ABSTRACT

Name : Sudono
Study Program : Magister Manajemen
Title : The Effect of Reserve Requirement on Loan Volume and Loan Interest Rates of Commercial Banks Q. I/2000 - Q. III/2011

This thesis discusses about whether Statutory Reserves (GWM) or the reserve requirement as a variable of the study and some other variables as control variables significantly affect the laon volume and loan interest rates at commercial banks in Indonesia. To test those hypothesis, the research using two multiple linear regression model (multiple linear regression model) and quarterly time series data from Q I/2000 to Q.III/2011. In the first model, the regression result indicate that the reserve requirement ratio has a positive effect on the commercial banks' loan volume. Other variables that have a positive influence on the commercial banks' loan volume are the third party funds and the Consumer Price Index (CPI). While variable that negatively affect the commercial banks' loan volume is interest rate. The result of the second regression model shows that the reserve requirement ratio of rupiah has no effect on loan interest rates of commercial banks. Research variables that have a positive impact on loan interest rates are the deposit rate and CPI. While variables that negatively affect the loan interest rates are the money supply (M2) and the LIBOR.

Key words :
statutory reserve, reserve requirement, lending volume, lending rates

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR...	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR RUMUS.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.5 Lingkup Studi.....	6
1.6 Sistematika Penulisan.....	7
BAB 2 LANDASAN TEORI.....	9
2.1 <i>Reserve requirement</i> , Uang Beredar, Volume Kredit dan Suku Bunga Kredit.....	9
2.1.1 Pengertian <i>Reserve Requirement</i>	9
2.1.2 Perkembangan Giro Wajib Minimum (GWM).....	11
2.1.3 Pengertian Uang dan Uang Beredar (<i>Money Supply</i>).....	13
2.1.4 Hubungan <i>Reserve Requirement</i> dengan Jumlah Uang Beredar.....	14
2.1.5 Hubungan <i>Reserve Requirement</i> dengan Volume Kredit dan Suku Bunga Kredit.....	15
2.2 Hubungan <i>Reserve Requirement</i> dengan Inflasi.....	18
2.3 Kebijakan Moneter.....	23
2.3.1 Pengertian Kebijakan Moneter.....	23
2.3.2 Pelaksanaan Kebijakan Moneter di Indonesia.....	24
2.4 Hasil Penelitian Sebelumnya.....	26
2.4.1 Penelitian Terkait Pengaruh <i>Reserve Requirement</i> (GWM) dan Variabel Ekonomi Makro Lainnya terhadap Volume Kredit	26
2.4.2 Penelitian Terkait Pengaruh <i>Reserve Requirement</i>	

Universitas Indonesia

	(GWM) dan Variabel Ekonomi Makro Lainnya terhadap Suku Bunga Kredit.....	29
2.4.3	Penelitian Lainnya Terkait <i>Reserve Requirement</i>	31
2.5	Kajian Bank Indonesia Mengenai Dampak Kebijakan <i>Reserve Requirement</i> (GWM) terhadap Bank dan Perekonomian.....	32
2.5.1	Latar Belakang Kebijakan GWM.....	32
2.5.2	Dampak Kebijakan GWM terhadap Bank dan Perekonomian.....	33
BAB 3	GAMBARAN UMUM.....	35
3.1	Bank Indonesia.....	35
3.1.1	Status dan Kedudukan Bank Indonesia.....	35
3.1.2	Tujuan dan Tugas Bank Indonesia.....	37
3.1.3	Peran Bank Indonesia dalam Pengendalian Inflasi.....	38
3.2	Industri Perbankan Indonesia.....	42
3.2.1	Pengertian Bank.....	42
3.2.2	Kegiatan Usaha Bank Umum di Indonesia.....	44
3.2.3	Pengelompokan Bank Umum.....	45
3.2.4	Bank Umum dalam Sistem Perbankan Indonesia.....	45
3.2.5	Perkembangan Bank Umum.....	46
3.2.5.1	Jumlah Bank dan Kantor Bank.....	46
3.2.5.2	Total Aset.....	48
3.2.5.3	Penghimpunan Dana Pihak Ketiga.....	48
3.2.5.4	Penyaluran Kredit.....	49
3.2.5.5	Perkembangan Beberapa Rasio Bank Umum....	51
3.3	Perkembangan Beberapa Variabel Makroekonomi.....	52
3.3.1	Pertumbuhan Ekonomi.....	52
3.3.2	Jumlah Uang Beredar.....	53
3.3.3	Inflasi.....	54
3.3.4	Suku Bunga Bank Umum.....	55
BAB 4	METODOLOGI PENELITIAN.....	57
4.1	Tahap-tahap Penelitian.....	57
4.2	Obyek Penelitian.....	58
4.3	Kerangka Penelitian.....	59
4.4	Hipotesis Penelitian.....	61
4.5	Spesifikasi Model Ekonometri.....	64
4.6	Data Penelitian.....	66
4.7	Metode Analisis Data.....	68
4.7.1	Analisis Deskriptif.....	68
4.7.2	Uji Asumsi Klasik.....	68
4.7.3	Uji Statistik.....	72

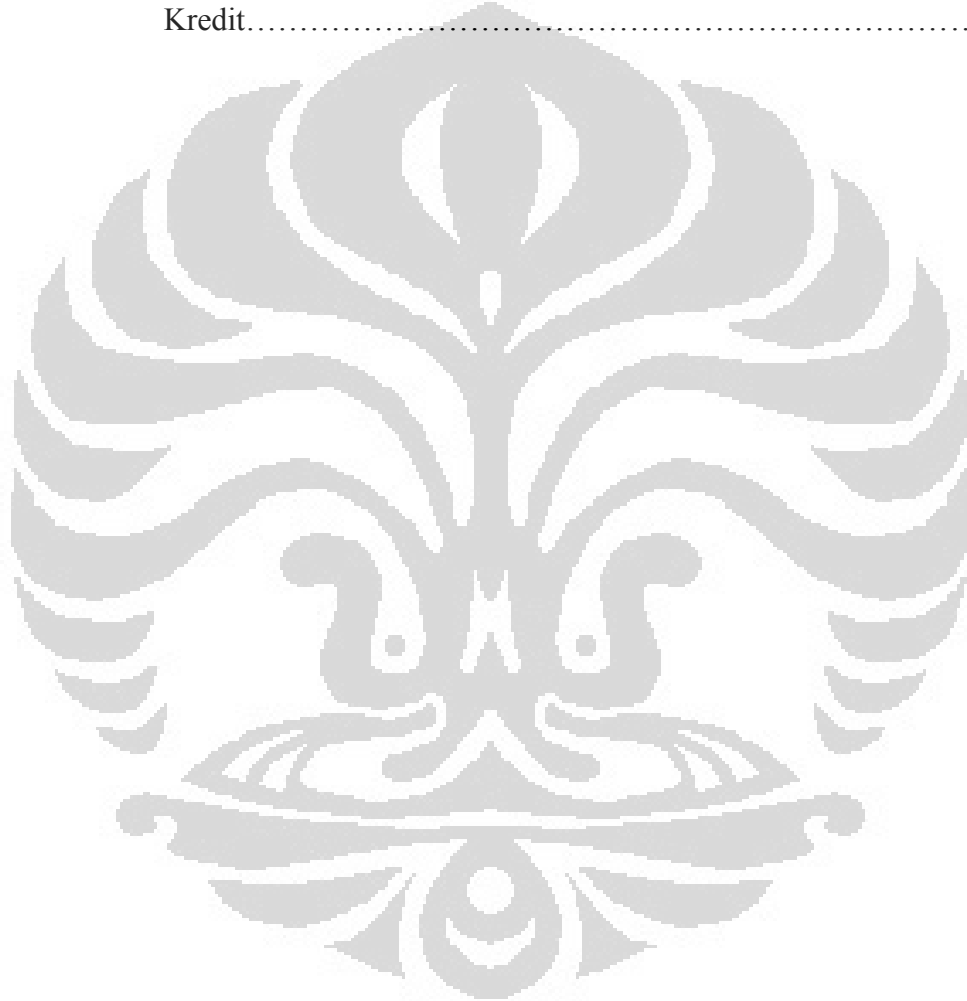
BAB 5 ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....	75
5.1 Pengaruh Perubahan Rasio GWM Rupiah dan Variabel Kontrol terhadap Volume Kredit Rupiah Bank Umum.....	75
5.1.1 Analisis Deskriptif.....	75
5.1.2 Uji Model Regresi Linier Berganda.....	77
5.1.2.1 Persamaan Regresi.....	77
5.1.2.2 Koefisien Determinasi.....	78
5.1.3 Hasil Uji Hipotesis.....	79
5.2 Pengaruh Perubahan Rasio GWM Rupiah dan Variabel Kontrol terhadap Suku Bunga Kredit Rupiah Bank Umum.....	83
5.2.1 Analisis Deskriptif.....	83
5.2.2 Uji Model Regresi Linier Berganda.....	84
5.2.2.1 Persamaan Regresi.....	84
5.2.2.2 Koefisien Determinasi.....	85
5.2.3 Hasil Uji Hipotesis.....	86
BAB 6 SIMPULAN DAN SARAN.....	91
6.1 Simpulan.....	91
6.2 Keterbatasan Penelitian.....	94
6.3 Saran.....	95
DAFTAR PUSTAKA.....	97

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Perkembangan GWM Rupiah pada Bank Umum	11
Tabel 2.2	Rangkuman Hasil Penelitian Mengenai Pengaruh <i>Reserve Requirement</i> (GWM) terhadap Volume Kredit.....	28
Tabel 2.3	Rangkuman Hasil Penelitian Mengenai Pengaruh <i>Reserve Requirement</i> (GWM) terhadap Suku Bunga Kredit.....	29
Tabel 2.4	Perkembangan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) Bank Umum, Maret-September 2011.....	33
Tabel 3.1	Sasaran Inflasi Bank Indonesia Tahun 2005-2012.....	42
Tabel 3.2	Perkembangan Jumlah Bank Umum Tahun 2006-2011.....	47
Tabel 3.3	Perkembangan Jumlah Kantor Bank Umum Tahun 2006-2011.....	47
Tabel 3.4	Perkembangan Total Aset Bank Umum Tahun 2006-2011.....	48
Tabel 3.5	Perkembangan Dana Pihak Ketiga Bank Umum Berdasarkan Jenis Simpanan, Tahun 2006-2011.....	49
Tabel 3.6	Perkembangan Dana Pihak Ketiga Bank Umum Berdasarkan Kelompok Bank, Tahun 2006-2011.....	49
Tabel 3.7	Perkembangan Penyaluran Kredit Bank Umum Berdasarkan Jenis Penggunaan, Tahun 2006-2011.....	50
Tabel 3.8	Perkembangan Penyaluran Kredit Bank Umum Berdasarkan Kelompok Bank, Tahun 2006-2011.....	50
Tabel 3.9	Perkembangan Penyaluran Kredit Bank Umum Berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2006-2011.....	51
Tabel 3.10	Perkembangan Beberapa Rasio Bank Umum Tahun 2006-2011.....	52
Tabel 3.11	Pertumbuhan PDB Menurut Penggunaan Tahun 2006-2010.....	53
Tabel 3.12	Perkembangan Komponen Inflasi IHK Tahun 2006-2010.....	55
Tabel 3.13	Perkembangan Suku Bunga Kredit, Deposito dan PUAB Tahun 2006- 2010.....	56
Tabel 5.1	Statistik Deskriptif Pengaruh Rasio GWM Rupiah dan Variabel Lainnya Terhadap Volume Kredit.....	75
Tabel 5.2	Hasil Uji Hipotesis Pengaruh Rasio GWM dan Variabel Lainnya Terhadap Volume Kredit.....	77
Tabel 5.3	Koefisien Determinasi Pengaruh Rasio GWM dan Variabel Lainnya Terhadap Volume Kredit.....	79

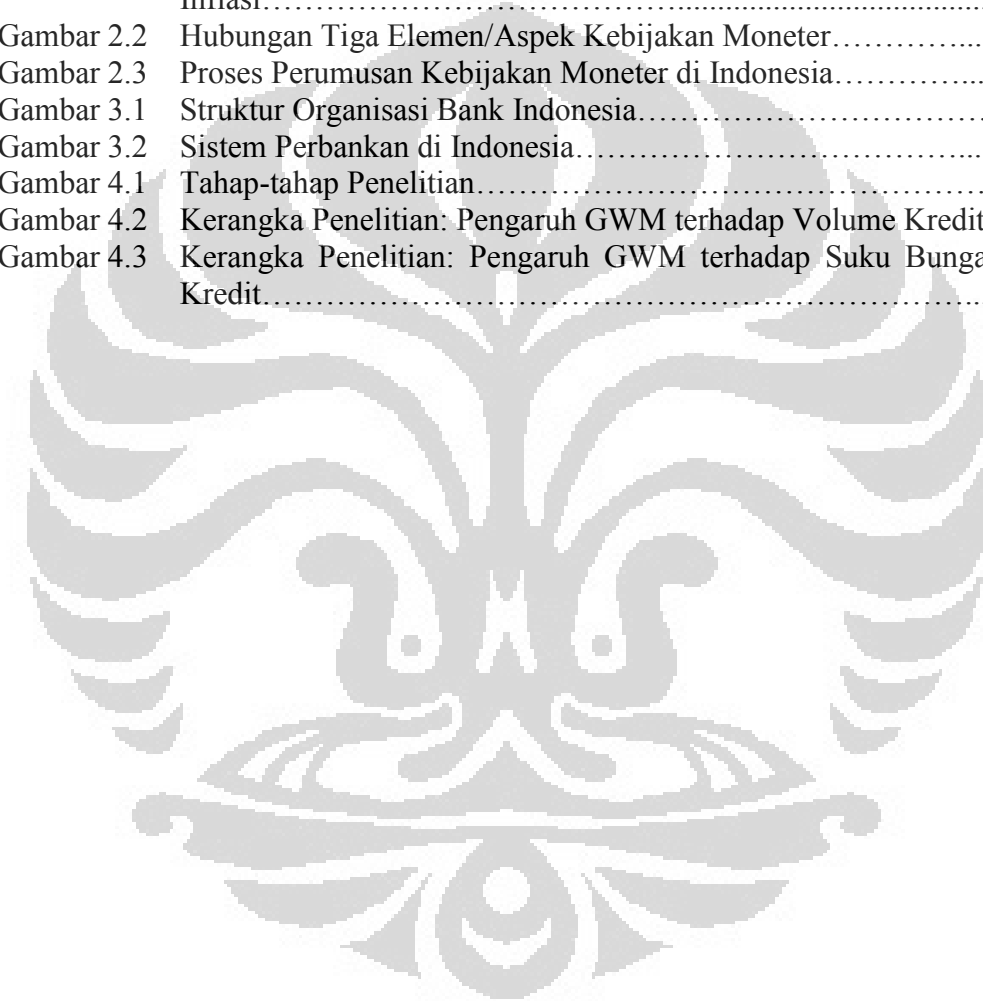
Universitas Indonesia

Tabel 5.4	Hasil Uji F Pengaruh Pengaruh GWM terhadap Volume Kredit.....	79
Tabel 5.5	Statistik Deskriptif Pengaruh Rasio GWM Rupiah dan Variabel Lainnya terhadap Volume Kredit.....	83
Tabel 5.6	Hasil Uji Hipotesis Pengaruh Rasio GWM dan Variabel Lainnya Terhadap Suku Bunga Kredit.....	84
Tabel 5.7	Koefisien Determinasi Pengaruh Rasio GWM dan Variabel Lainnya terhadap Suku Bunga Kredit.....	86
Tabel 5.8	Hasil Uji F Pengaruh Pengaruh GWM terhadap Suku Bunga Kredit.....	86



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Grafik Defisit APBN dan Net Ekspansi Rupiah.....	2
Gambar 1.2	Grafik Pembayaran Pokok dan Kupon Surat Utang Negara (SUN) 2003-2010.....	2
Gambar 1.3	Grafik Aliran Modal Asing Porfolio, 2008-2011 (Agustus)...	3
Gambar 2.1	Grafik Hubungan Jumlah Uang yang Beredar dengan Tingkat Inflasi.....	21
Gambar 2.2	Hubungan Tiga Elemen/Aspek Kebijakan Moneter.....	23
Gambar 2.3	Proses Perumusan Kebijakan Moneter di Indonesia.....	25
Gambar 3.1	Struktur Organisasi Bank Indonesia.....	37
Gambar 3.2	Sistem Perbankan di Indonesia.....	46
Gambar 4.1	Tahap-tahap Penelitian.....	57
Gambar 4.2	Kerangka Penelitian: Pengaruh GWM terhadap Volume Kredit	60
Gambar 4.3	Kerangka Penelitian: Pengaruh GWM terhadap Suku Bunga Kredit.....	60



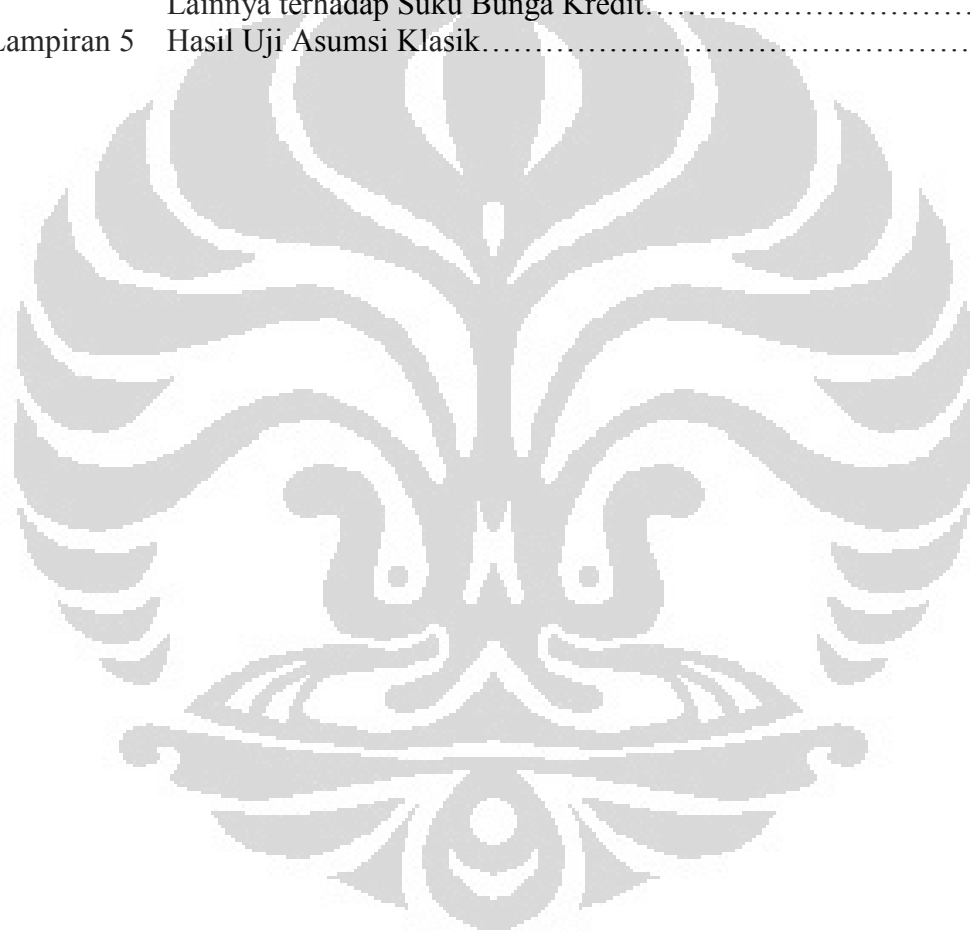
DAFTAR RUMUS

Rumus 2.1	<i>Cost of Loanable Funds (COLF)</i>	16
Rumus 2.2	<i>Overhead Cost (OHC)</i>	17
Rumus 2.3	<i>Risk Factor</i>	17
Rumus 2.4	Teori Kuantitas Uang.....	20
Rumus 2.5	Teori Kuantitas Uang.....	21
Rumus 4.1	Dampak Perubahan Rasio GWM dan Variabel Kontrol terhadap Volume Kredit Bank Umum.....	65
Rumus 4.2	Dampak Perubahan Rasio GWM dan Variabel Kontrol terhadap Suku Bunga Kredit Bank Umum.....	65
Rumus 4.3	Rata-rata Tertimbang Suku Bunga Kredit.....	67
Rumus 4.4	Uji Autokorelasi: <i>Durbin-Watson (DW test)</i>	69
Rumus 4.5	Uji Heteroskedastisitas: <i>Rank-Spearman</i>	70
Rumus 4.6	Uji <i>t Rank Spearman</i>	71
Rumus 4.7	Uji <i>F</i>	73
Rumus 4.8	Uji <i>t</i>	73



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Data Penelitian Model Regresi Linier I (Pengaruh GWM dan Variabel Lainnya terhadap Volume Kredit).....	L-1
Lampiran 2	Data Penelitian Model Regresi Linier II (Pengaruh GWM dan Variabel Lainnya terhadap Suku Bunga Kredit).....	L-2
Lampiran 3	Hasil <i>Ouput</i> SPSS versi 18: Pengaruh GWM dan Variabel Lainnya terhadap Volume Kredit.....	L-3
Lampiran 4	Hasil <i>Ouput</i> SPSS versi 18: Pengaruh GWM dan Variabel Lainnya terhadap Suku Bunga Kredit.....	L-4
Lampiran 5	Hasil Uji Asumsi Klasik.....	L-5



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang telah diubah dengan Undang-undang No.3 Tahun 2004, tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah melalui kebijakan moneter. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa yang tercermin pada inflasi, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain yang tercermin pada nilai tukar (kurs). Dalam literatur ekonomi kebijakan moneter didefinisikan sebagai keputusan-keputusan yang dilakukan oleh bank sentral untuk mempengaruhi besaran-besaran moneter (biasanya suku bunga jangka pendek) antara lain melalui pemberian pinjaman maupun pembelian surat berharga pada sektor keuangan swasta dalam rangka mencapai sasaran akhir (*ultimate policy target*) yang biasanya berupa tingkat inflasi maupun tujuan lainnya seperti *output* (PDB) atau kesempatan kerja/*employment* (Miles dan Scott, 2005).

Adapun kebijakan moneter di Indonesia yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dilakukan antara lain melalui pengendalian jumlah uang yang beredar dan atau suku bunga dengan salah satu namun tidak terbatas pada instrumen sebagai berikut yaitu giro wajib minimum, intervensi di pasar valuta asing dan sebagai tempat terakhir bagi bank-bank untuk meminjam uang apabila mengalami kesulitan likuiditas atau *lender of the last resort* (UU No.3 Tahun 2004).

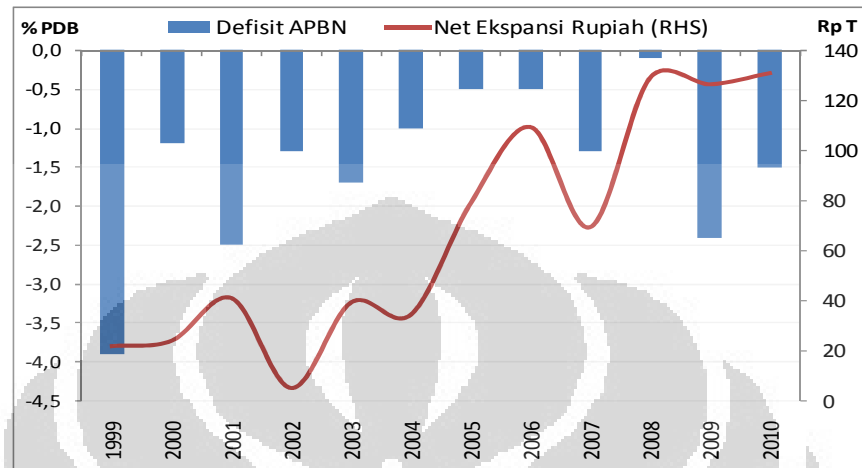
Salah satu tantangan yang dihadapi Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai rupiah adalah masih besarnya ekses likuiditas perbankan. Ekses likuiditas didefinisikan sebagai alat likuid/sisi aset lancar yang ada di perbankan setelah dikurangi kebutuhannya. Rata-rata rasio ekses likuiditas terhadap dana pihak ketiga perbankan (DPK) terus menunjukkan tren yang meningkat mencapai 22% pada akhir tahun 2010 (Bank Indonesia, 2011b).

Dilihat dari sumbernya, ekses likuiditas perbankan berasal dari:

- 1) Penanganan krisis ekonomi yaitu berupa pemberian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) pada tahun 1997/1998 sebesar kurang lebih Rp188 triliun

akibat adanya penarikan dana masyarakat dari perbankan secara besar-besaran.

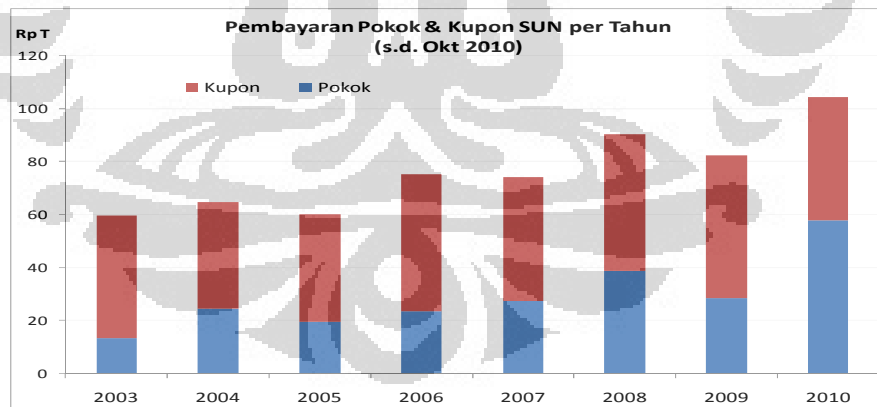
- 2) Ekspansi rekening Pemerintah/defisit fiskal sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1.
Grafik Defisit APBN dan Net Ekspansi Rupiah

Sumber: Bank Indonesia (2011a, 18).

- 3) Pembayaran kupon dan pokok Surat Berharga Negara (rata-rata dalam 5 tahun terakhir sekitar Rp80-100 triliun per tahun, lihat Gambar 1.2).

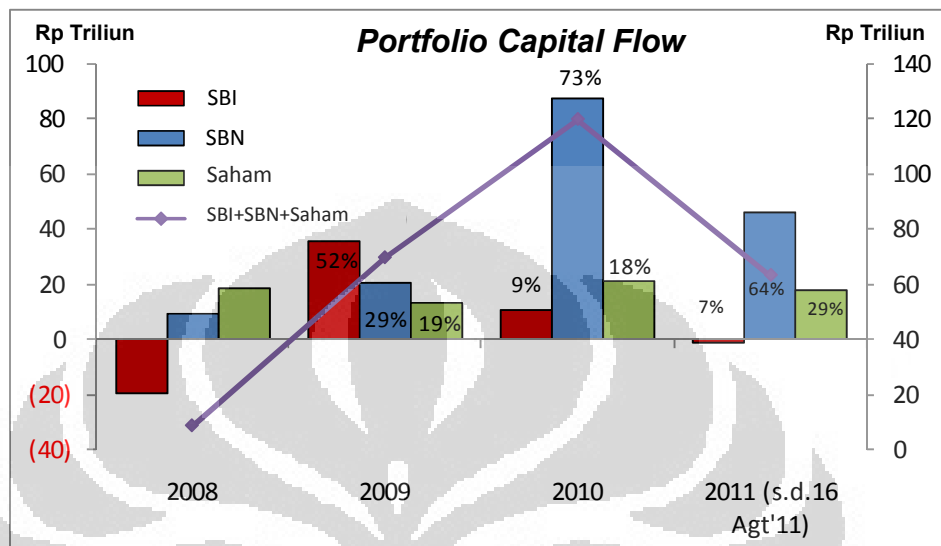


Gambar 1.2
Grafik Pembayaran Pokok dan Kupon Surat Utang Negara (SUN), 2003-2010

Sumber: Bank Indonesia (2011a, 18).

- 4) Aliran masuk modal asing jangka pendek (portofolio) yang sampai dengan akhir Desember 2010 mencapai sebesar USD15.205 juta atau setara Rp129 triliun dengan kurs Rp8.500/USD, sebagai dampak dari kebijakan suku bunga

rendah yang diterapkan negara-negara maju dan pelonggaran kebijakan moneter lanjutan (*quantitative easing*) yang dilakukan Amerika Serikat (Bank Indonesia, 2011b) yang ditanamkan pada SBI, SUN dan saham (lihat Grafik 1.3).



Gambar 1.3
Grafik Aliran Modal Asing Portfolio, 2008-2011 (Agustus)

Sumber: Bank Indonesia (2011a, 31).

Dalam rangka meredam dampak negatif persistensi eksese likuiditas perbankan terhadap stabilitas moneter dan sektor keuangan, Bank Indonesia (BI) juga menerapkan salah satu instrumen kebijakan moneter sebagaimana telah diuraikan sebelumnya yaitu dengan mengubah ketentuan (Peraturan Bank Indonesia) mengenai Giro Wajib Minimum (GWM) secara berturut-turut pada tahun 2004, 2005, 2008, 2009 dan 2010. GWM adalah jumlah dana minimum yang wajib dipelihara oleh Bank yang besarnya ditetapkan sebesar persentase tertentu dari Dana Pihak Ketiga (DPK). Kebijakan tersebut sekaligus sebagai sinyal untuk merespons peningkatan inflasi mengingat kompleksitas penggunaan instrumen suku bunga di tengah derasnya arus modal asing (Bank Indonesia, 2011b).

Menurut Miles dan Scott (2005) dan Saunders dan Cornett (2011), *reserve requirement* (GWM) memiliki implikasi yang signifikan dalam kebijakan moneter karena dapat mempengaruhi jumlah uang yang beredar dalam masyarakat melalui

mekanisme yang disebut angka pengganda uang (*money multiplier*). Besarnya angka pengganda uang tergantung pada *reserve requirement* yaitu $money\ multiplier = 1/reserve\ requirement$.

Apabila bank sentral bermaksud mengurangi jumlah uang beredar di masyarakat maka dapat dilakukan dengan cara menaikkan rasio GWM bank. Hal ini tercermin dari kebijakan yang dilakukan Bank Indonesia dengan menaikkan GWM primer rupiah pada November 2010 menjadi sebesar 8% mampu menyerap eksese likuiditas sebesar Rp43,3 triliun. Dengan penyesuaian GWM primer rupiah tersebut menjadikan GWM efektif meningkat menjadi 11,2%. Kebijakan menaikkan GWM bank tersebut juga dilakukan oleh Negara-negara lain seperti China, India dan Brazil yang menghadapi permasalahan yang relatif sama dengan Indonesia yaitu eksese likuiditas (Bank Indonesia, 2011a).

Namun demikian, meskipun di satu sisi kebijakan peningkatan GWM bank tersebut dapat mencapai sasaran dalam pengendalian stabilitas nilai rupiah terkait adanya eksese likuiditas perbankan, namun di sisi lain dapat menimbulkan dampak negatif berupa penurunan jumlah kredit yang tersedia serta peningkatan bunga kredit (Gunadi dan Harun, 2011). Penelitian baru-baru ini yang dilakukan oleh Okamoto (2011) pada perbankan di Amerika Serikat menghasilkan kesimpulan bahwa terdapat hubungan yang negatif dan signifikan antara tingkat *reserve requirement* dengan jumlah (*outstanding*) kredit serta terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara tingkat *reserve requirement* dengan suku bunga kredit.

1.2. Perumusan Masalah

Reserve requirement (GWM) masih menjadi salah satu instrumen penting dalam rangka mencapai tujuan kebijakan moneter misalnya pengendalian inflasi khususnya di negara-negara yang pasar keuangannya (*financial markets*) belum maju atau belum mencapai kondisi pasar modal yang sempurna (*perfect capital markets*) dan fungsi intermediasi keuangan masih didominasi oleh bank. Sebaliknya penggunaan *reserve requirement* sebagai instrumen kebijakan moneter

semakin berkurang pada negara yang pasar keuangannya sudah maju (Hemedes dan Lapid, 2005).

Namun demikian, semakin tinggi tingkat/rasio *reserve requirement* akan mendorong bank untuk membatasi penyaluran kredit dan mengenakan tingkat bunga yang lebih tinggi kepada peminjam (debitur). Argumentasinya adalah bahwa dengan semakin tingginya *reserve requirement* maka akan mengurangi jumlah dana yang tersedia di bank untuk disalurkan dalam bentuk kredit. Selain itu *reserve requirement* merupakan semacam pajak/*tax* yang dikenakan kepada bank karena cadangan/*reserve* yang harus disediakan bank baik dalam bentuk uang tunai di bank yang bersangkutan (*cash vault*) maupun dalam bentuk rekening giro di bank sentral tidak memberikan pendapatan bunga bagi bank sehingga bank akan meneruskan beban “pajak” tersebut kepada debitur dalam bentuk tingkat bunga pinjaman yang lebih tinggi (Hemedes dan Lapid, 2005, Miles dan Scott, 2005 dan Saunders dan Cornett, 2011).

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, mendorong peneliti untuk mengadakan penelitian ini mengingat sepengetahuan peneliti, belum terdapat penelitian terbaru di Indonesia yang membahas mengenai dampak GWM terhadap volume kredit dan suku bunga kredit pada bank umum dengan menggunakan model empirik/*data time series*. Adapun permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah perubahan GWM dan beberapa variabel ekonomi makro lainnya memiliki hubungan dan pengaruh yang signifikan terhadap volume (*outstanding*) kredit pada bank umum di Indonesia?
2. Apakah perubahan GWM dan beberapa variabel ekonomi makro lainnya memiliki hubungan dan pengaruh yang signifikan terhadap suku bunga kredit pada bank umum di Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan peneliti melakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah perubahan GWM dan beberapa variabel ekonomi makro lainnya memiliki hubungan dan pengaruh yang signifikan terhadap volume (*outstanding*) kredit pada bank umum di Indonesia?
2. Untuk mengetahui apakah perubahan GWM dan beberapa variabel ekonomi makro lainnya memiliki hubungan dan pengaruh yang signifikan terhadap suku bunga kredit pada bank umum di Indonesia?

1.4. Manfaat Penelitian

Peneliti berharap hasil penelitian ini bermanfaat bagi pihak-pihak di bawah ini:

1. Bagi akademisi dapat memberikan tambahan khasanah mengenai penelitian sejenis serta memberikan bukti empiris terkait pengaruh perubahan GWM terhadap volume kredit dan suku bunga kredit yang ditawarkan oleh bank umum, apakah sejalan atau tidak dengan penelitian sejenis sebelumnya.
2. Bagi manajemen bank agar dapat menjadi masukan dalam membuat kebijakan terkait manajemen pendanaan/likuiditas dan penyaluran kredit.
3. Bagi regulator (Bank Indonesia) dapat menjadi masukan untuk merumuskan kebijakan yang efektif terkait GWM.
4. Bagi masyarakat agar dapat lebih mengenal dan membuka wawasan tentang industri perbankan dan pengaruh kebijakan GWM serta beberapa variabel ekonomi makro lainnya terhadap jumlah kredit dan suku bunga yang ditawarkan bank.

1.5. Lingkup Studi

Penelitian ini dilakukan terhadap industri perbankan di Indonesia untuk mengetahui pengaruh perubahan GWM dan beberapa variabel ekonomi makro lainnya terhadap volume kredit dan suku bunga kredit yang ditawarkan oleh bank umum. Adapun periode data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triwulan I/2000 hingga triwulan III/2011 dengan pertimbangan bahwa pada periode tersebut Bank Indonesia telah memperoleh status sebagai bank sentral yang independen sejak Mei 1999 sehingga bebas dari campur tangan pemerintah dan

pihak lainnya dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter (UU. No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana diubah dengan UU. No. 3 Tahun 2004) serta perkembangan industri perbankan di Indonesia pada tahun 2000 telah mengalami proses *recovery* sejak terjadinya krisis moneter pada tahun 1997/1998 melalui program restrukturisasi dan rekapitalisasi bank (Bank Indonesia, 2006).

1.6. Sistematika Penulisan

Bab 1 Pendahuluan

Bab ini membahas tentang latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, lingkup studi dan sistematika penulisan.

Bab 2 Landasan Teori

Bab ini memuat definisi, konsep serta hasil penelitian sebelumnya yang relevan mengenai pengaruh perubahan GWM dan variabel kontrol lainnya terhadap volume kredit dan suku bunga kredit pada bank umum

Bab 3 Gambaran Umum

Pada bab ini akan diuraikan mengenai perkembangan industri perbankan di Indonesia serta tugas dan fungsi Bank Indonesia khususnya terkait dengan pelaksanaan kebijakan moneter.

Bab 4 Metodologi Penelitian

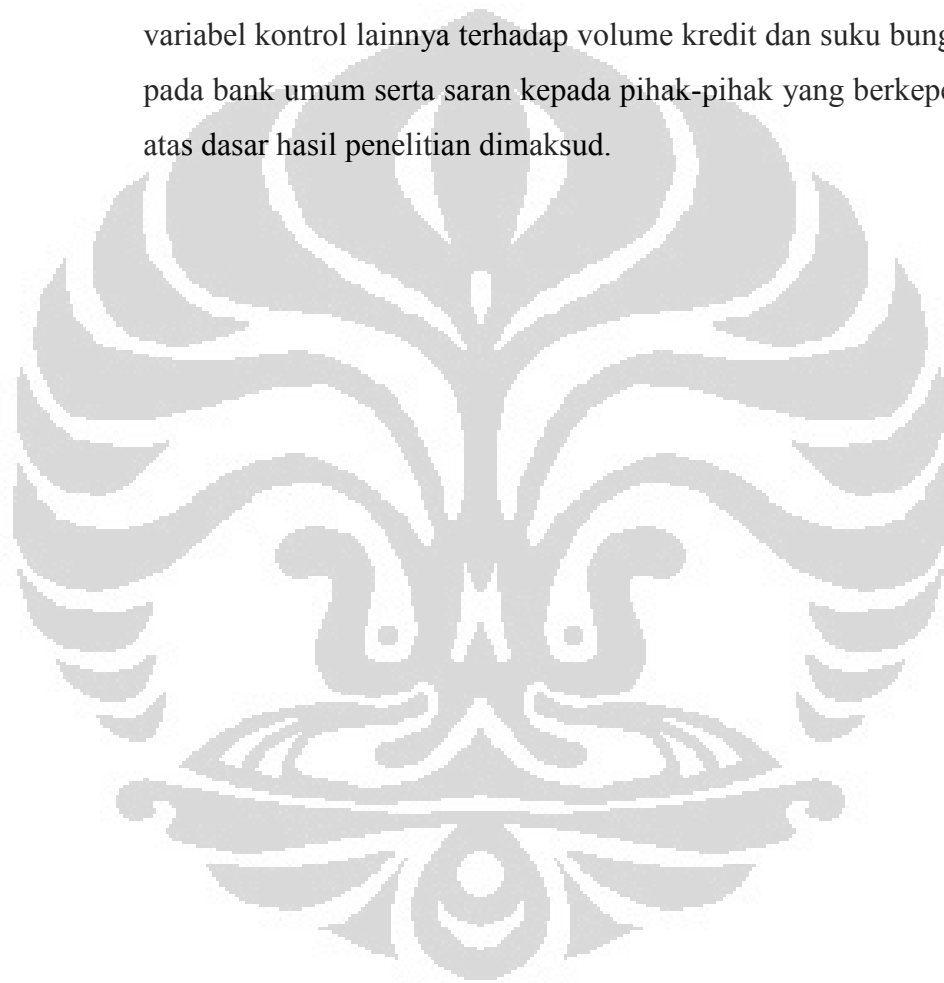
Bab ini menguraikan mengenai metode penelitian, rancangan/tahap-tahap penelitian, obyek penelitian, kerangka penelitian, hipotesis penelitian, spesifikasi model, data penelitian serta metode analisis yang digunakan.

Bab 5 Analisis dan Pembahasan

Bab ini memuat analisis dan pembahasan atas data deskriptif dan hasil uji hipotesis tentang pengaruh perubahan GWM dan variabel kontrol lainnya terhadap volume kredit dan suku bunga kredit pada bank umum.

Bab 6 Simpulan dan Saran

Bab ini memuat simpulan yang merupakan ringkasan dari hasil analisis dan pembahasan tentang pengaruh perubahan GWM dan variabel kontrol lainnya terhadap volume kredit dan suku bunga kredit pada bank umum serta saran kepada pihak-pihak yang berkepentingan atas dasar hasil penelitian dimaksud.



BAB 2 LANDASAN TEORI

2.1 *Reserve Requirements*, Uang Beredar, Volume Kredit dan Suku Bunga Kredit

2.1.1 Pengertian *Reserve Requirement*

Reserve requirement secara umum didefinisikan sebagai peraturan bank sentral yang menetapkan cadangan minimum yang harus disediakan oleh bank komersial (bank umum) atas simpanan yang diterima. Cadangan minimum tersebut biasanya dalam bentuk uang tunai yang disimpan secara fisik dalam lemari besi bank (*cash vault*) atau rekening giro di bank sentral (Miles and Scott, 2005 dan Saunders and Cornett, 2011).

Adapun di Indonesia *reserve requirement* dikenal dengan istilah Giro Wajib Minimum (GWM). Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) terbaru mengenai GWM (PBI No.12/19/PBI/2010), GWM didefinisikan sebagai sebagai jumlah dana minimum yang wajib dipelihara oleh Bank yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari dana pihak ketiga Bank (DPK yaitu giro, tabungan dan deposito). Selain pengertian GWM yang umum tersebut di atas, dalam PBI dimaksud juga terdapat beberapa definisi mengenai GWM sebagai berikut:

- GWM Primer (Rupiah)

Adalah simpanan minimum yang wajib dipelihara oleh Bank secara harian dalam bentuk saldo rekening giro pada Bank Indonesia yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari DPK dalam Rupiah, yang saat ini ditetapkan sebesar 8%. Pemenuhan GWM Primer dalam rupiah tersebut dihitung dengan membandingkan saldo giro rekening bank pada Bank Indonesia setiap akhir hari dalam satu masa laporan terhadap rata-rata harian jumlah DPK dalam masa satu masa laporan pada dua masa laporan sebelumnya.¹

¹ Laporan posisi DPK dalam satu bulan terbagi dalam empat masa laporan. Masa laporan untuk bulan dengan jumlah hari 30 adalah: masa laporan satu adalah dari tanggal 1 sampai tanggal 7,

Contoh:

Bank A memiliki rata-rata harian total DPK dalam rupiah dalam masa laporan tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 bulan November sebesar Rp55 triliun. GWM Primer dalam rupiah harian untuk masa laporan sejak tanggal 24 November sampai dengan akhir bulan November yang wajib dipenuhi adalah sebesar 8% dari Rp55 triliun yaitu Rp4,4 triliun.

- GWM Sekunder

Adalah cadangan minimum yang wajib dipelihara oleh bank berupa Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Utang Negara (SUN), Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan/atau *Excess Reserve*², yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari DPK, yang saat ini ditetapkan sebesar 2,5%.

Contoh:

Bank A memiliki rata-rata harian total DPK dalam rupiah dalam masa laporan tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 bulan November sebesar Rp55 triliun. GWM Sekunder harian untuk masa laporan sejak tanggal 24 November sampai dengan akhir bulan November yang wajib dipenuhi adalah sebesar 2,5% dari Rp55 triliun yaitu Rp1,375 triliun.

- GWM *Loan to Deposit Ratio* (LDR)

Adalah simpanan minimum yang wajib dipelihara oleh Bank dalam bentuk saldo rekening giro pada Bank Indonesia sebesar persentase dari DPK yang dihitung berdasarkan selisih antara LDR yang dimiliki oleh Bank dengan LDR target.

Contoh:

Bank A memiliki rata-rata harian total DPK dalam rupiah dalam masa laporan tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 bulan November sebesar Rp55 triliun dan LDR bank posisi akhir masa laporan tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 November sebesar 90%. Batas bawah LDR Target ditetapkan sebesar 78% dan batas atas LDR Target ditetapkan sebesar 100% sehingga LDR bank

masa laporan dua dari tanggal 8 sampai tanggal 15, masa laporan tiga dari tanggal 16 sampai tanggal 23 dan masa laporan empat adalah dari tanggal 24 sampai tanggal 30.

² *Excess Reserve* adalah kelebihan saldo rekening rupiah Bank dari GWM Primer dan GWM LDR yang wajib dipelihara di Bank Indonesia.

berada dalam kisaran LDR Target. Dengan demikian GWM LDR dalam rupiah harian Bank A untuk masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan akhir bulan November adalah sebesar 0% dari DPK dalam rupiah.

2.1.2 Perkembangan Giro Wajib Minimum (GWM)

Sejak tahun 2004, Bank Indonesia telah beberapa kali melakukan perubahan ketentuan terkait GWM, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Perkembangan Ketentuan GWM Rupiah pada Bank Umum

Tahun	Rasio GWM (%)					Keterangan
	GWM Primer/Utama	GWM DPK	GWM LDR	GWM Sekunder	GWM Total	
Sebelum Juni 2004	5,00	-	-	-	5,00	SK Dir BI No.30/89A/KEP/DIR tgl. 20-10-1997.
Juni 2004 - Agustus 2005	5,00	<ul style="list-style-type: none"> • 1,00 jika DPK Rp1 T – 10 T • 2,00 jika DPK Rp10 T – 50 T. • 3,00, jika DPK > Rp50 T. 	-	-	6,00 - 8,00	PBI No.6/15/PBI/2004 tgl. 28-06-2004.
September 2005 – September 2008	5,00	<ul style="list-style-type: none"> • 0,00 jika DPK s.d Rp1 T • 1,00, jika DPK > Rp1 T – 10 T • 2,00 jika DPK > Rp10 T – 50 T. • 3,00 DPK > Rp50 T. 	<ul style="list-style-type: none"> • 0,00 jika LDR > 90% • 1,00 jika LDR 75% - 90% • 2,00 jika LDR > 60%-75% • 3,00 jika LDR > 50%-60% • 4,00 jika LDR > 40%-50% • 5,00 jika LDR < 40% 	-	5,00 - 13,00	PBI No.7/29/PBI/2005 tgl. 06-09-2005.
Oktober 2008 – September 2009	5,00	-	-	-	5,00	PBI No.10/19/PBI/2008 tgl. 14-10-2008.
Oktober 2009 – Oktober 2010	5,00	-	-	2,50	7,50	PBI No.10/25/PBI/2008 tgl.

Lanjutan Tabel 2.1 Perkembangan Ketentuan GWM Rupiah pada Bank Umum

						23-10-2008 (GWM Sekunder mulai berlaku Oktober 2009).
November 2010	8,00	-	<ul style="list-style-type: none"> • 0,00 jika LDR berada dalam kisaran LDR target. • 0,1 (parameter disinsentif bawah) x selisih antara batas bawah LDR Target dan LDR Bank, dan DPK. Jika LDR Bank < batas bawah LDR target. • 0,2 (parameter disinsentif atas) x selisih antara batas atas LDR Target dan LDR Bank, dan DPK. Jika LDR Bank > batas atas LDR dan KPMM Bank < KPMM Insentif (14%). 	2,50	10,50 + perhitungan disinsentif jika tidak memenuhi persyaratan .	PBI No.12/19/PB I/2010 tgl. 04-10-2010 (GWM LDR mulai berlaku Maret 2011).

Sumber: SK Dir BI No.30/89A/KEP/DIR tanggal 20-10-1997, PBI No.6/15/PBI/2004 tanggal 28-06-2004, PBI No.7/29/PBI/2005 tanggal 06-09-2005, PBI No.10/19/PBI/2008 tanggal 14-10-2008 dan PBI No.12/19/PBI/2010 tanggal 04-10-2010, telah diolah kembali.

Keterangan:

1. LDR = *Loan to Deposit Ratio* adalah rasio antara kredit yang diberikan kepada pihak ketiga terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK).
2. GWM Sekunder = Cadangan minimum yang wajib dipelihara bank terdiri atas SBI, SUN, SBSN dan atau *Excess Reserve*, sebesar tertentu dari DPK.

2.1.3 Pengertian Uang dan Uang Beredar (*Money Supply*)

Sebelum uang dikenal, transaksi di masyarakat dilakukan melalui sistem tukar menukar barang (barter). Mengingat transaksi dengan menggunakan sistem barter merepotkan maka akhirnya masyarakat beralih menggunakan uang sebagai alat pembayaran karena lebih efisien. Uang pada awalnya didefinisikan sebagai segala sesuatu yang diterima oleh masyarakat sebagai alat tukar/alat pembayaran antara lain berupa barang-barang berharga dan langka seperti emas dan perak atau dikenal sebagai uang komoditas (*commodity money*), yang berlangsung sampai dengan abad ke-19 (Miles dan Scott, 2005).

Dalam perkembangannya, mengingat kebutuhan uang yang semakin meningkat sementara komoditas seperti emas dan perak yang digunakan sebagai uang jumlahnya terbatas maka mendorong mayoritas negara-negara di dunia untuk mengubah sistem uang yang digunakan dari sistem uang komoditas menjadi *fiat money system* yang terdiri atas uang kertas dan uang logam. Dikatakan sebagai *fiat money* karena uang kertas dan logam tersebut memiliki nilai bukan karena didasarkan pada barang/benda yang digunakan untuk membuat uang tetapi karena adanya pengesahan dari pemerintah/*government legislation* (Miles dan Scott, 2005).

Sejalan dengan perkembangan sistem uang fiat tersebut, fungsi uang juga berkembang menjadi sebagai alat satuan hitung (*unit of account*), sebagai alat tukar (*medium of exchange*), standar pembayaran yang tertunda (*standard for deferred payment*), dan alat penimbun kekayaan (*store of value*). Dua fungsi yang pertama biasanya disebut fungsi utama dari uang (*primary function of money*) sedangkan dua fungsi yang terakhir disebut fungsi turunan dari uang (*derivative function of money*) karena fungsi itu diturunkan atau diperoleh dari fungsi primer (Latumaerissa, 2011).

Selanjutnya dalam perekonomian modern sekarang ini, pengertian uang menjadi semakin luas. Para ekonom pada umumnya membagi jenis uang beredar dalam perekonomian (*money supply*) dalam tiga definisi, dari yang paling sempit sampai ke yang paling luas yaitu M_1 (*narrow money*), M_2 (*broad money*) dan M_3 (Miles dan Scott, 2005). Adapun penjabaran definisi uang beredar (*money supply*) yang berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut (Latumaerissa, 2011):

- Uang dalam arti sempit (M_1) atau *narrow money* yang terdiri dari uang kartal (uang kertas dan uang logam), dan uang giral (*demand deposit*). Artinya kewajiban otoritas moneter (Bank Indonesia) yang terdiri atas uang kartal yang berada di luar Bank Indonesia serta kas negara, rekening giro Bank Pencipta Uang Giral (BPUG) dan sektor swasta di Bank Indonesia.
- Uang dalam arti luas (M_2) atau *broad money* yang terdiri dari M_1 + Uang Kuasi (*Quasi Money = time deposit/deposito berjangka, saving deposit/tabungan, dan valas domestik*). Artinya kewajiban moneter sistem moneter terhadap sektor swasta domestik. M_2 ini sering disebut sebagai likuiditas perekonomian.
- M_3 adalah M_2 ditambah semua kekayaan masyarakat yang ada pada semua lembaga keuangan bukan bank lainnya.

2.1.4 Hubungan *Reserve Requirement* dengan Jumlah Uang Beredar

Sebagaimana telah disinggung dalam bab pendahuluan, jumlah uang beredar dalam masyarakat sangat dipengaruhi oleh besarnya *reserve requirement* melalui mekanisme yang disebut angka pengganda uang (*money multiplier*). Besarnya angka pengganda uang tergantung pada *reserve requirement*, yang dapat dirumuskan sebagai *Money Multiplier = 1/reserve requirement*. Semakin besar tingkat/rasio *reserve requirement* maka semakin kecil jumlah uang beredar (uang giral) yang dapat diciptakan oleh sistem perbankan melalui pemberian kredit, dan begitu pula sebaliknya (Miles dan Scott, 2005 dan Saunders dan Cornett, 2011).

Dengan menggunakan rumus di atas, jika angka rasio *reserve requirement* (GWM) adalah 8% (0,8), maka akan menghasilkan angka pengganda uang sebesar 12,5 (1/0,8). Untuk melihat bagaimana angka pengganda uang bekerja, misalkan dengan *reserve requirement* (GWM) sebesar 8%, Bank A menerima simpanan dana masyarakat sebesar Rp1.000 juta sehingga dapat menyalurkannya dalam bentuk kredit sebesar Rp920 juta dan sisanya sebesar Rp80 juta dalam bentuk rekening giro (GWM) di bank sentral. Selanjutnya apabila penerima kredit (debitur) dari Bank A tersebut menaruh dananya yang sebesar Rp920 juta kembali di Bank A maka Bank A dapat menyalurkan lagi dalam bentuk kredit sebesar Rp846,4 juta (Rp920 juta - GWM sebesar Rp73,6 juta). Apabila proses tersebut

berlangsung secara terus menerus maka dari simpanan dana masyarakat sebesar Rp1.000 juta, melalui proses angka pengganda uang sebesar 12,5 kali ($1/0.08$) akan menyebabkan kenaikan jumlah uang beredar sebesar Rp12.500 juta. Sebagai perbandingan, jika GWM sebesar 20% maka dengan kenaikan simpanan dana masyarakat sebesar Rp1.000 juta maka akan menyebabkan kenaikan jumlah uang beredar sebesar Rp5.000 juta atau jauh lebih kecil dibandingkan jika GWM sebesar 8% yaitu sebesar Rp12.500 juta.

2.1.5 Hubungan *Reserve Requirement* dengan Volume Kredit dan Suku Bunga Kredit

Beberapa literatur (Hemedes dan Lapid, 2005, Gunadi dan Harun, 2011, dan Saunders dan Cornett, 2011) menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat/rasio *reserve requirement* maka akan mendorong bank untuk membatasi penyaluran kredit dan mengenakan tingkat bunga yang lebih tinggi kepada peminjam/debitur. Argumentasinya adalah bahwa dengan semakin tingginya *reserve requirement* maka akan mengurangi jumlah dana yang tersedia di bank untuk disalurkan dalam bentuk kredit. Selain itu *reserve requirement* merupakan semacam pajak/tax yang dikenakan kepada bank karena cadangan/*reserve* yang harus disediakan bank baik dalam bentuk uang tunai di bank yang bersangkutan (*cash vault*) maupun dalam bentuk rekening giro di bank sentral tidak memberikan pendapatan bunga bagi bank sehingga bank akan meneruskan beban “pajak” tersebut kepada debitur dalam bentuk tingkat bunga pinjaman yang lebih tinggi.

Terkait dengan suku bunga kredit, terdapat dua teori yang dapat menjelaskan yaitu teori suku bunga pinjaman (kredit) secara makro dan teori suku bunga pinjaman (kredit) secara mikro (Kurniawan, 2004), sebagai berikut:

1. Teori Suku Bunga Pinjaman (Kredit) Secara Makro

Pengertian dasar dari teori tingkat suku bunga yaitu harga dari penggunaan uang untuk jangka waktu tertentu. Bunga merupakan imbalan atas ketidaknyamanan karena melepas uang, dengan demikian bunga adalah harga kredit. Tingkat suku bunga berkaitan dengan peranan waktu didalam kegiatan-kegiatan ekonomi. Tingkat suku bunga muncul dari kegemaran untuk mempunyai uang sekarang.

Teori klasik menyatakan bahwa bunga adalah harga dari *loanable funds* (dana investasi) dengan demikian bunga adalah harga yang terjadi di pasar dan investasi. Menurut teori Keynes tingkat bunga merupakan suatu fenomena moneter. Artinya tingkat bunga ditentukan oleh penawaran dan permintaan akan uang (ditentukan di pasar uang).

2. Teori Suku Bunga Pinjaman (Kredit) Secara Mikro

Dalam industri perbankan yang sangat kompetitif, penentuan tingkat bunga kredit menjadi suatu alat persaingan yang sangat strategis. Bank-bank yang mampu mengendalikan pokok dalam penentuan tingkat bunga kredit (*lending rate*) akan mampu menentukan bunga kredit yang lebih rendah dibandingkan dengan bank-bank lainnya.

Dalam menentukan suku bunga pinjaman, terdapat beberapa komponen yaitu:

a. *Cost of Loanable Funds (COLF)*

Langkah-langkah bank dalam menghitung COLF:

- Menetapkan tingkat bunga yang akan dibayarkan kepada deposan.
- Menghitung komposisi sumber dana.
- Memperhatikan ketentuan tentang *reserve requirement (RR)*.
- Menghitung biaya dengan dana efektif dengan rumus :

$$\frac{100\%}{100\% - RR} \times \text{Tingkat Bunga} \quad (2.1)$$

- Menghitung kontribusi biaya dana dengan rumus :
Komposisi Dana x Biaya Dana Efektif
- Menjumlah seluruh kontribusi biaya dana untuk memperoleh tingkat COLF.

b. *Overhead Cost (OHC)*

Langkah-langkah bank dalam menghitung *OHC*:

- Dikeluarkan oleh bank dalam menjalankan kegiatannya.

- Biaya-biaya yang termasuk dalam *OHC* ditanggung oleh seluruh jumlah aktiva yang menghasilkan pendapatan atau total aktiva produktif (*total earning assets*).
- Dengan demikian perhitungan persentase *OHC* dapat dinyatakan sebagai berikut :

$$OHC = \frac{\text{Total Biaya (di luar biaya dana)}}{\text{Total Earnings Assets}} \times 100\% \quad (2.2)$$

Dihadapkan pada berbagai kondisi persaingan yang ada, dalam praktek perbankan sehari-hari para eksekutif bank menempatkan kebijakan untuk memasang tarif dalam perhitungan *OHC* antara 2% sampai dengan 4%.

c. *Risk Factor*

Risk Factor adalah komponen dalam menentukan lending rate yang sangat mempertimbangkan kemungkinan terjadinya kredit bermasalah termasuk kredit macet. *Risk Factor* dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$Risk Factor = \frac{\text{Biaya Penyisihan Cadangan Penghapusan Kredit}}{\text{Total Kredit yang Diberikan}} \times 100\% \quad (2.3)$$

d. *Spread*

Spread atau biasa juga disebut dengan *net margin* adalah pendapatan bank yang utama dan akan menentukan besarnya pendapatan bersih (*net income*) bank. Penentuan tinggi rendahnya *spread* tergantung bagaimana pihak bank serta target *market*-nya. Pengelompokan jenis industri serta peringkat usaha bank merupakan salah satu pertimbangan untuk menetapkan tinggi rendahnya *spread*. Dalam praktek perbankan di Indonesia, eksekutif bank menetapkan *spread (net margin)* sebesar 2% hingga 3% per tahun yang merupakan harga yang layak (cukup) sebagai komponen dari *lending rate*.

e. *Pajak*

Pembebanan pajak sebagai komponen dari penentuan tingkat bunga kredit (*lending rate*) dapat dibebankan penuh atau sebagian, tergantung pada kebijakan bank yang bersangkutan dalam menghadapi persaingan.

2.2 Hubungan *Reserve Requirement* dengan Inflasi

Definisi singkat dari inflasi adalah kecenderungan harga-harga untuk naik secara terus menerus (Latumaerissa, 2011). Kenaikan dari satu atau dua jenis barang saja dan tidak menyeret harga barang lain tidak bisa disebut sebagai inflasi. Kenaikan harga-harga secara musiman, misalnya menjelang lebaran, natal dan tahun baru hanya sekali saja, serta tidak memiliki pengaruh lanjutan, tidak bisa disebut inflasi. Kenaikan harga semacam ini tidak dianggap sebagai “penyakit ekonomi” yang memerlukan penanganan khusus untuk menanggulangnya.

Inflasi dapat dikelompokkan dalam beberapa kategori sebagai berikut (Latumaerissa, 2011):

1. Didasarkan atas parah tidaknya inflasi tersebut, yang terbagi atas inflasi ringan, inflasi sedang, inflasi berat dan hiper inflasi.
 - a) Inflasi ringan (di bawah 10% setahun);
 - b) Inflasi sedang (antara 10% - 30% setahun);
 - c) Inflasi berat (antara 30% - 100% setahun); dan
 - d) Hiper inflasi (di atas 100% setahun).
2. Didasarkan pada sebab-sebab awal terjadinya inflasi, yang terbagi atas *demand pull inflation* dan *cost push inflation*.
 - a) *Demand pull inflation* adalah inflasi yang timbul karena permintaan masyarakat akan berbagai barang terlalu kuat misalnya karena adanya kenaikan pendapatan/gaji masyarakat.
 - b) *Cost inflation push inflation* adalah inflasi yang timbul karena kenaikan ongkos produksi misalnya karena kenaikan harga Bahan Bahan Minyak (BBM).

3. Didasarkan pada asal inflasi yang dibedakan menjadi *domestic inflation* dan *imported inflation*. Dimana *domestic inflation* adalah inflasi yang berasal dari dalam negeri sedangkan *imported inflation* adalah inflasi yang berasal dari luar negeri. Inflasi yang berasal dari dalam negeri timbul misalnya disebabkan defisit APBN yang dibiayai dengan pencetakan uang baru, kegagalan panen dan sebagainya. Inflasi yang berasal dari luar negeri adalah inflasi yang timbul karena kenaikan harga-harga (inflasi) di luar negeri atau di negara-negara mitra dagang. Kenaikan harga-harga di luar negeri tersebut akan berdampak secara langsung terhadap inflasi melalui kenaikan indeks biaya hidup karena sebagian dari barang-barang yang tercakup didalamnya berasal dari impor maupun secara tidak langsung melalui kenaikan ongkos produksi dari barang-barang yang menggunakan bahan baku yang harus diimpor tersebut.

Terdapat beberapa teori ekonomi yang menjelaskan mengenai penyebab timbulnya inflasi. Salah satu teori yang paling tua mengenai inflasi adalah Teori Kuantitas Uang atau *the Quantity Theory of Money* yang dipercayai oleh penganut paham *Monetarism*, salah satu diantaranya yang paling terkenal adalah Milton Friedman (Miles dan Scott, 2005 dan Latumaerissa, 2011). Teori Kuantitas Uang masih sangat berguna untuk menerangkan proses inflasi terutama di negara-negara yang sedang berkembang. Teori ini menyoroti proses inflasi dari jumlah uang yang beredar, dan psikologi (harapan) masyarakat mengenai kenaikan harga-harga (*expectations*). Inti dari teori ini adalah sebagai berikut (Latumaerissa, 2011):

1. Inflasi hanya dapat terjadi jika ada penambahan volume uang yang beredar (apakah dari penambahan uang kartal atukah uang giral tidak menjadi soal). Tanpa ada kenaikan jumlah uang yang beredar, kejadian seperti misalnya, kegagalan panen, hanya akan menaikkan harga-harga untuk sementara waktu saja. Penambahan jumlah uang ibarat “bahan-bakar” bagi inflasi, bila jumlah uang tidak ditambah, inflasi akan berhenti dengan sendirinya, apa pun sebab awal dari kenaikan harga tersebut.
2. Laju inflasi ditentukan oleh pertambahan jumlah uang yang beredar dan oleh psikologi (harapan) masyarakat mengenai kenaikan harga-harga di masa mendatang. Ada tiga kemungkinan keadaan yaitu:

- a) Keadaan yang pertama adalah bila masyarakat tidak (atau belum) mengharapkan harga-harga untuk naik pada bulan-bulan mendatang. Dalam hal ini, sebagian besar dari penambahan jumlah uang yang beredar yang diterima oleh masyarakat akan digunakan untuk menambah likuiditasnya (menambah pos kas dalam neraca anggota masyarakat) dan tidak digunakan untuk membeli barang-barang sehingga tidak akan menyebabkan kenaikan harga barang-barang (atau harga-harga mungkin naik sedikit sekali).
- b) Keadaan yang kedua adalah dimana masyarakat atas dasar pengalaman pada waktu sebelumnya, mulai sadar akan adanya inflasi dan mulai mengharapkan adanya kenaikan harga. Oleh karena itu penambahan jumlah uang yang beredar tidak lagi digunakan masyarakat untuk menambah pos kasnya tetapi akan digunakan untuk membeli barang. Hal ini dilakukan masyarakat untuk menghindari kerugian seandainya uang tersebut ditahan dalam bentuk tunai kerana nilainya akan mengalami penurunan.
- c) Keadaan yang ketiga terjadi pada tahap inflasi yang lebih parah yaitu hiperinflasi. Dalam kondisi ini masyarakat sudah kehilangan kepercayaan terhadap nilai mata uang. Oleh karena itu kenaikan jumlah uang beredar misalkan 20%, akan diikuti oleh kenaikan permintaan barang-barang sebesar 20%.

Teori Kuantitas Uang secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut (Miles dan Scott, 2005):

$$M \times V = P \times T \quad (2.4)$$

dimana:

M = Jumlah uang beredar (*money supply*)

V = Tingkat perputaran uang dalam suatu periode (*velocity of money*)

P = Tingkat harga dalam perekonomian (*price*)

T = Volume transaksi (*volume of transactions*)

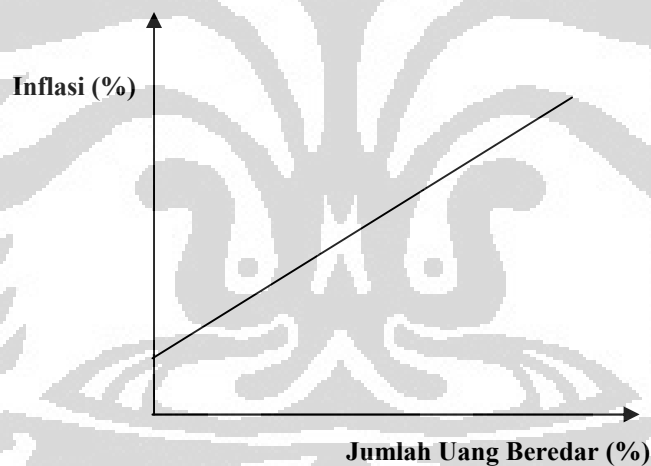
Selanjutnya apabila T diganti dengan Y (*output* atau PDB) maka persamaan tersebut di atas dapat ditulis kembali menjadi sebagai berikut:

$$M \times V = P \times Y \quad (2.5)$$

yang mempunyai implikasi bahwa:

% perubahan jumlah uang beredar (*money supply*) + % perubahan dalam tingkat perputaran uang (*velocity of money*) \approx % perubahan dalam harga (inflasi) + % perubahan *output*.

Hubungan jumlah uang beredar dan inflasi dapat dijelaskan melalui Gambar 2.1. Semakin tinggi jumlah uang beredar maka akan semakin mendorong peningkatan inflasi dan sebaliknya.



Gambar 2.1. Grafik Hubungan Jumlah Uang yang Beredar dengan Tingkat Inflasi

Sumber: Miles dan Scott (2005, 285).

Secara umum, hitungan perubahan harga tercakup dalam suatu indeks harga yang dikenal dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) atau *Consumer Price Index* (CPI). Persentase kenaikan IHK dikenal dengan inflasi, sedangkan penurunannya disebut deflasi (Latumaerissa, 2011). Indeks harga konsumen (IHK) adalah indeks yang mengukur rata-rata perubahan harga antar waktu dari

suatu paket jenis barang dan jasa yang dikonsumsi oleh penduduk/rumah tangga di daerah perkotaan dengan dasar suatu periode tertentu (<http://www.bps.go.id/aboutus.php?glos=1&ist=1&var=I>).

IHK merupakan salah satu indikator ekonomi yang secara umum dapat menggambarkan tingkat inflasi/deflasi harga barang dan jasa. Mulai Juni 2008, IHK disajikan dengan menggunakan tahun dasar 2007=100 dan mencakup 66 kota yang terdiri dari 33 ibukota provinsi dan 33 kota-kota besar di seluruh Indonesia. IHK sebelumnya menggunakan tahun dasar 2002=100 dan hanya mencakup 45 kota. Dalam menyusun IHK, data harga konsumen atau retail diperoleh dari 66 kota dan mencakup antara 284 - 441 barang dan jasa yang dikelompokkan ke dalam tujuh kelompok pengeluaran yaitu: bahan makanan; makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau; perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar; sandang; kesehatan; pendidikan, rekreasi dan olah raga; dan transportasi, komunikasi dan jasa keuangan. Setiap kelompok terdiri dari beberapa sub kelompok, dan dalam setiap sub kelompok terdapat beberapa item. Lebih jauh, item-item tersebut memiliki beberapa mutu atau spesifikasi. Dari setiap kota, beberapa pasar tradisional dan pasar modern dipilih untuk mewakili harga-harga dalam kota tersebut. Data harga masing-masing komoditi diperoleh dari tiga atau empat tempat penjualan, yang didatangi oleh petugas pengumpul data dengan wawancara langsung. Indeks Harga Konsumen Indonesia dihitung dengan mengembangkan rumus *Laspeyres*. Dalam penghitungan rata-rata harga barang dan jasa, ukuran yang digunakan adalah *mean* (rata-rata), tetapi untuk beberapa barang/jasa yang musiman, digunakan geometri (http://www.bps.go.id/aboutus.php?id_subyek=03&tabel=1&fl=3).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, hubungan *reserve requirement* dengan inflasi bersifat tidak langsung melalui jumlah uang beredar yaitu perubahan *reserve requirement* akan mempengaruhi jumlah uang beredar sebagaimana diuraikan dalam sub bab 2.1.3 dan selanjutnya akan mempengaruhi inflasi.

2.3 Kebijakan Moneter

2.3.1 Pengertian Kebijakan Moneter

Reserve requirement (GWM) merupakan salah satu instrumen kebijakan moneter. Dalam literatur ekonomi, kebijakan moneter didefinisikan sebagai keputusan-keputusan yang dilakukan oleh bank sentral untuk mempengaruhi besaran-besaran moneter (biasanya suku bunga jangka pendek) antara lain melalui pemberian pinjaman maupun pembelian surat berharga pada sektor keuangan swasta dalam rangka mencapai sasaran akhir (*ultimate policy target*), yang biasanya berupa tingkat inflasi maupun tujuan lainnya seperti *output* (PDB) atau kesempatan kerja/*employment* (Miles dan Scott, 2005).

Dalam kebijakan moneter dikenal tiga elemen/aspek sebagai berikut (Miles dan Scott, 2005):

1. *Ultimate Policy Target* (Sasaran Akhir). Sasaran akhir kebijakan moneter biasanya berupa tingkat inflasi, *output* (PDB) atau kesempatan kerja (*employment*). Namun demikian, kebijakan moneter tidak akan mempengaruhi perekonomian secara langsung tetapi memerlukan waktu (*time lag*).
2. *Intermediate Target* (Sasaran Antara). Dalam rangka mencapai sasaran akhir, bank sentral biasanya mencoba untuk mencapai sasaran antara terlebih dahulu yaitu variabel yang dapat dikendalikan oleh bank sentral, misalnya pertumbuhan jumlah uang beredar dan nilai tukar.
3. *Operational Instruments of Monetary Policy* (Instrumen Operasional Kebijakan Moneter), yang untuk sebagian besar negara di dunia berupa tingkat bunga jangka pendek.

Hubungan ketiga elemen/aspek kebijakan moneter tersebut di atas dapat dilihat pada Gambar 2.2.



Gambar 2.2
Hubungan Tiga Elemen/Aspek Kebijakan Moneter

Sumber: Miles dan Scott (2005, 379).

2.3.2 Pelaksanaan Kebijakan Moneter di Indonesia

Sebagaimana telah disinggung dalam bab pendahuluan bahwa Undang-undang No.3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia (UU BI) pada Pasal 7 secara tegas menyatakan bahwa tujuan Bank Indonesia, yang merupakan bank sentral Negara Republik Indonesia, adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang merupakan tujuan tunggal (*single objective*) Bank Indonesia. Kestabilan nilai rupiah yang dimaksud adalah kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa yang tercermin dari perkembangan laju inflasi serta kestabilan terhadap mata uang negara lain yang tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang Negara lain. Pemilihan inflasi sebagai sasaran akhir ini sejalan dengan kecenderungan perkembangan terakhir bank-bank sentral di dunia yang beralih untuk lebih memfokuskan diri pada upaya pengendalian inflasi atau *inflation targeting* (Miles dan Scott, 2005).

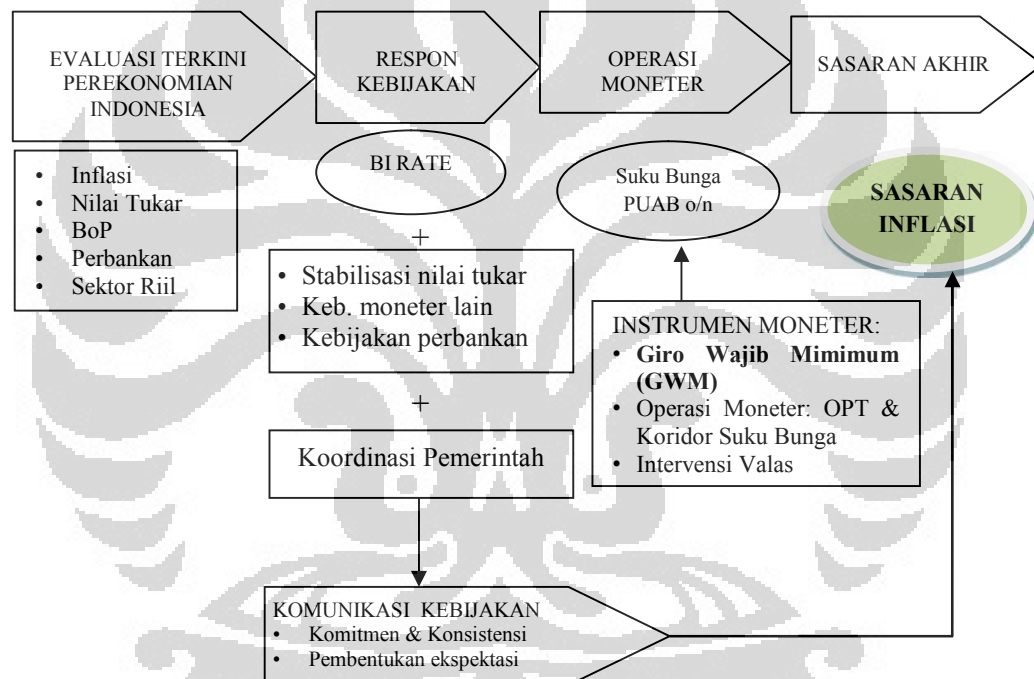
Dalam rangka mencapai tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, Bank Indonesia didukung oleh tiga pilar yang merupakan tiga bidang utama tugas Bank Indonesia yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi bank. Agar tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah tersebut dapat dicapai secara efektif dan efisien, maka ketiga tugas tersebut harus diintegrasikan.

Untuk mencapai tujuan Bank Indonesia dalam mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, Pasal 10 UU BI menegaskan bahwa Bank Indonesia

memiliki kewenangan untuk melaksanakan kebijakan moneter melalui penetapan sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi serta melakukan pengendalian moneter melalui berbagai cara antara lain (Latumaerissa, 2011):

1. Operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun asing;
2. Penetapan tingkat diskonto;
3. Penetapan cadangan wajib minimum (*reserve requirement*);
4. Pengaturan kredit atau pembiayaan.

Proses perumusan kebijakan moneter oleh Bank Indonesia dalam rangka *inflation targeting framework (ITF)* dapat dijelaskan pada Gambar 2.3 di bawah.



Gambar 2.3
Proses Perumusan Kebijakan Moneter di Indonesia

Sumber: Bank Indonesia (2011a, 6).

2.4 Hasil Penelitian Sebelumnya

2.4.1 Penelitian Terkait Pengaruh *Reserve Requirement* (GWM) dan Variabel Ekonomi Makro Lainnya terhadap Volume Kredit

Sebagaimana telah disinggung dalam bab pendahuluan, penelitian dengan menggunakan model empirik (*time series*) mengenai dampak *reserve requirement* terhadap volume kredit dan suku bunga kredit bank telah dilakukan oleh Okamoto (2011) pada perbankan di Amerika Serikat dengan menggunakan data triwulanan pada periode 1971 sampai dengan 2009. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa terdapat hubungan yang negatif dan signifikan antara tingkat *reserve requirement* dengan jumlah (*outstanding*) kredit serta terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara tingkat *reserve requirement* dengan suku bunga kredit (*new auto loan rate*). Selain itu terdapat hubungan yang negatif dan signifikan antara volume kredit bank dengan variabel kontrol berupa suku bunga KPR (*30-years Mortgage Rate*) serta terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara volume kredit bank dengan variabel kontrol berupa Suku Bunga The Fed (*Fed Funds Effective Rate*), Tingkat Pengangguran (*Unemployment Rate*) dan PDB. Sementara itu suku bunga kredit (*new auto loan rate*) memiliki hubungan yang positif dan signifikan dengan variabel kontrol berupa Suku Bunga The Fed (*Fed Funds Effective Rate*) dan Tingkat Pengangguran (*Unemployment Rate*).

Penelitian yang dilakukan oleh Gunadi dan Harun (2011) dengan menggunakan *simple model* yang didasarkan pada *Industrial Organisation Approach* bertujuan untuk mengetahui dampak kebijakan terkait *reserve requirement* (GWM) terhadap perilaku bank dalam menentukan alokasi portofolio yang optimal dan suku bunga. Model tersebut menunjukkan bahwa peningkatan rasio *reserve requirement* (GWM) terhadap *Loan to Deposit Ratio* (LDR) tidak hanya akan menurunkan solusi optimal bank atas volume simpanan dana masyarakat (*deposits*) tetapi juga akan meningkatkan solusi optimal mereka atas volume kredit. Peningkatan rasio *reserve requirement* (GWM) terhadap volume simpanan dana adalah sama dengan menggeser kurva rasio *reserve requirement* (GWM) ke kanan, sementara peningkatan rasio *reserve requirement* (GWM)

terhadap volume kredit sama dengan meningkatkan besaran (*magnitude*) atas kemiringan (*slope*) dari kurva rasio *reserve requirement* (GWM). Oleh karena itu, dalam kasus LDR yang rendah, efek penting dari pengaturan *reserve requirement* (GWM) adalah akan dapat meningkatkan besaran (*magnitude*) atas kemiringan (*slope*) dari kurva rasio *reserve requirement* (GWM) dan mendorong kurva rasio *reserve requirement* (GWM) ke kanan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara meningkatkan rasio *reserve requirement* (GWM) terhadap DPK dan rasio *reserve requirement* (GWM) terhadap LDR. Selanjutnya, atas hasil dari model tersebut mereka melakukan analisis sensitivitas atas perubahan rasio *reserve requirement* (GWM) terhadap DPK dan rasio *reserve requirement* (GWM) terhadap LDR, yang menunjukkan bahwa perubahan positif dari rasio *reserve requirement* (GWM) akan dapat meningkatkan LDR.

Penelitian Pratama (2010) mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan penyaluran kredit perbankan pada bank umum di Indonesia dengan menggunakan data bulanan tahun 2005-2009 dan model analisis regresi linier berganda menyimpulkan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran kredit perbankan. *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Non Performing Loan* (NPL) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyaluran kredit perbankan. Sementara suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penyaluran kredit perbankan.

Penelitian Danistyoyo (2009) mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran kredit UMKM di Indonesia dengan menggunakan data sekunder *time series* secara triwulanan mulai dari Januari 2005 hingga Desember 2008 menggunakan metode *Two Stage Least Square* (2SLS) menghasilkan kesimpulan bahwa permintaan kredit UMKM dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh PDB dan dipengaruhi secara negatif dan signifikan oleh suku bunga kredit perbankan dan inflasi. Pengaruh ketiga variabel tersebut sesuai dengan teori yang ada. Kesimpulan yang lain adalah penawaran kredit UMKM dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh DPK dan LDR. Penawaran kredit UMKM juga dipengaruhi secara negatif dan signifikan oleh CAR dan NPL. Variabel CAR tak sesuai dengan teori karena CAR mempersempit ruang bank

dalam menawarkan kreditnya. Sedangkan suku bunga kredit perbankan pengaruhnya tidak terlalu nyata terhadap penawaran kredit UMKM.

Penelitian yang dilakukan oleh Juanda (2008) mengenai pengaruh GWM terhadap beberapa indikator kinerja perbankan dengan menggunakan data bulanan dari tahun 1994 hingga 2007 menyimpulkan bahwa dalam jangka pendek GWM tidak berpengaruh terhadap empat indikator kinerja perbankan (penyaluran kredit, NPL, DPK dan LDR). Hal ini terjadi karena aset yang dimiliki oleh bank pada saat awal periode pengenaan GWM oleh Bank Sentral masih mencukupi untuk mempertahankan kinerja dari bank tersebut karena bank telah memiliki rencana anggaran dan target yang telah ditetapkan sehingga kinerja dari perbankan belum terpengaruh oleh adanya kebijakan GWM. Adapun dalam jangka panjang, kebijakan GWM berpengaruh positif terhadap penyaluran kredit dan DPK. Hal ini terjadi karena peningkatan GWM oleh Bank Sentral telah meningkatkan kepercayaan terhadap kondisi bank sehingga dalam jangka panjang terjadi peningkatan jumlah DPK yang dihimpun dari masyarakat dan juga peningkatan penyaluran kredit dari bank ke masyarakat.

Hasil penelitian pengaruh *reserve requirement* (GWM) dan variabel makro ekonomi lainnya terhadap volume kredit, dirangkum pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2. Rangkuman Hasil Penelitian Mengenai Pengaruh *Reserve Requirement (GWM)* terhadap Volume Kredit

Peneliti, Lokasi Penelitian dan Periode Penelitian	Metode dan Variabel Bebas	Variabel Terikat: Volume Kredit	
		Hubungan	
		Positif (+)	Negatif (-)
Okamoto (2011), USA, 1971-2009 (Data Triwulanan)	Linear Multiple Regression		
	Reserve Requirement		√
	30-years Mortgage Rate		√
	Fed Fund Rate	√	
	Unemployment Rate	√	
	Dummy Variable - Basel I	√	
Gunadi & Harun (2011), Indonesia, 2011 (Kualitatif)	Industrial Organisation Approach		
	Reserve Requirement (GWM)	√	
Pratama (2010), Indonesia, 2005-2008 (Data Triwulanan)	Linear Multiple Regression		
	DPK	√	
	CAR		√
	NPL		√
Danisty (2009), 2005-2008 (Data Triwulanan)	Two Stage Least Square (2SLS)		
	PDB	√	
	Suku Bunga Kredit		√
	Inflasi		√
Juanda (2008), Indonesia, 1994-2007 (Data Bulanan)	Error Correction Model (ECM) dan Kointegrasi		
	GWM	√	

Sumber: Hasil olahan Penulis.

2.4.2 Penelitian Terkait Pengaruh *Reserve Requirement (GWM)* dan Variabel Ekonomi Makro Lainnya terhadap Suku Bunga Kredit

Penelitian yang dilakukan oleh Hanurawati (2007) mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi suku bunga kredit Bank Umum di Indonesia sebelum dan sesudah krisis ekonomi 1997 menyimpulkan bahwa dari enam variabel independen hanya tiga variabel yang berpengaruh signifikan terhadap Suku Bunga Kredit Bank Umum yaitu Suku Bunga SBI, Inflasi, dan Suku Bunga Luar Negeri, sedangkan jumlah Uang Beredar, Kurs, dan Produk Domestik Bruto tidak berpengaruh signifikan terhadap Suku Bunga Kredit Bank Umum. Sebelum krisis moneter (1993.I-1997.II), variabel Suku Bunga SBI dan Suku Bunga Luar Negeri

berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Suku Bunga Kredit Bank Umum). Untuk periode setelah krisis moneter (1997.III- 2003.IV), variabel Suku Bunga SBI dan Inflasi berpengaruh signifikan terhadap Suku Bunga Kredit Bank Umum.

Penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan (2004) mengenai determinan tingkat suku bunga pinjaman di Indonesia tahun 1983-2002 dengan menggunakan *Error Correction Model* (ECM) menyimpulkan bahwa dalam jangka panjang suku bunga internasional (SIBOR), suku bunga SBI, inflasi dan PDB berpengaruh positif dan signifikan terhadap suku bunga pinjaman. Sedangkan jumlah uang beredar berpengaruh negatif dan signifikan terhadap suku bunga pinjaman.

Rangkuman atas hasil penelitian pengaruh *reserve requirement* (GWM) dan variabel makro ekonomi lainnya terhadap suku bunga kredit, dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3. Rangkuman Hasil Penelitian Mengenai pengaruh Reserve Requirement (GWM) terhadap Suku Bunga Kredit

Peneliti, Lokasi Penelitian dan Periode Penelitian	Metode dan Variabel Bebas	Variabel Terikat: Suku Bunga Kredit	
		Hubungan	
		Positif (+)	Negatif (-)
Okamoto (2011), USA, 1971-2009 (Data Triwulanan)	Linear Multiple Regression		
	<i>Reserve Requirement</i>	√	
	<i>30-years Mortgage Rate</i>	√	
	<i>Fed Fund Rate</i>	√	
	<i>Unemployment Rate</i>	√	
	Dummy Variable - Basel I		√
Hanurawati (2007), Indonesia, 1993-2003 (Data Triwulanan)	Linear Multiple Regression		
	Suku Bunga SBI	√	
	Inflasi	√	
	Suku Bunga Luar Negeri	√	
Kurniawan (2004), Indonesia, 1983-2002 (Data Tahunan)	Error Correction Model (ECM) dan Kointegrasi		
	Suku Bunga Internasional (SIBOR)	√	
	Jumlah Uang Beredar	√	
	Inflasi	√	

Sumber: Hasil olahan Penulis.

2.4.3 Penelitian Lainnya terkait *Reserve Requirement* (GWM):

Zhang, et al (2009) melakukan penelitian mengenai tingkat/rasio *reserve requirement* yang dianggap optimal di China. Penelitiannya didasarkan pada argumentasi bahwa *reserve requirement* merupakan pajak bagi bank dan seperti pajak lainnya yang dikenakan oleh pemerintah maka sesuai hukum *Laffer Curve*, akan terdapat tingkat *reserve requirement* yang dianggap optimal. Apabila tingkat *reserve requirement* yang berlaku melebihi tingkat *reserve requirement* yang optimal maka fungsi *reserve requirement* terhadap manajemen likuiditas dan pengendalian moneter akan menurun (kontra produktif) karena kehilangan basis pajaknya (*tax base*). Berdasarkan pengujian dengan model ekonometri dan analisis empiris diperoleh kesimpulan bahwa tingkat *reserve requirement* yang optimal di China adalah sekitar 23% sedangkan tingkat *reserve requirement* yang berlaku pada saat penelitian dilakukan adalah 15,5%. Oleh karena itu bank sentral China masih memiliki ruang untuk meningkatkan tingkat *reserve requirement*.

Kajian yang dilakukan oleh Hemedes dan Lapid (2005) pada perekonomian di Philippines menyatakan bahwa meskipun *reserve requirement* mulai ditinggalkan oleh negara-negara maju sebagai instrumen utama kebijakan moneter namun tetap merupakan salah satu instrumen (*tools*) yang penting dan berguna dalam pengendalian moneter pada negara-negara yang sistem keuangan dan pasar modalnya relatif belum maju serta didominasi oleh bank seperti Philippines. Dalam rangka mengurangi biaya intermediasi kredit bank dan meningkatkan likuiditas perbankan, *reserve requirement* dapat dikurangi sampai pada tingkat yang mendekati jumlah saldo yang biasanya dipelihara oleh bank-bank di bank sentral untuk keperluan penyelesaian transaksi (*settlements*). Namun demikian, mengingat pengurangan rasio *reserve requirement* memiliki konsekuensi berupa peningkatan inflasi maka rencana Bank Sentral Philippines (Bangko Sentral ng Pilipinas) untuk menurunkan *reserve requirement* disarankan untuk tetap memperhatikan *stance* kebijakan moneter secara keseluruhan khususnya terkait pengendalian inflasi (*inflation targeting framework*). Hal ini mengingat bahwa pada saat penelitian dilakukan (pertengahan 2005), sistem keuangan Philippines dalam kondisi eksis likuiditas dan tingkat inflasi yang melampaui target.

2.5 Kajian Bank Indonesia Mengenai Dampak Kebijakan *Reserve Requirement* (GWM) terhadap Bank dan Perekonomian

2.5.1 Latar Belakang Kebijakan GWM

Sebagaimana telah disinggung dalam bab pendahuluan bahwa kebijakan penerapan GWM perlu disesuaikan dari waktu ke waktu sesuai dengan kondisi likuiditas perbankan serta memperhatikan peran bank dalam pelaksanaan fungsi intermediasi sejalan dengan arah kebijakan Bank Indonesia.

Ketentuan terbaru Bank Indonesia mengenai Giro Wajib Minimum (GWM) yaitu Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.12/19/PBI/2010 tanggal 4 Oktober 2010 merupakan salah satu pendekatan yang digunakan oleh Bank Indonesia untuk mendukung stabilitas moneter dan sektor keuangan terkait dengan upaya Bank Indonesia untuk mengendalikan inflasi serta mengelola ekskses likuiditas perbankan yang tinggi dan persisten agar tidak berdampak pada peningkatan ekspektasi inflasi yang dapat mengganggu stabilitas moneter (Penjelasan PBI No.12/19/PBI/2010).

Hal tersebut terkait dengan tantangan pengelolaan kebijakan moneter yang dihadapkan pada risiko meningkatnya tekanan inflasi, derasnya arus masuk modal asing, dan ekskses likuiditas di sektor keuangan. Memasuki paruh kedua tahun 2010 gejolak harga komoditas pangan yang melanda berbagai negara akibat dampak perubahan iklim, termasuk Indonesia, mulai mendorong naiknya risiko kenaikan tekanan inflasi. Di tengah derasnya arus masuk modal asing dan tingginya ekskses likuiditas di sistem keuangan, kompleksitas penerapan kebijakan moneter semakin meningkat. Penggunaan instrumen suku bunga semata untuk meredam peningkatan risiko tekanan inflasi akan memiliki implikasi yang lebih luas. Dalam merespons hal tersebut, Bank Indonesia menerapkan kebijakan yang dikemas dalam suatu bauran kebijakan moneter dan makroprudensial salah satunya berupa penyesuaian GWM (Bank Indonesia, 2011b).

Sejak November 2010, Bank Indonesia memberlakukan kenaikan GWM primer dari 5% menjadi 8%. Di samping itu, penerapan GWM sekunder sebesar 2,5% tetap berlaku. Bank Indonesia juga menerapkan aturan terkait GWM

berdasarkan *loan to deposit ratio* (LDR) yang berlaku efektif pada Maret 2011 (Bank Indonesia, 2011b).

2.5.2 Dampak Kebijakan GWM terhadap Bank dan Perekonomian

Berdasarkan kajian Bank Indonesia (Bank Indonesia, 2010) sebelum diberlakukannya ketentuan GWM yang baru (PBI No.12/19/PBI/2010), penerapan GWM akan memberikan dampak pada dua aspek yaitu biaya dana (*cost of fund/COF*) dan ketersediaan likuiditas bank. Terkait dampak terhadap likuiditas bank, ketentuan GWM yang baru diperkirakan akan menimbulkan kontraksi antara Rp51,8 triliun s.d Rp58,4 triliun atau sekitar 2% dari total Dana Pihak Ketiga (DPK) bank posisi Desember 2010 yang sebesar Rp2.600 triliun. Adapun dampak terhadap biaya dana (*cost of fund/COF*), ketentuan GWM yang baru diperkirakan akan menyebabkan peningkatan COF maksimum sebesar 0,6% (Bank Indonesia, 2010b).

Berkenaan dengan COF, Bank Indonesia telah mengeluarkan Surat Edaran No.13/5/DPNP tanggal 8 Februari 2011 perihal Transparansi Informasi Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) yang mengatur mengenai tata cara penghitungan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) atau *prime lending rate* secara spesifik dan jelas serta kewajiban bank untuk mempublikasikan SBDK tersebut kepada nasabah. Dalam ketentuan tersebut, GWM bank diperhitungkan dalam komponen Biaya Regulasi (mencakup biaya penjaminan di Lembaga Penjamin Simpanan/LPS dan biaya GWM). Berdasarkan penelitian Bank Indonesia atas laporan SBDK bank-bank posisi September 2011, rata-rata Biaya Regulasi adalah sebesar 0,62% dari rata-rata SBDK yang sebesar 11,37% (Bank Indonesia, 2011e), sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.4.

Terkait dengan dampak terhadap likuiditas bank, berdasarkan Laporan Perekonomian Indonesia Tahun 2010 (Bank Indonesia, 2011b) kebijakan yang dilakukan Bank Indonesia dengan menaikkan GWM primer rupiah pada November 2010 menjadi sebesar 8% mampu menyerap eksese likuiditas bank sebesar Rp43,3 triliun.

**Tabel 2.4. Perkembangan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK)
Bank Umum, Maret - September 2011**

Segmen Kredit	Seluruh Bank						
	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept
Korporasi							
HPDK	5.50	5.53	5.63	5.51	5.70	5.63	5.68
Biaya DPK	4.32	4.00	4.51	4.46	4.52	4.40	4.45
Biaya Bukan DPK	0.33	0.35	0.31	0.45	0.48	0.46	0.44
Biaya Regulasi	0.61	0.62	0.62	0.60	0.60	0.59	0.60
OHC	3.05	3.12	3.13	3.28	2.96	3.03	2.95
Biaya Tenaga Kerja	1.03	0.97	0.94	1.00	1.00	1.04	1.02
Biaya Promosi	0.16	0.16	0.16	0.17	0.17	0.17	0.16
CKPN	0.63	0.63	0.58	0.61	0.30	0.32	0.29
Margin	1.97	1.92	1.91	1.90	1.88	1.89	1.86
SBDK	10.51	10.58	10.64	10.72	10.54	10.55	10.51
Ritel							
HPDK	5.50	6.01	5.61	5.74	5.87	5.75	5.82
Biaya DPK	4.23	4.04	4.48	4.54	4.59	4.43	4.44
Biaya Bukan DPK	0.43	0.56	0.38	0.63	0.54	0.51	0.50
Biaya Regulasi	0.56	0.61	0.60	0.62	0.62	0.60	0.62
OHC	3.66	3.51	3.62	3.59	3.59	3.69	3.62
Biaya Tenaga Kerja	1.11	1.06	1.16	1.18	1.23	1.37	1.36
Biaya Promosi	0.20	0.20	0.15	0.17	0.21	0.22	0.20
CKPN	0.30	0.41	0.28	0.26	0.23	0.22	0.17
Margin	2.66	2.68	2.59	2.53	2.53	2.63	2.55
SBDK	11.80	12.21	11.84	11.91	12.00	12.08	12.04
KPR							
HPDK	6.00	6.04	6.07	6.11	6.24	6.21	6.23
Biaya DPK	4.37	4.05	4.55	4.63	4.64	4.51	4.58
Biaya Bukan DPK	0.35	0.37	0.30	0.48	0.52	0.49	0.47
Biaya Regulasi	0.59	0.61	0.60	0.60	0.61	0.60	0.62
OHC	3.49	3.51	3.52	3.46	3.17	3.26	3.19
Biaya Tenaga Kerja	1.13	1.19	1.14	1.08	1.10	1.18	1.19
Biaya Promosi	0.24	0.23	0.24	0.24	0.26	0.27	0.24
CKPN	0.58	0.57	0.55	0.53	0.18	0.19	0.16
Margin	1.68	1.73	1.75	1.78	1.58	1.57	1.59
SBDK	11.16	11.25	11.35	11.38	11.03	11.03	11.04
Non-KPR							
HPDK	5.85	5.92	5.93	6.17	6.16	6.17	6.18
Biaya DPK	4.29	3.81	4.66	4.62	4.53	4.52	4.57
Biaya Bukan DPK	0.46	0.46	0.37	0.46	0.56	0.54	0.52
Biaya Regulasi	0.56	0.59	0.57	0.59	0.61	0.60	0.62
OHC	3.49	3.55	3.51	3.38	3.67	3.74	3.66
Biaya Tenaga Kerja	1.12	1.17	1.16	1.06	1.24	1.37	1.38
Biaya Promosi	0.21	0.20	0.20	0.22	0.25	0.26	0.23
CKPN	0.34	0.46	0.39	0.25	0.25	0.26	0.21
Margin	2.24	2.27	2.30	2.28	2.04	2.05	1.98
SBDK	11.56	11.70	11.76	11.86	11.86	11.96	11.88

Sumber: Bank Indonesia (2011e).

Keterangan: DPK (Dana Pihak Ketiga), OHC (*Over Head Cost*), CKPN (Cadangan Kerugian Penurunan Nilai).

BAB 3

GAMBARAN UMUM

3.1 Bank Indonesia

Dalam sub bab ini akan diuraikan mengenai status dan kedudukan Bank Indonesia sebagai lembaga negara, tujuan dan tugas Bank Indonesia yang merupakan bank sentral negara Republik Indonesia serta peran Bank Indonesia dalam pengendalian inflasi.

3.1.1 Status dan Kedudukan Bank Indonesia

Sejarah kelembagaan Bank Indonesia dimulai sejak berlakunya Undang-undang (UU) No.11/1953 tentang Penetapan UU Pokok Bank Indonesia pada tanggal 1 Juli 1953. Dalam melakukan tugasnya sebagai bank sentral, Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Moneter, Direksi, dan Dewan Penasihat. Ditangan Dewan Moneter inilah kebijakan moneter Bank Indonesia ditetapkan, meskipun tanggungjawab berada pada pemerintah. Pada masa awal Orde Baru, landasan Bank Indonesia berubah dengan adanya UU No.13/1968 tentang Bank Sentral. Sejak saat itu, Bank Indonesia berfungsi sebagai bank sentral dan sekaligus membantu pemerintah dalam pembangunan dengan menjalankan kebijakan yang ditetapkan pemerintah dengan bantuan Dewan Moneter. Dengan demikian, Bank Indonesia tidak lagi dipimpin oleh Dewan Moneter (Bank Indonesia, 2006).

Setelah tumbanganya Orde Baru, Bank Indonesia dapat mencapai independensinya melalui Undang-undang No.23/1999 tentang Bank Indonesia yang diubah dengan Undang-undang No.3/2004. Sejak saat itu, Bank Indonesia memiliki kedudukan khusus dalam struktur kenegaraan sebagai lembaga negara yang independen dan bebas dari dari campur tangan pemerintah dan/atau pihak-pihak lainnya. Namun, dalam melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia harus mempertimbangkan pula kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian (Bank Indonesia, 2006).

Dilihat dari sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, kedudukan Bank Indonesia sebagai lembaga negara yang independen tidak sejajar dengan lembaga

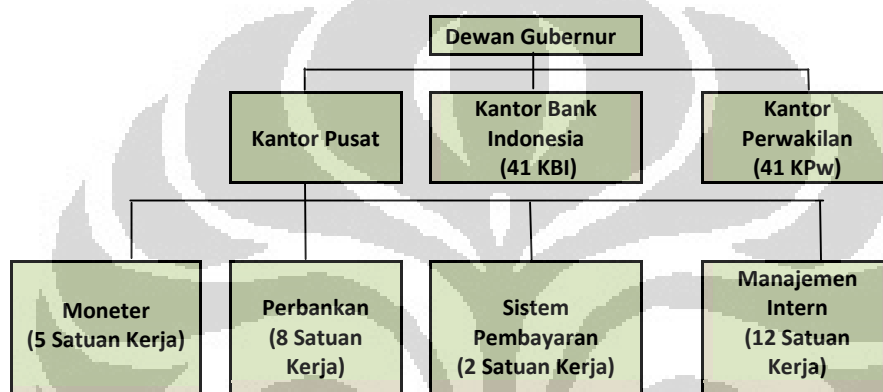
tinggi negara seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Mahkamah Agung (MA). Kedudukan Bank Indonesia juga tidak sama dengan Kementerian karena kedudukan Bank Indonesia di luar pemerintahan. Status dan kedudukan yang khusus tersebut diperlukan agar Bank Indonesia dapat melaksanakan peran dan fungsinya sebagai Otoritas Moneter secara lebih efektif dan efisien. Meskipun Bank Indonesia berkedudukan sebagai lembaga negara independen, dalam melaksanakan tugasnya, Bank Indonesia mempunyai hubungan kerja dan koordinasi yang baik dengan DPR, BPK, pemerintah dan pihak lainnya (Bank Indonesia, 2006).

Dalam hubungannya dengan Presiden dan DPR, Bank Indonesia setiap awal tahun anggaran menyampaikan informasi tertulis mengenai evaluasi pelaksanaan kebijakan moneter dan rencana kebijakan moneter yang akan datang. Khusus kepada DPR, Bank Indonesia menyampaikan pelaksanaan tugas dan wewenang setiap triwulan dan sewaktu-waktu diminta oleh DPR. Selain itu, Bank Indonesia menyampaikan rencana dan realisasi anggaran tahunan kepada pemerintah dan DPR. Dalam hubungannya dengan BPK, Bank Indonesia wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada BPK (Bank Indonesia, 2006).

Untuk memperoleh gambaran mengenai struktur organisasi Bank Indonesia dapat dilihat pada Gambar 3.1. Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Gubernur yang terdiri seorang Gubernur sebagai pemimpin, dibantu oleh seorang Deputy Gubernur Senior sebagai wakil, dan sekurang-kurangnya empat atau sebanyak-banyaknya tujuh Deputy Gubernur. Masa jabatan Gubernur dan Deputy Gubernur selama lima tahun dan dapat diangkat kembali dalam jabatan yang sama untuk sebanyak-banyaknya satu kali masa jabatan berikutnya. Gubernur, Deputy Gubernur Senior, dan Deputy Gubernur diusulkan dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Calon Deputy Gubernur diusulkan oleh Presiden berdasarkan rekomendasi dari Gubernur Bank Indonesia (Pasal 41 UU No.3/2004). Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia tidak dapat diberhentikan oleh Presiden, kecuali ia mengundurkan diri, terbukti melakukan tindak pidana, tidak dapat hadir secara fisik dalam jangka waktu tiga bulan berturut-turut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dinyatakan pailit atau tidak mampu

memenuhi kewajiban kepada kreditor, atau berhalangan tetap (Latumaerissa, 2011).

Dewan Gubernur membawahi Kantor Pusat Bank Indonesia yang berkedudukan di Jakarta, 41 Kantor Bank Indonesia yang berkedudukan di ibukota propinsi dan beberapa kabupaten/kota serta empat Kantor Perwakilan yaitu New York, London, Singapore dan Tokyo. Selanjutnya Kantor Pusat Bank Indonesia membawahi empat sektor yaitu Sektor Moneter, Sektor Perbankan, Sektor Sistem Pembayaran dan Sektor Manajemen Intern (Latumaerissa, 2011).



Gambar 3.1.
Struktur Organisasi Bank Indonesia

Sumber: Latumaerissa (2011, p. 69).

3.1.2 Tujuan dan Tugas Bank Indonesia

Berbeda dengan Undang-undang (UU) No.13/1968 tentang Bank Sentral yang tidak merumuskan secara tegas mengenai tujuan Bank Indonesia, dalam UU No.23/1999 tentang Bank Indonesia yang diubah dengan UU No.3/2004 dalam Pasal 7 jelas menyebutkan bahwa tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang merupakan *single objective* Bank Indonesia. Kestabilan nilai rupiah yang dimaksud adalah kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa yang tercermin dari perkembangan laju inflasi serta kestabilan terhadap mata uang negara lain yang tercermin dari perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain.

Perumusan tujuan Bank Indonesia dalam bentuk *single objective* ini dimaksudkan untuk memperjelas sasaran yang akan dicapai dan batasan tanggung

jawab yang harus dipikul oleh Bank Indonesia. Hal ini berbeda dengan tujuan Bank Indonesia dalam UU No.13/1968 yang dirumuskan secara umum yaitu “meningkatkan taraf hidup rakyat”. Ketidaktegasan perumusan tersebut menimbulkan implikasi antara lain peran Bank Indonesia sebagai otoritas tidak jelas dan tidak terfokus bahkan timbul konflik karena antara tugas menjaga kestabilan nilai rupiah dengan tugas mendorong pertumbuhan sering kali tidak dapat berjalan secara bersamaan. Di samping itu, ketidakjelasan tujuan juga menjadikan tanggung jawab terhadap kebijakan yang diambil menjadi tidak jelas (Latumaerissa, 2011).

Sesuai dengan Pasal 7 UU No.23/1999 tentang Bank Indonesia yang diubah dengan UU No.3/2004, dalam rangka mewujudkan tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah maka Bank Indonesia didukung oleh tiga pilar yang merupakan tiga bidang utama tugas Bank Indonesia:

1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter;
2. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran;
3. Mengatur dan mengawasi bank.

Terkait dengan tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter dalam rangka menjaga kestabilan rupiah, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk melaksanakan kebijakan moneter melalui penetapan sasaran moneter dengan memerhatikan sasaran laju inflasi serta melakukan pengendalian moneter melalui berbagai instrumen antara lain (Latumaerissa, 2011):

1. Operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing;
2. Penetapan tingkat diskonto;
3. Penetapan cadangan wajib minimum; dan
4. Pengaturan kredit atau pembiayaan.

3.1.3 Peran Bank Indonesia dalam Pengendalian Inflasi

Dalam UU No.23/1999 tentang Bank Indonesia pada Pasal 4 menyebutkan bahwa Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen. Independen diartikan sebagai lembaga negara yang bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak lainnya. Selanjutnya, dalam Pasal 9 dinyatakan bahwa pihak lain dilarang melakukan segala bentuk campur tangan terhadap pelaksanaan tugas

Bank Indonesia, dan Bank Indonesia wajib menolak dan/atau mengabaikan segala bentuk campur tangan dari pihak manapun dalam rangka melaksanakan tugasnya. Independensi tersebut ditandai dengan diberikannya kewenangan penuh pada Bank Indonesia dalam menetapkan target-target yang akan dicapai (*goal independence*) dan kebebasan dalam menggunakan berbagai piranti moneter (*instrument independence*) dalam mencapai target tersebut. Selanjutnya dalam Pasal 10 ditegaskan bahwa Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk melaksanakan kebijakan moneter melalui penetapan sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi (Latumaerissa, 2011).

Tingkat inflasi tercermin dari naiknya harga barang-barang secara umum. Faktor-faktor yang mempengaruhi inflasi dapat dibagi menjadi dua macam yaitu tekanan inflasi yang berasal dari sisi permintaan dan dari sisi penawaran. Dalam hal ini, Bank Indonesia hanya memiliki kemampuan untuk mempengaruhi tekanan inflasi yang berasal dari sisi permintaan, sedangkan tekanan inflasi dari sisi penawaran (bencana alam, musim kemarau, distribusi barang tidak lancar, dan lain-lain) sepenuhnya berada di luar pengendalian Bank Indonesia. Oleh karena itu, untuk dapat mencapai dan menjaga tingkat inflasi yang rendah dan stabil, diperlukan adanya kerja sama baik dengan pemerintah maupun swasta. Selanjutnya nilai tukar rupiah sepenuhnya ditetapkan oleh kekuatan permintaan dan penawaran yang terjadi di pasar. Apa yang dapat dilakukan oleh Bank Indonesia adalah menjaga agar nilai rupiah tidak terlalu berfluktuasi secara tajam (Latumaerissa, 2011).

Sasaran akhir kebijakan moneter Bank Indonesia di masa depan pada dasarnya lebih diarahkan untuk menjaga inflasi. Pemilihan inflasi sebagai sasaran akhir ini sejalan pula dengan kecenderungan perkembangan terakhir bank-bank sentral di dunia, di mana banyak bank sentral yang beralih untuk lebih menfokuskan diri pada upaya pengendalian inflasi atau *inflation targetting framework/ITF* (Latumaerissa, 2011). Kerangka kerja ini diterapkan secara formal sejak Juli 2005, setelah sebelumnya menggunakan kebijakan moneter yang menerapkan uang primer (*base money*) sebagai sasaran kebijakan moneter (<http://www.bi.go.id/web/id/Moneter/Kerangka+Kerangka+Moneter/>).

Alasan yang mendasari perubahan sasaran kebijakan moneter Bank Indonesia tersebut di atas adalah (Latumaerissa, 2011):

1. Bukti-bukti empiris menunjukkan bahwa dalam jangka panjang kebijakan moneter Bank Indonesia hanya dapat memengaruhi inflasi, kebijakan moneter Bank Indonesia tidak dapat memengaruhi variabel riil, seperti pertumbuhan output ataupun tingkat pengangguran.
2. Pencapaian inflasi rendah merupakan prasyarat bagi tercapainya sasaran makroekonomi lainnya, seperti pertumbuhan pada tingkat kapasitas penuh (*full employment*) dan penyediaan lapangan kerja yang seluas-luasnya.
3. Penetapan tingkat inflasi rendah sebagai tujuan akhir kebijakan moneter akan menjadi *nominal anchor* berbagai kegiatan ekonomi.

Strategi yang digunakan oleh Bank Indonesia dalam mencapai sasaran inflasi yang rendah adalah (Latumaerissa, 2011):

1. Mengkaji efektivitas instrumen moneter dan jalur transmisi kebijakan moneter Bank Indonesia.
2. Menentukan sasaran akhir kebijakan moneter Bank Indonesia.
3. Mengidentifikasi variabel yang menyebabkan tekanan-tekanan inflasi.
4. Memformulasikan respon kebijakan moneter Bank Indonesia.
5. Laju inflasi yang diperoleh dari Indeks Harga Konsumen (IHK) sebagai sasaran akhir dan laju inflasi inti (*core* atau *underlying inflation*) sebagai sasaran operasional.

Terdapat dua konsep dalam pengertian inflasi inti (Latumaerissa, 2011):

1. Inflasi inti sebagai komponen inflasi yang cenderung “menetap” atau persisten (*persistent component*) di dalam setiap pergerakan laju inflasi.
2. Inflasi inti sebagai kecenderungan perubahan harga-harga secara umum (*generalized component*). *Core inflation* pada beberapa literatur disebut juga dengan *underlying inflation*. Inflasi inti inilah yang dapat dipengaruhi atau dikendalikan oleh Bank Indonesia.

Di dalam operasionalnya, Bank Indonesia tidak menggunakan inflasi IHK sebagai acuan dalam mengambil kebijakan moneter, namun menggunakan inflasi inti. Penggunaan inflasi inti sebagai sasaran operasional disebabkan inflasi inti dapat memberikan sinyal yang tepat dalam memformulasikan kebijakan moneter.

Disamping itu, kebijakan tersebut dapat juga untuk menyesuaikan kembali pertumbuhan ekonomi pada tingkat yang sesuai dengan kapasitas perekonomian. Sebagai contoh, dalam hal terjadi gangguan permintaan (*demand shock*) yang mengakibatkan inflasi tinggi, respon bank sentral akan mengetatkan uang beredar sehingga tingkat inflasi dapat ditekan. Sebaliknya, jika inflasi meningkat karena terjadinya gangguan penurunan di sisi penawaran (*supply side*), misalnya kenaikan harga makanan karena musim kering, maka kebijakan uang ketat Bank Indonesia justru dapat memperburuk tingkat harga dan pertumbuhan ekonomi. Respon yang perlu diambil Bank Indonesia justru pelonggaran likuiditas perekonomian untuk menstimulasi peningkatan penawaran (Latumaerissa, 2011).

Bank Indonesia menetapkan IHK sebagai target/sasaran akhir, seperti yang diterapkan di semua negara yang menganut sistem target inflasi secara eksplisit. Ada beberapa alasan yang mendasari dipilihnya IHK sebagai target bank sentral, baik dari sisi teoritis maupun dari segi kepraktisannya. Kelebihan atas digunakannya IHK ini antara lain adalah merupakan alat ukur yang paling tepat untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat karena IHK mengukur indeks biaya hidup konsumen (Latumaerissa, 2011).

Mekanisme penetapan sasaran inflasi tersebut di atas sesuai Pasal 7 UU No 23/1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan UU No 3/2004 adalah sebagai berikut:

1. Bank Indonesia menyampaikan usulan sasaran inflasi kepada Pemerintah secara tertulis pada bulan Mei pada tahun sebelum berlakunya periode sasaran inflasi.
2. Usulan sasaran inflasi sebagaimana dimaksud di bahas bersama oleh Pemerintah dan Bank Indonesia.
3. Pemerintah menetapkan sasaran inflasi dengan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) atau Peraturan Menteri Keuangan (PMK, sejak 2010) dan mengumumkannya kepada publik pada bulan Juli pada tahun sebelum berlakunya periode sasaran inflasi.

Pengumuman sasaran inflasi mengandung makna yang penting dalam rangka transparansi dan menunjukkan komitmen Bank Indonesia terhadap pengendalian inflasi. Bagi masyarakat, sasaran inflasi tersebut dapat menjadi arah

mengenai kondisi perekonomian di masa mendatang sehingga dapat melakukan perencanaan kegiatan ekonominya dengan lebih baik. Atas dasar hal tersebut maka Bank Indonesia akan mengumumkan sasaran inflasi untuk jangka waktu antara 2-3 tahun ke depan. Sasaran tersebut akan diumumkan dalam suatu *range (band)* dengan titik tengah tertentu. Hal ini dimaksudkan untuk mengakomodasi kemungkinan terjadinya *random shocks* (tekanan-tekanan dari sisi penawaran yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya), seperti lonjakan harga cabai. Dalam jangka menengah dan panjang, laju inflasi diharapkan dapat ditekan sekitar 5%. Dalam jangka pendek, angka inflasi dipertahankan di bawah *single digit* (Latumaerissa, 2011).

Sasaran inflasi Bank Indonesia yang telah disetujui Pemerintah sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2012 dapat dilihat pada Tabel 3.1 (Bank Indonesia, 2007).

**Tabel 3.1. Sasaran Inflasi Bank Indonesia
Tahun 2005 - 2012**

KMK No.399/KMK.011/2004 Periode 2005-2007		KMK No.1 Tahun 2008		PMK No.143/PMK.011/2010 Periode 2010-2012 *)	
2005	6,0 ± 1%	2008	5,0 ± 1%	2010	5,0 ± 1%
2006	5,5 ± 1%	2009	4,5 ± 1%	2011	5,0 ± 1%
2007	5,0 ± 1%	2010	4,0 ± 1%	2012	4,5 ± 1%

Sumber: Bank Indonesia (2007). *) Revisi KMK No.1, Tahun 2008 untuk sasaran inflasi 2010.

3.2 Industri Perbankan Indonesia

Dalam sub bab ini akan dibahas mengenai pengertian bank, kegiatan usaha bank umum, pengelompokan bank umum, kedudukan bank umum dalam struktur perbankan Indonesia serta perkembangan perbankan Indonesia.

3.2.1 Pengertian Bank

Kegiatan operasional bank di Indonesia diatur dengan Undang-undang (UU) No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No.10 tahun 1998 tentang Perbankan (UU Perbankan) dan peraturan-peraturan pelaksanaannya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (BI) selaku otoritas pengawasan perbankan di Indonesia.

Menurut UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No.10 tahun 1998, definisi bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Selain definisi bank tersebut, beberapa definisi menurut UU Perbankan yang terkait dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
- Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.
- Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan.
- Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dan bank.
- Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
- Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank.

3.2.2 Kegiatan Usaha Bank Umum di Indonesia

Pada intinya kegiatan usaha bank di Indonesia sebagaimana diatur dalam UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah dengan Undang-undang No.10 tahun 1998 meliputi kegiatan penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, deposito berjangka, sertifikat deposito dan/atau bentuk lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu serta menerbitkan pengakuan utang dan kegiatan penempatan dana dalam bentuk kredit.

Bank-bank di Indonesia juga melakukan pembelian, penjualan atau penjaminan atas risiko sendiri atau untuk kepentingan dan atas perintah nasabah: surat-surat wesel, surat pengakuan utang, kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan Pemerintah, sertifikat Bank Indonesia, obligasi, surat dagang berjangka waktu sampai dengan satu tahun dan instrumen surat berharga lain dengan jangka waktu sampai dengan satu tahun (Laksito, 2010).

Selain itu, terdapat beberapa kegiatan lain yang diijinkan oleh UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.10 tahun 1998 tentang Perbankan, antara lain yaitu: memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun nasabah, menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, dengan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya serta kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan penghimpunan dan penyaluran dana, kegiatan penitipan (kustodian) dan sistem pembayaran.

Pada beberapa bank, termasuk bank BUMN dan kantor cabang bank asing serta bank umum swasta nasional devisa yang besar, pada umumnya telah melengkapi pilihan jasa layanan kepada nasabahnya dengan transaksi keuangan yang lebih kompleks seperti transaksi *structured product* yang harus dilaporkan kepada BI sesuai ketentuan yang tertuang di dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No.11/18/DPNP tanggal 16 Juli 2009 perihal Pelaporan *Structured Product* (Laksito, 2010).

3.2.3 Pengelompokan Bank Umum

Berdasarkan status kepemilikannya, bank umum dapat dibedakan sebagai berikut (Latumaerissa, 2011):

1. Bank Milik Negara

Adalah bank yang seluruh modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan dan pendiriannya di bawah Undang-undang tersendiri. Contoh: Bank Mandiri, BRI, BNI, BTN dan Bukopin.

2. Bank Milik Swasta Nasional

Adalah bank milik swasta yang didirikan dalam bentuk hukum perseroan terbatas, dimana seluruh sahamnya dimiliki oleh WNI dan/atau badan hukum di Indonesia. Contoh: Bank Mega, Bank Danamon, Bank Swadesi, Bank Permata dan Bank Panin.

3. Bank Swasta Asing

Adalah bank yang didirikan dalam bentuk cabang bank yang sudah ada di luar negeri. Bank asing ini hanya diperkenankan menjalankan operasinya di lima kota besar di Indonesia. Contoh: Citibank, HSBC, ABN Amro, Rabobank, Commonwealth, dan Bank ANZ.

4. Bank Pembangunan Daerah

Adalah bank yang pendiriannya berdasarkan peraturan daerah propinsi dan sebagian besar sahamnya dimiliki oleh pemerintah kota dan pemerintah kabupaten di wilayah yang bersangkutan, dan modalnya merupakan harta kekayaan pemerintah daerah yang dipisahkan. Contoh: Bank Jatim, Bank Maluku, Bank DKI, Bank Jabar Banten, Bank Papua dan Bank NTT.

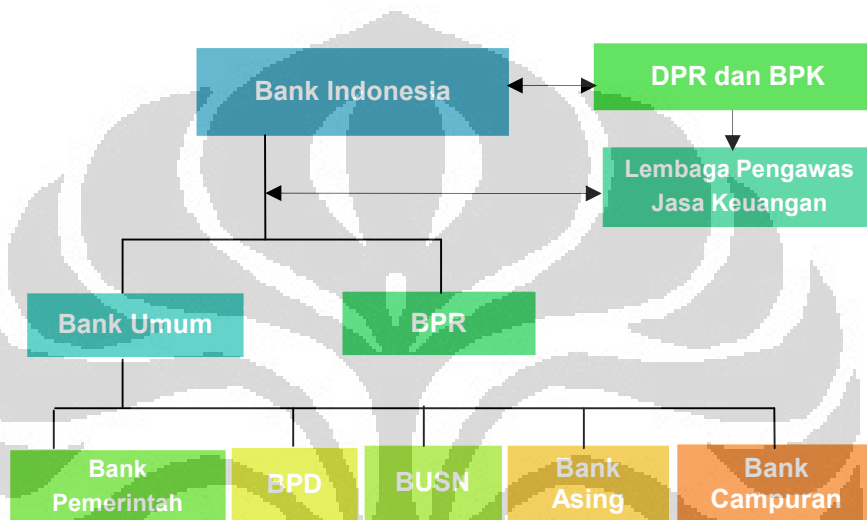
5. Bank Campuran

Adalah bank umum yang didirikan bersama oleh satu atau lebih bank umum yang berkedudukan di Indonesia, dengan satu atau lebih bank yang berkedudukan di luar negeri. Contoh: ANZ Panin Bank dan Bank DBS Indonesia

3.2.4 Bank Umum dalam Sistem Perbankan di Indonesia

Lembaga keuangan perbankan mempunyai peranan yang sangat penting dalam perekonomian suatu negara. Perbankan mempunyai kegiatan yang

mempertemukan pihak yang membutuhkan dana (*borrower*) dan pihak yang mempunyai kelebihan dana (*saver*). Melalui kegiatan perkreditan, bank berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat bagi kelancaran usahanya, sedangkan dengan kegiatan penyimpanan dana, bank berusaha menawarkan kepada masyarakat keamanan dananya dengan jasa-jasa lain yang dapat diperoleh. Kedudukan bank umum dalam struktur perbankan di Indonesia menurut Undang-undang Perbankan No.10/1998 dapat dilihat pada Gambar 3.2 (Latumaerissa, 2011).



Gambar 3.2.
Sistem Perbankan di Indonesia

Sumber: Latumaerissa (2011, 44).

3.2.5 Perkembangan Bank Umum

Dalam bagian ini akan dibahas mengenai perkembangan bank umum meliputi aspek kelembagaan (jumlah bank dan kantor bank), total aset, kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana khususnya kredit serta beberapa rasio bank.

3.2.5.1 Jumlah Bank dan Kantor Bank

Perkembangan jumlah bank umum selama periode 2006-2011 (sampai dengan September) dapat dilihat pada Tabel 3.2. Dalam periode tersebut, jumlah bank umum mengalami penurunan yaitu pada posisi September 2011 sebanyak 120 bank dibandingkan tahun 2006 sebanyak 130 bank. Hal ini disebabkan

adanya merger beberapa bank antara lain Bank Buana dan Bank UOB menjadi Bank UOB Buana, Bank NISP dan Bank OCBC Indonesia menjadi Bank OCBC NISP serta pencabutan izin usaha atas permintaan pemegang saham (*self liquidation*) PT Bank Barclays Indonesia.

**Tabel 3.2. Perkembangan Jumlah Bank Umum
Tahun 2006-2011**

Kelompok Bank	2006	2007	2008	2009	2010	2011*)
Bank Persero	5	5	5	4	4	4
BUSN Devisa	35	35	32	34	36	36
BUSN Non Devisa	36	36	36	31	31	30
BPD	26	26	26	26	26	26
Bank Campuran	17	17	15	16	15	14
Bank Asing	11	11	10	10	10	10
Total	130	130	124	121	122	120

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia (Bank Indonesia, 2011d). *) Sampai dengan September.

Sedangkan pada Tabel 3.3 terlihat bahwa jumlah kantor bank mengalami perkembangan yang cukup pesat. Selama periode 2006 - 2011 (sampai dengan September), jumlah kantor bank meningkat sebanyak 5.363 kantor (59%) yaitu dari 9.110 kantor menjadi 14.473 kantor atau rata-rata meningkat sebanyak 1.073 kantor atau 10% per tahun. Secara persentase, peningkatan terbesar jumlah kantor terjadi pada kelompok Bank Campuran yaitu rata-rata sebesar 29% per tahun. Adapun secara nominal peningkatan terbesar jumlah kantor terjadi pada kelompok Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) Devisa yaitu sebanyak 530 kantor per tahun.

**Tabel 3.3. Perkembangan Jumlah Kantor Bank Umum
Tahun 2006-2011**

Kelompok Bank	2006	2007	2008	2009	2010	2011*)
Bank Persero	2.548	2.765	3.134	3.864	4.189	4.289
BUSN Devisa	4.395	4.694	5.196	6.181	6.608	7.043
BUSN Non Devisa	759	778	875	976	1.131	1.244
BPD	1.217	1.205	1.310	1.358	1.413	1.448
Bank Campuran	77	96	168	238	263	246
Bank Asing	114	142	185	230	233	203
Total	9.110	9.680	10.868	12.847	13.837	14.473

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia (Bank Indonesia, 2011d). *) Sampai dengan September.

3.2.5.2 Total Aset

Pada posisi September 2011 total aset Bank Umum sebesar Rp3.371.453 miliar atau tumbuh Rp1.677.602 miliar (90%) dibandingkan posisi akhir tahun 2006 sebesar Rp1.693.851 miliar. Selama enam tahun terakhir (2006 - September 2011) total aset bank rata-rata tumbuh sebesar 15%. Berdasarkan kelompok bank, aset perbankan pada posisi September 2011 didominasi oleh dua kelompok bank yaitu Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) Devisa dan Bank Persero dengan pangsa masing-masing sebesar 39% dan 37% (lihat Tabel 3.4).

**Tabel 3.4. Perkembangan Total Aset Bank Umum
Tahun 2006-2011**

(dalam miliar Rp)

Kelompok Bank	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Bank Persero	621.212	741.988	847.563	979.078	1.115.519	1.173.705
BUSN Devisa	663.002	768.730	883.470	958.549	1.203.370	1.360.282
BUSN Non Devisa	29.657	39.012	42.467	55.762	78.485	95.439
BPD	159.476	170.012	185.252	200.542	239.141	307.500
Bank Campuran	64.421	90.480	118.131	135.675	149.990	165.775
Bank Asing	156.083	176.278	233.674	204.502	222.347	268.752
Total	1.693.851	1.986.500	2.310.557	2.534.108	3.008.852	3.371.453

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia (Bank Indonesia, 2011d). *) Sampai dengan September.

3.2.5.3 Penghimpunan Dana Pihak Ketiga

Berdasarkan Statistik Perbankan Indonesia (Bank Indonesia, 2011c), terlihat bahwa kegiatan bank umum di Indonesia masih didominasi oleh transaksi produk-produk penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) dalam bentuk giro, tabungan dan deposito yaitu mencapai di atas 91% terhadap total sumber dana, khususnya dalam dua tahun terakhir. Rata-rata pertumbuhan DPK selama enam tahun terakhir (2006 - September 2011) mencapai 16,15%. Komposisi DPK pada posisi September 2011 sebagian besar dalam bentuk deposito (46%), disusul oleh tabungan dan giro masing-masing sebesar 31% dan 23%. Gambaran mengenai dominasi dana pihak ketiga yang terdiri dari giro, tabungan dan deposito sebagai sumber dana untuk menjalankan fungsi intermediasi perbankan di Indonesia dapat dilihat pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5. Perkembangan Dana Pihak Ketiga Bank Umum Berdasarkan Jenis Simpanan, Tahun 2006-2011

(dalam miliar Rp)

Jenis Simpanan	2006	2007	2008	2009	2010	2011*)
Giro	338.011	405.551	430.000	465.222	535.855	580.558
Deposito	615.163	666.708	824.704	899.783	1.069.811	1.167.294
Tabungan	333.928	438.574	498.587	585.707	733.157	797.009
Total DPK	1.287.102	1.510.833	1.753.291	1.950.712	2.338.824	2.544.861
Total Sumber Dana	1.468.369	1.718.965	1.990.345	2.180.954	2.563.561	2.833.686
Persentase	87,66%	87,89%	88,09%	89,44%	91,23%	89,81%

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia (Bank Indonesia, 2011d). *) Sampai dengan September.

Berdasarkan kelompok bank, selama enam tahun terakhir (2006-September 2011) DPK masih didominasi oleh BUSN Devisa dengan pangsa rata-rata sebesar 43%, disusul oleh Bank Persero dan Bank BPD dengan pangsa rata-rata masing-masing sebesar 38% dan 10%, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 3.6.

Tabel 3.6. Perkembangan Dana Pihak Ketiga Bank Umum Berdasarkan Kelompok Bank, Tahun 2006-2011

(dalam miliar Rp)

Kelompok Bank	2006	2007	2008	2009	2010	2011*)
Bank Persero	480.394	571.008	669.827	783.384	898.405	899.322
BUSN Devisa	525.177	606.932	701.710	781.072	975.308	1.082.802
BUSN Non Devisa	24.423	30.491	33.213	43.980	58.950	73.398
BPD	129.141	134.287	143.262	152.251	183.624	252.118
Bank Campuran	35.927	54.934	76.902	94.761	98.161	100.932
Bank Asing	92.040	113.182	128.377	117.594	124.376	136.290
Total	1.287.102	1.510.834	1.753.292	1.973.042	2.338.824	2.544.862

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia (Bank Indonesia, 2011d). *) Sampai dengan September.

3.2.5.4 Penyaluran Kredit

Penyaluran kredit oleh Bank Umum selama enam tahun terakhir (2006 – September 2011) tumbuh rata-rata sebesar 21,67% (lihat Tabel 3.7). Pangsa penyaluran kredit Bank Umum terhadap total aktiva produktif (*earning assets*) dalam periode tersebut rata-rata sebesar 57,55%. Dilihat dari jenis penggunaan, selama periode tersebut penyaluran kredit didominasi oleh Kredit Modal Kerja

dengan pangsa rata-rata sebesar 50,23% dan pertumbuhan rata-rata sebesar 20,24% disusul berturut-turut oleh Kredit Konsumsi dengan pangsa rata-rata 29,83% dan pertumbuhan rata-rata 21,67% serta Kredit Investasi dengan pangsa rata-rata 19,94% dan pertumbuhan rata-rata 23,67%.

Tabel 3.7. Perkembangan Penyaluran Kredit Bank Umum Berdasarkan Jenis Penggunaan, Tahun 2006-2011

(dalam miliar Rp)

Jenis Penggunaan	2006	2007	2008	2009	2010	2011*)
Kredit Modal Kerja	405.551	518.339	668.007	686.983	868.356	1.001.183
Kredit Investasi	148.770	183.694	254.373	295.914	345.700	426.037
Kredit Konsumsi	225.545	281.677	366.081	435.899	535.849	633.937
Total Kredit	779.866	983.710	1.288.461	1.418.796	1.749.905	2.061.156
Total Aktiva Produktif	1.565.103	1.851.990	2.242.282	2.464.256	2.831.871	3.146.715
Persentase	49,83%	53,12%	57,46%	57,58%	61,79%	65,50%

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia (Bank Indonesia, 2011d). *) Sampai dengan September.

Berdasarkan kelompok bank, selama enam tahun terakhir (2006 - September 2011) penyaluran kredit Bank Umum didominasi oleh dua kelompok bank yaitu Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) dengan pangsa rata-rata sebesar 43% dan pertumbuhan rata-rata sebesar 22%, disusul oleh Bank Persero dengan pangsa rata-rata sebesar 36% dan pertumbuhan rata-rata sebesar 21% (Tabel 3. 8).

Tabel 3.8. Perkembangan Penyaluran Kredit Bank Umum Berdasarkan Kelompok Bank, Tahun 2006-2011

(dalam miliar Rp)

Kelompok Bank	2006	2007	2008	2009	2010	2011*)
Bank Persero	281.143	344.317	458.021	533.945	630.148	732.981
BPD	55.902	71.856	96.316	120.701	143.067	169.764
BUSN (Devisa&Non Devisa)	329.373	425.914	544.916	593.400	775.323	926.563
Bank Asing dan Campuran	113.449	141.622	189.207	170.748	201.368	231.851
Total	779.867	983.709	1.288.460	1.418.794	1.749.907	2.061.159

Sumber: Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia (Bank Indonesia, 2011c). *) Sampai dengan bulan September.

Dilihat berdasarkan lapangan usaha, selama enam tahun terakhir (2006 - September 2011) penyaluran kredit bank umum masih terkonsentrasi pada tiga sektor yaitu Sektor Lain-lain, Sektor Perdagangan Hotel & Restoran serta Sektor Industri Pengolahan dengan pangsa rata-rata masing-masing sebesar 29,79%, 19,78% dan 18,94%, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 3.9.

Tabel 3.9. Perkembangan Penyaluran Kredit Bank Umum Berdasarkan Lapangan Usaha, Tahun 2006-2011

(dalam miliar Rp)

Lapangan Usaha	2006	2007	2008	2009	2010	2011*)
Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan	44.946	55.864	66.095	75.392	89.922	99.901
Pertambangan dan Penggalian	13.896	25.336	30.541	41.559	60.459	76.546
Industri Pengolahan	182.432	203.808	269.152	245.683	273.854	322.598
Listrik, Gas dan Air Bersih	7.136	7.479	18.176	23.894	33.611	53.819
Konstruksi	32.887	43.769	58.150	63.765	63.168	74.488
Perdagangan, Hotel dan Restoran	157.093	207.140	250.646	292.082	335.673	375.884
Pengangkutan dan Komunikasi	26.306	36.551	62.139	73.002	74.913	86.382
Kuangan, Real Estat dan Jasa Perusahaan	76.704	107.211	149.717	149.007	136.486	171.245
Jasa-jasa	11.570	13.458	15.287	16.580	145.980	166.339
Lain-lain	226.897	283.093	368.557	437.830	535.841	633.956
Total	779.867	983.709	1.288.460	1.418.794	1.749.907	2.061.159

Sumber: Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia (Bank Indonesia, 2011c). *) Sampai dengan bulan September.

3.2.5.4 Perkembangan Beberapa Rasio Bank Umum

Sebagaimana terlihat pada Tabel 3.10, aspek permodalan Bank Umum selama 6 tahun terakhir (2006 - September 2011) tergolong baik, tercermin dari rata-rata *Capital Adequacy Ratio* (CAR) sebesar 18,09% atau lebih tinggi dibandingkan ketentuan Bank Indonesia sebesar 8% (Peraturan Bank Indonesia No.3/21/PBI/2001 tanggal 13 Desember 2001 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum). Dalam periode tersebut, penyaluran kredit bank umum masih belum optimal yang ditunjukkan dengan rata-rata *Loan to Deposit Ratio* (LDR) sebesar 71,79%. Kinerja kredit yang diberikan tergolong baik yang ditunjukkan dengan rasio *Non Performing Loan* (NPL) *netto* yang masih tergolong rendah yaitu rata-rata sebesar 3,65% atau di bawah *benchmark* Bank Indonesia sebesar 5%.

Tabel 3.10. Perkembangan Beberapa Rasio Bank Umum Tahun 2006-2011

(dalam %)

Rasio	2006	2007	2008	2009	2010	2011*)
CAR	21,27	19,30	16,76	17,42	17,18	16,63
LDR	61,56	66,32	74,58	72,88	75,21	81,36
NPL <i>Netto</i>	6,07	4,07	3,20	3,31	2,56	2,67
ROA	2,64	2,78	2,33	2,60	2,86	3,72
NIM	5,80	5,70	5,66	5,56	5,73	6,66
BOPO	86,98	84,05	88,59	86,63	86,14	87,14

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia (Bank Indonesia, 2011d). *) Sampai dengan September.

Kemampuan Bank Umum dalam menghasilkan laba tergolong baik, yang tercermin dari rata-rata rasio *Return on Asset* (ROA) yang relatif tinggi (2,82%) atau di atas *benchmark* Bank Indonesia sebesar 1,25%. Rentabilitas yang baik tersebut didukung oleh rasio pendapatan bunga bersih (*Net Interest Margin*/NIM) yang tergolong tinggi yaitu rata-rata sebesar 6,66% dan tingkat efisiensi (Biaya Operasional dibandingkan Pendapatan Operasional/BOPO) yang relatif baik yaitu rata-rata sebesar 86,59% atau di bawah *benchmark* Bank Indonesia sebesar 94% (Surat Edaran Bank Indonesia No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 perihal Sistem penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum).

3.3 Perkembangan Beberapa Variabel Makroekonomi

Dalam sub bab ini akan dibahas tentang perkembangan beberapa variabel makroekonomi yang relevan dengan penelitian ini yaitu Pertumbuhan Ekonomi/Produk Domestik Bruto (PDB), Jumlah Uang Beredar/Likuiditas Perekonomian, Inflasi dan Suku Bunga.

3.3.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi (Produk Domestik Bruto/PDB) Indonesia selama lima tahun terakhir (2006 - 2010) tumbuh rata-rata sebesar 5,7% (Tabel 3.11). Sejalan dengan berlanjutnya pemulihan ekonomi global, perekonomian Indonesia tahun 2010 tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan PDB tahun 2010 mencapai 6,1% meningkat dari 4,6% pada tahun 2009. Di sisi permintaan, meningkatnya pertumbuhan ekonomi didukung oleh kinerja ekspor dan investasi yang tumbuh tinggi, disertai konsumsi rumah tangga yang tetap kuat.

Kenaikan harga komoditas internasional turut menunjang tingginya pertumbuhan ekspor nasional. Selain itu, meningkatnya kinerja ekspor juga diikuti oleh lebih terdiversifikasinya komoditas ekspor dan lebih besarnya peran negara-negara *emerging markets* sebagai pasar tujuan ekspor Indonesia. Permintaan eksternal dan domestik yang kuat berpengaruh positif bagi optimisme pelaku usaha terhadap prospek perekonomian, sehingga pada akhirnya mendorong kinerja investasi tumbuh meningkat. Sementara itu, konsumsi rumah tangga yang tetap kuat ditopang oleh daya beli masyarakat yang terjaga didukung meningkatnya peran pembiayaan lembaga keuangan. Tingginya permintaan domestik dan eskternal pada gilirannya berdampak pada tingginya pertumbuhan impor hingga melebihi pertumbuhan ekspor (Bank Indonesia, 2011b).

Tabel 3.11. Pertumbuhan PDB Menurut Penggunaan Tahun 2006-2010

(dalam %)

Komponen	2006	2007	2008	2009	2010
Konsumsi	3,90	4,90	5,90	6,20	4,00
Konsumsi Rumah Tangga	3,20	5,00	5,30	4,90	4,60
Konsumsi Pemerintah	9,60	3,90	10,40	15,70	0,30
Pembentukan Modal Tetap Bruto	1,30	9,30	11,90	3,30	8,50
Investasi Non Bangunan	n.a	11,90	25,40	(6,70)	13,10
Investasi Bangunan	n.a	8,50	7,50	7,10	7,00
Ekspor Neto	12,80	6,50	7,60	12,50	7,50
Ekspor Barang dan Jasa	9,40	8,50	9,50	(9,70)	14,90
Impor Barang dan Jasa	8,60	9,10	10,00	(15,00)	17,30
PDB	5,50	6,30	6,00	4,60	6,10

Sumber: Laporan Perekonomian Indonesia Tahun 2008 dan 2010 (BI, 2008 dan BI, 2011c).

n.a: data tidak tersedia karena perbedaan format laporan.

3.3.2 Jumlah Uang Beredar

Membaiknya aktivitas kegiatan ekonomi masyarakat mendorong naiknya pertumbuhan uang kartal dan uang primer pada tahun 2010. Rata-rata pertumbuhan uang kartal mencapai 12,7% pada tahun 2010, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan periode tahun 2009 yang sebesar 8,3%. Pada akhir 2010, uang kartal secara tahunan meningkat 15,2%. Sementara itu, uang primer (M0) tumbuh rata-rata sebesar 12,8% dan di penghujung tahun tercatat tumbuh sebesar 14,7%. Kenaikan pertumbuhan uang primer yang cukup tinggi di

akhir tahun dipengaruhi oleh penerapan kebijakan kenaikan GWM Primer sejak November 2010 (Bank Indonesia, 2011b).

Likuiditas perekonomian mengalami peningkatan pada tahun 2010, meskipun M1 belum kembali pada tingkat pertumbuhan sebelum 2009. Pertumbuhan M1 rata-rata sebesar 12,9%, dan di penghujung tahun 2010 tercatat tumbuh 17,8%. Namun, secara riil akselerasi pertumbuhan M1 ini belum mengalami perubahan yang berarti dan masih lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan pada periode Mei 2006-Desember 2008 yang mencapai 21,5%. Sementara itu, meningkatnya M2 terutama dipengaruhi oleh bertambahnya uang kuasi seiring dengan derasnya aliran uang masuk dari luar negeri. Berdasarkan faktornya, pertumbuhan M2 pada tahun 2010 didukung oleh tingginya kenaikan Aktiva Luar Negeri Bersih yang sebagian besar ditempatkan sebagai uang kuasi di perbankan. Di samping itu, perkembangan Aktiva Dalam Negeri Bersih pada tahun 2010 yang juga meningkat terutama bersumber dari pertumbuhan kredit yang akseleratif sehingga turut berkontribusi pada meningkatnya pertumbuhan M2 (Bank Indonesia, 2011b).

3.3.3 Inflasi

Selama lima tahun terakhir (2006 -2010) rata-rata inflasi Indonesia sebesar 6,6%. Tekanan inflasi pada tahun 2010 mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Inflasi IHK meningkat menjadi 6,96% dari 2,78% di tahun sebelumnya dan berada di atas sasaran inflasi 2010 yang ditetapkan Bank Indonesia di angka $5\% \pm 1\%$ (Tabel 3.12). Perkembangan inflasi yang meningkat tersebut tidak terlepas dari pengaruh faktor eksternal dan faktor domestik yang terjadi sepanjang tahun 2010. Dari sisi eksternal, peningkatan inflasi sejalan dengan meningkatnya inflasi global, khususnya di negara-negara *emerging markets*, sebagai imbas meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan harga-harga komoditas internasional. Namun, pengaruh penguatan nilai tukar rupiah pada tahun ini mampu meminimalkan dampak dari peningkatan harga-harga komoditas global tersebut. Dari sisi domestik; perkembangan ekspektasi inflasi, kondisi permintaan dan penawaran, serta penyesuaian tarif komoditas yang diatur pemerintah (*administered*) relatif tidak memberikan tekanan kenaikan inflasi yang berlebihan. Tekanan kenaikan inflasi muncul terutama akibat terganggunya

kelancaran pasokan bahan makanan yang banyak terpengaruh oleh anomali cuaca (Bank Indonesia, 2011b).

Inflasi inti, sebagai komponen yang lebih dapat mencerminkan pengaruh makroekonomi terhadap perkembangan harga-harga, pada tahun 2010 menunjukkan perkembangan yang stabil di angka 4,28%. Sejak akhir 2009, inflasi inti sempat menurun mencapai level terendahnya di bulan Maret 2010 dan kemudian secara perlahan meningkat kembali ke angka semula di akhir tahun 2010 (Bank Indonesia, 2011c).

Tabel 3.12. Perkembangan Komponen Inflasi IHK Tahun 2006-2010

(dalam %)

Komponen	2006	2007	2008	2009	2010
Inflasi Inti	6,03	6,29	6,29	4,28	4,28
<i>Administered prices</i>	1,84	11,41	16,48	(3,26)	5,40
<i>Volatile food</i>	15,27	3,30	15,99	3,95	17,74
Inflasi IHK	6,60	5,60	11,06	2,78	6,96

Sumber: Laporan Perekonomian Indonesia Tahun 2009 dan 2010 (BI, 2010) dan BI, 2011b).

3.3.4 Suku Bunga Bank Umum

Suku bunga kredit (Modal Kerja, Investasi dan Konsumsi) pada bank umum selama lima tahun terakhir (2006-2010) cenderung turun sejalan dengan penurunan suku bunga deposito dan suku bunga antar bank (Tabel 3.13). Namun demikian, selisih antara suku bunga kredit dan suku bunga deposito masih relatif tinggi (di atas 5%). Tingginya selisih bunga tersebut menjadikan margin bunga bersih (*net interest margin/NIM*) perbankan Indonesia termasuk yang paling tinggi di kawasan regional ASEAN. Hal tersebut antara lain disebabkan oleh struktur perbankan Indonesia yang bersifat oligopoli. Struktur pasar oligopoli tersebut memungkinkan para pelaku didalamnya melakukan *tacit collusion* untuk menjaga NIM tetap tinggi (Warganegara, 2011).

**Tabel 3.13. Perkembangan Suku Bunga Kredit, Deposito dan PUAB
Tahun 2006-2010**

(dalam %)

	2006	2007	2008	2009	2010
Suku Bunga Kredit					
Modal Kerja	15,07	13,00	15,22	13,69	12,83
Investasi	15,10	13,01	14,40	12,96	12,28
Konsumsi	17,58	16,13	16,40	16,42	14,53
Suku Bunga Deposito					
1 bulan	8,96	7,19	10,75	6,87	6,78
3 bulan	9,71	7,42	11,16	7,48	7,03
6 bulan	10,70	7,65	10,34	7,87	7,04
12 bulan	11,63	8,24	10,43	9,55	7,38
24 bulan	11,84	10,83	8,62	9,10	8,36
Suku Bunga PUAB	6,34	6,12	9,87	6,34	5,74

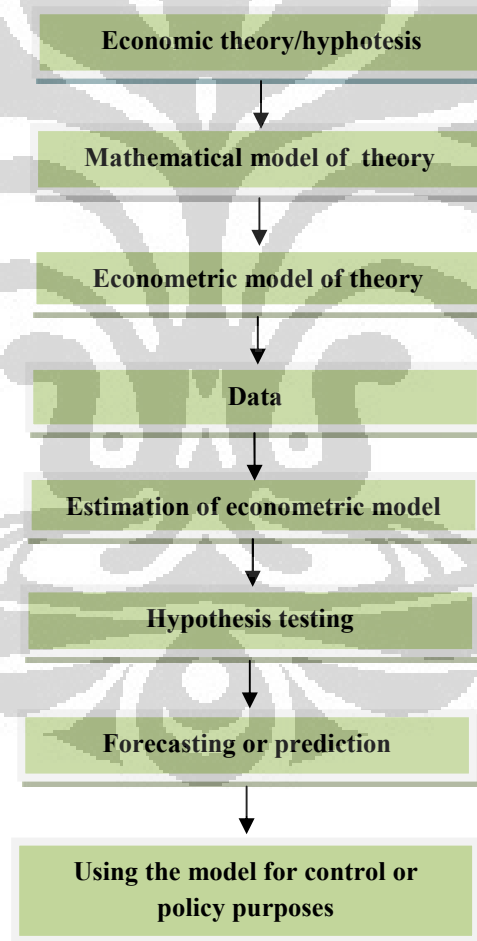
Sumber: Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia (Bank Indonesia, 2011c) dan Laporan Perekonomian Indonesia (Bank Indonesia, 2011b)



BAB 4 METODOLOGI PENELITIAN

4.1. Tahap-tahap Penelitian

Mengingat bahwa penelitian ini merupakan penelitian empirik dengan model ekonometri untuk menguji hubungan antar variabel, maka metode penelitian yang digunakan adalah metodologi ekonometri. Terdapat beberapa aliran (*schools of thought*) dalam metodologi ekonometri, namun dalam penelitian ini menggunakan metodologi ekonometri tradisional/klasikal, dengan tahapan-tahapan sebagai berikut (Gujarati dan Porter, 2011):



Gambar 4.1 Tahap-tahap Penelitian

Sumber: Gujarati dan Porter (2011).

4.2. Obyek Penelitian

Sebagaimana telah disinggung dalam Bab 1 (Pendahuluan) dan Bab 2 (Landasan Teori), penelitian ini terutama mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Okamoto (2011) tentang pengaruh *reserve requirement* terhadap volume kredit dan suku bunga kredit pada perbankan di Amerika Serikat dengan menggunakan data *time series* berupa data triwulanan (*quarterly*) pada periode 1971 sampai dengan 2009.

Dalam penelitiannya tersebut, Okamoto (2011) menggunakan dua model regresi sebagai berikut:

- (1). Untuk mengetahui dampak *reserve requirement* terhadap volume kredit bank (sebagai variabel terikat/dependen):

$$y_t = \alpha_0 + \alpha_1 x + \sum_{i=1}^n \gamma c_i + \varepsilon_t$$

dimana:

y_t = volume kredit bank (dalam miliar USD)

x = tingkat *reserve requirement*

c_i = variabel kontrol, terdiri atas: suku bunga KPR (*mortgage rate*) 30 tahun, suku bunga The Fed (*federal funds affective rate*), tingkat pengangguran (*unemployment rate*), *dummy variable* berupa kebijakan Basel I dengan nilai 1 sejak diterapkan (1988) dan nilai 0 sebelum tahun 1988, pertumbuhan GDP, inflasi (perubahan *Consumer Price Index/CPI*), perubahan pengeluaran konsumsi rumah tangga (*personal consumption expenditure/PCE*)

ε = *residual/error term*

- (2). Untuk mengetahui dampak *reserve requirement* terhadap suku bunga kredit (sebagai variabel dependen):

$$y_t = \alpha_0 + \alpha_1 x + \sum_{i=1}^n \gamma c_i + \varepsilon_t$$

dimana:

y_t = suku bunga pinjaman mobil baru (*new auto loan rate*)

x = tingkat *reserve requirement*

c_i = variabel kontrol, terdiri atas: suku bunga The Fed (*federal funds effective rate*), tingkat pengangguran (*unemployment rate*), *dummy variable* berupa kebijakan Basel I dengan nilai 1 sejak diterapkan (1988) dan nilai 0 sebelum tahun 1988, GDP nominal, inflasi (perubahan *Consumer Price Index/CPI*), perubahan pengeluaran konsumsi rumah tangga (*personal consumption expenditure/PCE*) dan *dummy variable* resesi dengan nilai 1 jika kuartal sebelumnya ekonomi mengalami resesi dan nilai 0 jika kuartal sebelumnya tidak terjadi resesi

ε = *residual/error term*

Sejalan dengan penelitian Okamoto (2011) tersebut di atas, dalam penelitian ini akan diteliti pengaruh perubahan *reserve requirement* (GWM) terhadap volume kredit dan suku bunga kredit yang ditawarkan oleh bank umum di Indonesia pada periode Triwulan I/2000 s.d Triwulan III/2011, dengan penyesuaian pada beberapa variabel kontrol yang merupakan variabel bebas (*independent variable*). Alasan penyesuaian dalam penggunaan variabel bebas yang digunakan adalah karena pertimbangan ketersediaan data di Indonesia (misalnya data pengangguran secara triwulanan) serta relevansi variabel bebas tersebut pada perekonomian Indonesia, dengan mengacu pada beberapa hasil penelitian sejenis yang telah dilakukan di Indonesia sebagaimana telah diuraikan pada Bab 2.

4.3 Kerangka Penelitian

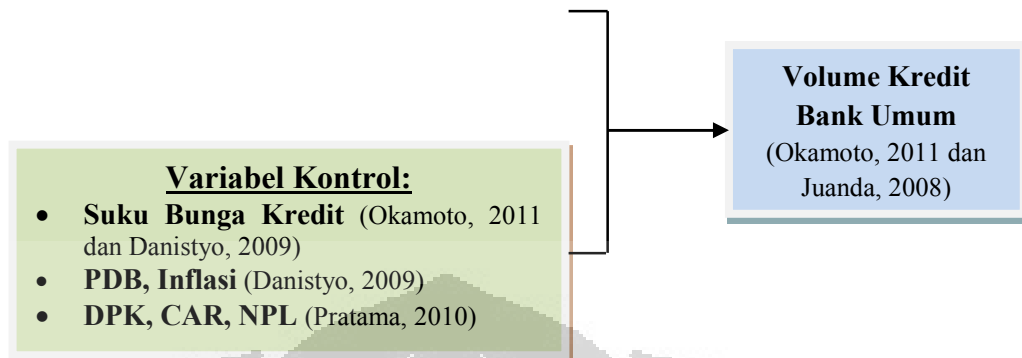
Agar lebih mempermudah dalam memahami permasalahan penelitian, maka hubungan di antara variabel bebas (dependen) dengan variabel terikat (independen) dalam penelitian ini, dapat dilihat pada Gambar 4.1 dan 4.2 di bawah.

- a. Pengaruh perubahan rasio GWM dan Variabel Kontrol terhadap Volume Kredit Bank Umum:

Variabel Utama:

Reserve Requirement (GWM)
(Okamoto, 2011, Gunadi & Harun, 2011 dan Juanda, 2008)

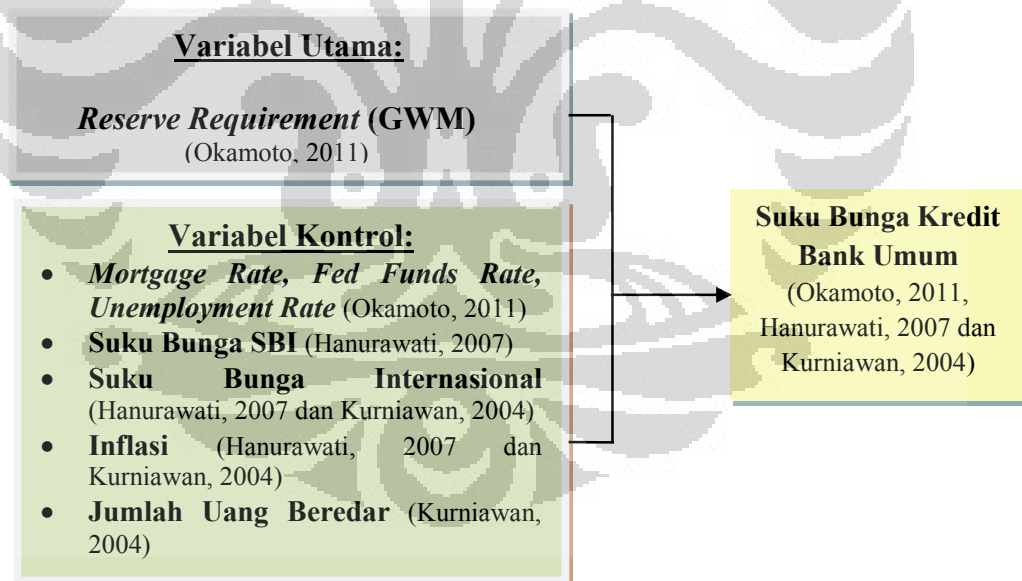
Universitas Indonesia



Gambar 4.2
Kerangka Penelitian: Pengaruh GWM terhadap Volume Kredit

Sumber: Hasil olahan Penulis.

- b. Pengaruh perubahan rasio GWM dan Variabel Kontrol terhadap Suku Bunga Kredit Bank Umum:



Gambar 4.3
Kerangka Penelitian: Pengaruh GWM terhadap Suku Bunga Kredit

Sumber: Hasil olahan Penulis.

4.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan studi literatur yang telah dirangkum dalam Tabel 2.1 dan Tabel 2.2 serta kerangka penelitian tersebut di atas diketahui bahwa:

a. Faktor-faktor yang mempengaruhi volume kredit bank:

- Hasil penelitian di Amerika Serikat, kredit bank dipengaruhi secara positif oleh suku bunga The Fed (*Fed funds effective rate*) dan *unemployment rate* serta dipengaruhi secara negatif oleh *reserve requirement* dan *30-years mortgage rate* (Okamoto, 2011).
- Hasil penelitian di Indonesia, kredit bank dipengaruhi secara positif oleh DPK (Pratama, 2010), PDB (Danistyoy, 2009) dan GWM (Juanda, 2008) serta dipengaruhi secara negatif oleh CAR dan NPL (Pratama, 2010), Suku Bunga Kredit dan Inflasi (Danistyoy, 2009).

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi suku bunga kredit bank umum:

- Hasil penelitian di Amerika Serikat, suku bunga kredit bank dipengaruhi secara positif oleh *reserve requirement*, *30-years mortgage rate*, *Fed funds rate* dan *unemployment rate* (Okamoto, 2011).
- Hasil penelitian di Indonesia, suku bunga kredit bank dipengaruhi secara positif oleh suku bunga internasional, inflasi (Hanurawati, 2007 dan Kurniawan, 2004), Suku Bunga SBI (Hanurawati, 2007) dan jumlah uang beredar (Kurniawan, 2004).

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka hipotesis yang diajukan oleh peneliti untuk dilakukan pengujian sesuai dengan tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

a. Pengaruh perubahan rasio GWM dan Variabel Kontrol terhadap Volume Kredit Bank Umum:

Selain variabel rasio GWM yang merupakan variabel utama dalam penelitian ini, beberapa variabel ekonomi lainnya yang menurut peneliti berpengaruh terhadap volume kredit bank umum adalah:

- Suku Bunga Kredit, dengan mengacu pada hasil penelitian Okamoto (2011) dan Danistyoy (2009) serta teori ekonomi yang menyatakan bahwa

suku bunga kredit merupakan harga dari dana investasi/*loanable funds* (Saunders and Cornett, 2011).

- Dana Pihak Ketiga (DPK), dengan mengacu pada hasil penelitian (Pratama, 2010), dan pertimbangan bahwa sumber dana bank di Indonesia sebagian besar (sekitar 90%) berasal dari DPK (lihat Tabel 3.5).
- Tingkat Inflasi, dengan mengacu pada hasil penelitian Danistyoyo (2009) dan teori ekonomi bahwa semakin tinggi tingkat inflasi maka daya beli masyarakat semakin menurun sehingga akan mengurangi permintaan barang dan jasa yang selanjutnya akan mengurangi permintaan kredit (Latumaerissa, 2011).

Adapun hipotesis penelitiannya (H_0) adalah sebagai berikut:

- $H_{0.1}$: Perubahan rasio GWM tidak memiliki hubungan dan tidak berpengaruh signifikan terhadap volume kredit bank umum.
- $H_{0.2}$: Suku Bunga Kredit tidak memiliki hubungan dan tidak berpengaruh signifikan terhadap volume kredit bank umum.
- $H_{0.3}$: Jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) tidak memiliki hubungan dan tidak berpengaruh signifikan terhadap volume kredit bank umum.
- $H_{0.4}$: Tingkat Inflasi tidak memiliki hubungan dan tidak berpengaruh signifikan terhadap volume kredit bank umum.

b. Pengaruh perubahan rasio GWM dan Variabel Kontrol terhadap Suku Bunga Kredit Bank Umum:

Selain variabel rasio GWM yang merupakan variabel utama dalam penelitian ini, beberapa variabel ekonomi lainnya yang menurut peneliti berpengaruh terhadap suku bunga kredit bank umum adalah:

- Suku Bunga Deposito 1 bulan, dengan pertimbangan bahwa pangsa terbesar Dana Pihak Ketiga (DPK) bank berupa deposito yaitu sebesar 46% (lihat Tabel 3.5) yang suku bunganya paling mahal dibandingkan giro dan tabungan. Selain itu, biaya DPK merupakan komponen terbesar dari Harga Pokok Dana Kredit (HPDK) dan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) bank umum, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.3.
- Suku Bunga Internasional, dengan mengacu pada hasil penelitian Hanurawati (2007) dan Kurniawan (2004) serta pertimbangan bahwa selain dari DPK, sumber pendanaan bank juga dapat berasal dari pinjaman dari bank dan lembaga keuangan internasional dari luar negeri (antara lain *International Finance Corporation/IFC*) yang bunga pinjamannya berpatokan pada LIBOR (*London Interbank Offered Rate*) atau SIBOR (*Singapore Interbank Offered Rate*).
- Tingkat Inflasi, dengan mengacu pada hasil penelitian Hanurawati (2007) dan Kurniawan (2004) serta pertimbangan bahwa sesuai dengan teori ekonomi, pembentukan suku bunga nominal dipengaruhi oleh tingkat inflasi yaitu semakin tinggi tingkat inflasi maka suku bunga nominal juga akan semakin meningkat untuk menjaga suku bunga riil tetap positif (Miles dan Scott, 2005).
- Jumlah Uang Beredar, dengan mengacu pada hasil penelitian Kurniawan (2004) dan teori ekonomi yang menyatakan bahwa semakin banyak jumlah uang beredar akan mendorong suku bunga semakin turun (Miles dan Scott, 2005).

Adapun hipotesis penelitiannya (H_0) adalah sebagai berikut:

$H_{0,1}$: Perubahan rasio GWM tidak memiliki hubungan dan tidak berpengaruh signifikan terhadap suku bunga kredit bank umum.

$H_{0,2}$: Suku Bunga Deposito tidak memiliki hubungan dan tidak berpengaruh signifikan terhadap suku bunga kredit bank umum.

$H_{0,3}$: Suku Bunga Internasional tidak memiliki hubungan dan tidak berpengaruh signifikan terhadap suku bunga kredit bank.

$H_{0,4}$: Tingkat Inflasi tidak memiliki hubungan dan tidak berpengaruh signifikan terhadap suku bunga kredit bank umum.

$H_{0,5}$: Jumlah Uang Beredar tidak memiliki hubungan dan tidak berpengaruh signifikan terhadap suku bunga kredit bank umum.

4.5. Spesifikasi Model Ekonometri

Sesuai dengan metodologi ekonometri sebagaimana tersebut di atas, tahap selanjutnya setelah menetapkan hipotesis penelitian adalah memformulasikannya dalam model ekonometri. Penelitian ini menggunakan model regresi linier berganda klasikal (*the classical multiple linear regression model/CLRM*) dengan metode estimasi berupa *Ordinary Least Square (OLS)*, yang merupakan salah satu metode analisis regresi yang paling populer dan paling unggul. Keunggulan metode estimasi OLS dibandingkan metode lainnya adalah dapat menghasilkan parameter estimasi terbaik yang tidak bias (*best unbiased estimators* atau BUE) yaitu memiliki *variance* minimum (Gujarati dan Porter, 2011).

Selanjutnya, model regresi linier dalam penelitian ini menggunakan bentuk *semi log-linear regression model* yaitu dengan mengubah variabel yang datanya berupa nominal menjadi data logaritma natural, sedangkan variabel yang datanya berupa persentase tidak diubah dalam bentuk logaritma natural. Hal ini dengan pertimbangan bahwa parameter estimasi/koeffisien regresi yang dihasilkan dari setiap variabel bebas yang telah diubah dalam bentuk logaritma natural

merupakan elastisitas (parsial) terhadap variabel terikat (Gujarati and Porter, 2011). Model regresi *semi log-linier* dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Untuk mengukur dampak perubahan rasio GWM dan Variabel Kontrol terhadap Volume Kredit Bank Umum:

$$\ln Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 \ln X_3 + \beta_4 \ln X_4 + \mu_i \quad (4.1)$$

dimana:

\ln = Logaritma natural

Y = Volume kredit bank umum (miliar rupiah)

X_1 = Rasio GWM (%)

X_2 = Rata-rata tertimbang suku bunga kredit (%)

X_3 = DPK

X_4 = IHK

β_0 = Konstanta

$\beta_1 - \beta_4$ = Parameter estimasi/koeffisien regresi

μ_i = *Residual/error term*

b. Untuk mengukur dampak perubahan GWM dan Variabel Kontrol terhadap Suku Bunga Kredit Bank Umum:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 \ln X_4 + \beta_5 \ln X_5 + \mu_i \quad (4.2)$$

dimana:

\ln = Logaritma natural

Y = Rata-rata tertimbang Suku Bunga Kredit (%)

X_1 = Rasio GWM (%)

X_2 = Suku bunga deposito satu bulan (%)

X_3 = Suku bunga LIBOR (%)

X_4 = IHK

X_5 = Jumlah Uang Beredar atau M2 (miliar rupiah)

β_0 = Konstanta

$\beta_1 - \beta_5$ = Parameter estimasi/koeffisien regresi

μ_i = Residual/error term

4.6. Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan periode tiga belas tahun dimulai dari Triwulan I/2000 hingga Triwulan III/2011. Data *time series* dengan skala waktu triwulanan tersebut bersumber dari laporan-laporan yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia (khususnya Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia atau SEKI, Statistik Perbankan Indonesia atau SPI dan Statistik Ekonomi Moneter Indonesia atau SEMI) baik berupa edisi cetak maupun melalui *website* Bank Indonesia (<http://www.bi.go.id/web/id/Statistik/>) serta data yang Peneliti dapatkan langsung dari Bank Indonesia (Direktorat Statistik Ekonomi dan Moneter).

Adapun alasan dipilihnya periode Triwulan I/2000 s.d Triwulan III/2011 adalah ketersediaan data secara lengkap. Selain itu, data perbankan pada periode tersebut di atas mencerminkan kondisi pasar perbankan di Indonesia yang sudah relatif stabil setelah dilaksanakannya restrukturisasi/program penyehatan perbankan sebagai tindak lanjut banyaknya bank yang gagal akibat dampak krisis moneter 1997. Sebagaimana diketahui akibat krisis moneter dan berlanjut menjadi krisis multidimensi pada tahun 1997, Pemerintah telah menerbitkan Obligasi Pemerintah untuk menambah modal perbankan yang tergerus akibat pembentukan pencadangan kerugian kredit macet. Berdasarkan Laporan Tahunan Bank Indonesia Tahun 2000 (BI, 2001), jumlah Obligasi Pemerintah yang telah diterbitkan untuk melaksanakan program rekapitalisasi perbankan adalah senilai Rp 430,30 triliun sebagaimana Tabel 4.1 di bawah ini (Laksito, 2010).

Tabel 4.1. Rincian Nominal Obligasi Pemerintah yang Diterbitkan untuk Program Rekapitalisasi Perbankan Indonesia Per 31 Desember 2000

(dalam Rp triliun, kecuali jumlah bank dalam unit)

Kelompok Bank	Jumlah	Nominal Obligasi			
		Bunga tetap	unga Mengambar	Hedge Bonds	Total
Bank BUMN	4	114,90	131,20	36,8	282,90
Bank Take Over	14	33,90	75,40	0,00	109,30
Bank Rekap	7	18,00	18,90	0,00	36,90
BPD	12	0,40	0,90	0,00	1,30
Total	37	167,20	226,40	36,80	430,40

Sumber : Laporan Tahunan Bank Indonesia Tahun 2000 (BI, 2001)

Sesuai dengan hipotesis penelitian dan model ekonometri tersebut di atas, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Rasio GWM Rupiah bank umum dan LIBOR diperoleh dari Indikator Ekonomi dan Moneter Terkini (tidak dipublikasikan), Bank Indonesia.
2. Data triwulanan berupa: volume kredit Rupiah bank umum, suku bunga deposito Rupiah satu bulan, suku bunga SBI satu bulan, Dana Pihak Ketiga (DPK) Rupiah, IHK, Jumlah Uang Beredar (M2) dan PDB diperoleh dari Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia (SEKI), Bank Indonesia.
3. Data triwulanan rata-rata tertimbang suku bunga kredit Rupiah bank umum (kredit modal kerja, kredit investasi dan kredit konsumsi) diperoleh dari Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia (SEKI), Bank Indonesia. Rata-rata tertimbang suku bunga kredit dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$r_{W_{kredit}} = (Prop. MK \times r_{MK}) + (Prop. Inv \times r_{Inv}) + (Prop. Kons \times r_{Kons}) \quad (4.3)$$

dimana:

$r_{W_{kredit}}$ = Rata-rata tertimbang suku bunga kredit

$Prop. MK$ = Proporsi kredit modal kerja terhadap total kredit

$Prop. Inv$ = Proporsi kredit investasi terhadap total kredit

$Prop. Kons$ = Proporsi kredit konsumsi terhadap total kredit

r_{MK} = Suku bunga modal kerja

r_{Inv} = Suku bunga investasi

r_{Kons} = Suku bunga konsumsi.

4.7 Metode Analisis Data

Meliputi analisis data secara deskriptif serta pengujian terhadap hasil estimasi dari model regresi yang meliputi uji asumsi klasik dan uji statistik.

4.7.1 Analisis Deskriptif

Pada analisis deskriptif dilakukan perhitungan rata-rata (*mean*), median, data maksimum, data minimum, dan standar deviasinya terhadap data yang telah dikumpulkan sebelumnya. Analisis ini dilakukan dengan tujuan untuk melihat kewajaran dan karakteristik dari masing-masing variabel.

4.7.2 Uji Asumsi Klasik

Mengingat bahwa penelitian ini menggunakan model regresi linier klasik (*classical linear regression model/CLRM*) dan metode estimasi *Ordinary Least Square* (OLS) maka agar dapat memperoleh parameter estimasi yang BLUE (*Best Linear Unbiased Estimators*), terlebih dahulu perlu dilakukan uji asumsi klasik terhadap hasil estimasi dari model regresi tersebut (Gujarati dan Porter, 2011), yang meliputi:

a. Uji Asumsi Normalitas

Uji ini untuk mengetahui apakah dalam suatu model regresi, *residual/error term* memiliki distribusi normal atau tidak. Pengujian normalitas ini penting karena uji *t* dan uji *F* mengasumsikan bahwa nilai *residual/error term* mengikuti distribusi normal. Pengujian normalitas dapat dilakukan dengan menggunakan analisis grafik (*normal probability plot* atau *P-P plot*) atau dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Dalam uji Kolmogorov-Smirnov, hipotesis yang diuji adalah:

H_0 : Sampel berasal dari populasi berdistribusi normal

H_1 : Sampel tidak berasal dari populasi berdistribusi normal.

Dengan demikian, normalitas dipenuhi jika hasil uji tidak signifikan untuk suatu taraf signifikansi (α) tertentu (Biasanya $\alpha = 0.05$ atau 0.01). Sebaliknya, jika hasil uji signifikan maka normalitas tidak terpenuhi. Cara mengetahui

signifikan atau tidak signifikan hasil uji normalitas adalah dengan memperhatikan bilangan pada kolom signifikansi (Sig.) pada hasil uji dengan *software* SPSS (Suliyanto, 2011). Untuk menetapkan kenormalan, kriteria yang berlaku adalah sebagai berikut.

- Tetapkan taraf signifikansi uji misalnya $\alpha = 0.05$.
- Bandingkan p dengan taraf signifikansi yang diperoleh.
- Jika signifikansi yang diperoleh $> \alpha$, maka sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal.
- Jika signifikansi yang diperoleh $< \alpha$, maka sampel bukan berasal dari populasi yang berdistribusi normal.

b. Uji Asumsi Autokorelasi

Uji ini untuk mengetahui apakah dalam suatu model regresi terdapat korelasi antara residual pada periode tertentu dengan residual pada periode sebelumnya. Jika berdasarkan pengujian terdapat korelasi, maka telah terjadi problem autokorelasi. Model regresi yang baik harus bebas dari problem autokorelasi. Untuk mendeteksi gejala problem autokorelasi, dapat digunakan uji Durbin-Watson (*DW test*).

$$d = \frac{\sum_{t=2}^n (e_t - e_{t-1})^2}{\sum_{t=1}^n e_t^2} \quad (4.4)$$

Nilai d berkisar antara 0 dan 4, yaitu $0 \leq d \leq 4$. Kesimpulan ada atau tidaknya autokorelasi dapat diketahui dengan cara sebagai berikut:

- Tidak terdapat autokorelasi jika nilai d berkisar antara $d_U < d < 4 - d_U$.
- Terdapat autokorelasi negatif jika nilai d berkisar antara $4 - d_L < d < 4$.
- Terdapat autokorelasi positif jika nilai $d < d_L$.
- Tidak ada keputusan jika $d_L \leq d \leq d_U$ atau $4 - d_U \leq d < 4 - d_L$.

c. Uji Asumsi Heteroskedastisitas

Uji ini untuk mengetahui apakah dalam model regresi terdapat ketidaksamaan *variance* residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* residual bersifat tetap maka disebut homoskedastisitas, dan jika *variance*-nya berbeda maka terjadi problem heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas, dapat dilakukan melalui pengamatan terhadap *scatter plot* (nilai prediksi dependen ZPRED dengan residual SRESID) melalui *software* SPSS maupun melalui uji Rank Spearman (Suliyanto, 2011). Langkah-langkah uji Rank Spearman:

- Mengkorelasikan semua variabel bebas terhadap nilai mutlak residualnya menggunakan korelasi Rank Spearman. Jika terdapat korelasi variabel bebas yang signifikan positif dengan nilai residualnya maka dalam model regresi yang dibentuk terdapat masalah heteroskedastisitas. Jika model regresi yang kita uji memiliki dua variabel bebas (X_1 dan X_2), maka persamaan yang digunakan untuk uji Rank Spearman adalah sebagai berikut:

$$\rho = 1 - \frac{6\sum d^2}{n(n^2-1)} \quad (4.5)$$

dimana:

ρ = koefisien korelasi Rank Spearman

ρ = konstanta

$\sum d^2$ = kuadrat selisih antar rangking dua variabel yaitu rangking selisih nilai residual mutlak dan variabel bebas.

n = jumlah pengamatan.

- Untuk menguji apakah koefisien korelasi Rank Spearman signifikan atau tidak, maka digunakan uji t . Untuk menghitung nilai t hitung digunakan rumus sebagai berikut:

$$t = \frac{\rho_{xy} \sqrt{n-2}}{\sqrt{1-\rho_{xy}^2}} \quad (4.6)$$

$$\sqrt{1-\rho_{xy}^2}$$

dimana:

ρ_{xy} = koefisien korelasi Rank Spearman

n = jumlah pengamatan.

- Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ dengan derajat bebas $df = n - k$, maka persamaan regresi yang terbentuk mengandung gejala heteroskedastisitas. Demikian pula sebaliknya.

d. Uji Asumsi Multikolinieritas

Uji ini dilakukan untuk menentukan apakah dalam suatu model regresi linier berganda terdapat korelasi antara variabel bebas. Jika terjadi korelasi, maka terjadi masalah multikolinieritas. Dalam model regresi yang baik seharusnya tidak terdapat korelasi di antara variabel bebas. Untuk mendeteksi apakah terjadi problem multikolinieritas, dapat dilakukan dengan mengamati nilai *tolerance* dan lawannya *variance inflation factor* (VIF) dengan *software* SPSS (Suliyanto, 2011). Deteksi adanya multikolinieritas dapat diketahui dengan nilai dari masing-masing variabel dengan kriteria:

- Jika *Variance Inflation Factor* (VIF) > 10 , maka terdapat multikolinieritas.
- Jika *Variance Inflation Factor* (VIF) < 10 , maka tidak terdapat multikolinieritas.

Selain melihat dari nilai VIF hasil pengujian dalam melihat dari nilai toleran (*tolerance*). Apabila nilai toleran dibawah 1 atau < 1 , model regresi tersebut tidak memiliki masalah multikolinieritas. Tetapi bila nilai toleran berada di atas nilai 1 atau > 1 , model regresi tersebut dinyatakan memiliki masalah multikolinieritas.

4.7.3 Uji Statistik

Uji statistik dilakukan untuk menilai signifikansi secara statistik atas pengaruh variabel bebas (*independent variable*) terhadap variabel terikat (*dependent variable*) dari model regresi, meliputi:

a. Koefisien Determinasi (*adjusted R²*)

Merupakan koefisien yang menunjukkan sejauh mana kemampuan variabel bebas secara bersama-sama menjelaskan variasi variabel terikat (*the Overall Fit of the Regression Line*). Koefisien determinasi *adjusted R²* memiliki nilai antara 0 dan 1 (100%) di mana nilai *adjusted R²* yang kecil menunjukkan bahwa kemampuan variabel bebas menjelaskan variasi variabel terikat sangat terbatas, sedangkan nilai *adjusted R²* yang mendekati 1 (100%) memiliki arti yang sebaliknya.

b. Uji *F*

Merupakan alat uji lain untuk mengukur signifikansi dari garis regresi (*the Overall Fit of the Regression Line*) atau dengan kata lain untuk menunjukkan apakah semua variabel bebas/independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat/dependen. Uji *F* digunakan untuk mengatasi kelemahan penggunaan *R²*¹. Semakin tinggi nilai *F-statistic* maka hasilnya semakin baik. Hipotesisnya dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$H_0 : \beta_i = 0$$

Artinya, tidak ada pengaruh yang signifikan secara bersama-sama dari seluruh variabel independen terhadap variabel dependen.

$$H_1 : \text{tidak semua } \beta_i = 0$$

Artinya terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama dari seluruh variabel independen terhadap variabel dependen.

¹ Pada data *time-series* nilai *R²* biasanya tinggi sedangkan pada data *cross section* biasanya rendah (Gujarati and Porter, 2011).

Nilai F -hitung dapat dicari dengan rumus :

$$F - \text{hitung} = \frac{R^2 / (k - 1)}{(1 - R^2) / (n - k)} \quad (4.7)$$

dimana :

n = jumlah sample

k = jumlah variabel

jika F -hitung $>$ F -tabel ($\alpha, n - k - 1$) maka H_0 ditolak

jika F -hitung $<$ F -tabel ($\alpha, n - k - 1$) maka H_0 diterima.

c. Uji t

Uji t digunakan untuk menguji signifikansi atas masing-masing parameter/koeffisien estimasi dari variabel bebas (*independent variable*).

Secara *rule of thumb* jika nilai t (secara absolut) dari model regresi lebih besar dari dua dapat disimpulkan bahwa dengan tingkat kepercayaan (*confidence level*) 95% maka koefisien estimasi secara statistik berbeda dari nol. Namun untuk lebih memastikannya, nilai t dari masing-masing variabel bebas perlu dibandingkan dengan nilai t tabel pada tingkat keyakinan (*confidence level*) tertentu. Adapun hipotesisnya dirumuskan sebagai berikut:

$$H_0 : \beta_i = 0$$

Artinya, tidak ada pengaruh yang signifikan dari variabel bebas terhadap variabel terikat .

$$H_1 : \beta_i \neq 0$$

Artinya, terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen. Jika tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05 atau 5% maka hipotesis yang diajukan dapat diterima. Nilai t -hitung dapat dicari dengan rumus :

(4.8)

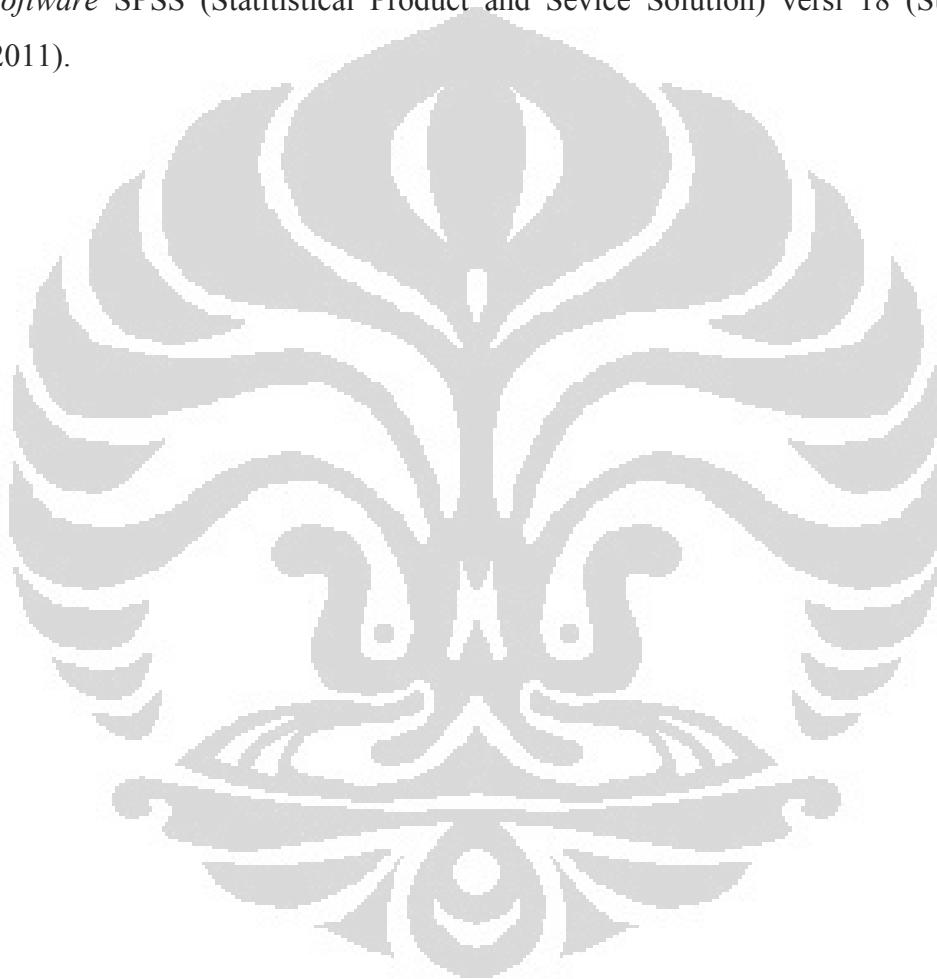
Universitas Indonesia

$$t - \text{hitung} = \frac{\text{Koefisien regresi } (\beta_i)}{\text{Standar deviasi } (\beta_i)}$$

jika $t - \text{hitung} > t - \text{tabel } (\alpha, n - k - 1)$ maka H_0 ditolak.

jika $t - \text{hitung} < t - \text{tabel } (\alpha, n - k - 1)$ maka H_0 diterima.

Pengujian statistik dan pengujian hipotesis dilakukan dengan bantuan *software* SPSS (Statistical Product and Service Solution) versi 18 (Suliyanto, 2011).



BAB 5
ANALISIS DAN PEMBAHASAN

5.1 Pengaruh Perubahan rasio GWM Rupiah dan Variabel Kontrol terhadap Volume Kredit Rupiah Bank Umum

5.1.1 Analisis Deskriptif

Berdasarkan hasil olah statistik deskriptif dengan program SPSS versi 18, diperoleh gambaran secara statistik dari data variabel terikat dan variabel bebas yang digunakan untuk memperoleh persamaan regresi pengaruh rasio GWM rupiah dan variabel kontrol lainnya terhadap volume kredit perbankan dalam periode penelitian (Tw.I/2000 s.d Tw. III/2011), sebagaimana terlihat pada Tabel 5.1.

**Tabel 5.1 Statistik Deskriptif
Pengaruh Rasio GWM Rupiah dan Variabel Lainnya
Terhadap Volume Kredit**

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Stand. Deviation
Ln Volume Kredit	47	11,78	14,37	13,12	0,77980
Rasio GWM (%)	47	4,87	11,37	7,52	2,44639
Bunga Kredit (%)	47	12,87	19,34	15,89	1,89879
Ln DPK	47	13,15	14,57	13,76	0,41759
Ln IHK	47	4,36	5,24	4,84	0,26510

Sumber: *Output SPSS* versi 18.

Dari Tabel 5.1 terlihat bahwa nilai maksimum volume kredit rupiah bank umum dalam logaritma natural adalah 14,37 atau secara nominal sebesar Rp1.737 triliun yang terjadi pada Tw.III/2011, sedangkan secara rata-rata sebesar 13,12 (log. natural) atau Rp656,47 triliun (nominal). Volume kredit rupiah bank umum dalam periode penelitian terus mengalami peningkatan yang relatif tinggi, khususnya mulai akhir tahun 2005 dimana volume kredit di atas Rp1.000 triliun. Hal ini karena didukung kondisi perekonomian Indonesia yang relatif bagus dengan rata-rata

pertumbuhan ekonomi dalam lima tahun terakhir (2006-2010) sebesar 5,7 persen (Bank Indonesia, 2011b, Laporan Perekonomian Indonesia Tahun 2010). Sementara itu volume kredit paling rendah dalam logaritma natural adalah sebesar 11,78 atau (Rp130,875 triliun) yang terjadi pada Tw. I/2000 karena pada saat tersebut perekonomian Indonesia sedang dalam tahap pemulihan setelah terjadinya krisis ekonomi 1997/1998.

Suku bunga kredit rupiah pada periode penelitian yang paling tinggi adalah sebesar 19,24 persen yang terjadi pada Tw.I/2002. Hal ini disebabkan pada periode tersebut suku bunga deposito, yang merupakan sumber utama Dana Pihak Ketiga (DPK) bank umum, tergolong tinggi dibanding periode-periode lainnya yaitu sebesar 15,64 persen. Sementara itu, suku bunga kredit terendah sebesar 12,87 persen terjadi pada Tw. III/2011 seiring dengan adanya penurunan suku bunga deposito rupiah bank umum dengan jangka waktu satu bulan, yang pada periode tersebut sebesar 6,81 persen. Secara rata-rata, suku bunga kredit rupiah bank umum dalam periode penelitian adalah sebesar 15,89 persen.

Rasio GWM rupiah dalam periode penelitian paling tinggi sebesar 11,37 persen, yang terjadi pada Tw. I/2011 seiring dengan penerapan ketentuan GWM yang baru (PBI No.12/19/PBI/2010 tanggal 4 Oktober 2010) yang mewajibkan bank untuk menyediakan GWM berupa GWM Utama atau Primer sebesar 8 persen, GWM Sekunder (berupa surat-surat berharga) sebesar 2,50 persen dan GWM LDR yang dihitung berdasarkan selisih antara LDR target yang ditetapkan Bank Indonesia (78 persen -100 persen) dengan LDR bank dikalikan angka insentif dan disinsentif. Sementara itu, rasio GWM terendah sebesar 4,87 persen terjadi pada Tw.IV/2001. Rasio GWM rupiah yang cukup tinggi terjadi pada periode Tw.III/2005 - Tw.I/2008 dan periode Tw.IV/2010 - Tw.III/2011 yang berada di atas 10 persen. Adapun rata-rata rasio GWM rupiah selama periode penelitian adalah sebesar 7,53 persen.

Dana Pihak Ketiga (DPK) dalam bentuk logaritma natural paling tinggi sebesar 14,57 atau secara nominal sebesar Rp2.129 triliun, yang terjadi pada Tw. III/2011. Adapun DPK terendah dalam bentuk logaritma natural sebesar 13,15 atau secara nominal sebesar Rp512,74 triliun yaitu pada Tw.I/2000 karena pada saat tersebut perekonomian Indonesia sedang dalam tahap pemulihan setelah terjadinya krisis ekonomi 1997/1998. Secara rata-rata, DPK dalam periode penelitian adalah sebesar 13,76 (log. natural) atau Rp1.036 triliun (nominal).

Sementara itu, Indeks Harga Konsumen (IHK) terendah terjadi pada Tw. I/2000, yaitu dalam bentuk logaritma natural sebesar 4,36 dan secara nominal sebesar 77,96. Hal ini disebabkan pada periode tersebut tingkat inflasi tergolong sangat rendah (-1,10 persen) dan merupakan awal perhitungan IHK dengan tahun dasar yang baru (2000). Secara rata-rata, IHK dalam periode penelitian adalah sebesar 5,24 (log. natural) atau 131,61 (Indeks).

5.1.2 Uji Model Regresi Linier Berganda

5.1.2.1 Persamaan Regresi

Dengan menggunakan program SPSS versi 18, diperoleh hasil regresi sebagaimana terlihat pada Tabel 5.2 di bawah ini.

Tabel 5.2. Hasil Uji Hipotesis Pengaruh Rasio GWM dan Variabel Lainnya terhadap Volume Kredit

Model		Coefficients ^a			t	Sig.
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-6.022	1.073		-5.610	.000
	RasioGWM	.016	.008	.051	1.943	.059
	BungaKredit	-.042	.014	-.103	-2.923	.006
	LnDPK	1.126	.093	.603	12.046	.000
	LnIHK	.865	.132	.294	6.532	.000

Sumber: *Output* SPSS versi 18.

Dari hasil regresi tersebut, dengan menggunakan persamaan 4.1 pada Bab 4, diperoleh persamaan estimasi atas model regresi linier berganda sebagai berikut:

$$\ln Y = -6.022 + 0.016X_1 - 0.042X_2 + 1.126\ln X_3 + 0.865 \ln X_4 \quad (5.1)$$

$$t \quad (-5.610) \quad (1.943) \quad (-2.923) \quad (12.046) \quad (6.532)$$

$$\text{Adjusted } R^2 = 0.977 \quad F = 494.044$$

dimana:

\ln = logaritma natural

Y = volume kredit rupiah bank umum (miliar rupiah)

X_1 = Rasio GWM rupiah (%)

X_2 = Rata-rata tertimbang suku bunga kredit rupiah bank umum (%)

X_3 = DPK rupiah bank umum

X_4 = IHK

Berdasarkan persamaan regresi tersebut di atas dapat, dapat diestimasi sebagai berikut:

- Setiap peningkatan satu persen rasio GWM rupiah akan menyebabkan volume kredit rupiah bank umum meningkat sebesar 0,016 persen.
- Setiap peningkatan satu persen rata-rata tertimbang suku bunga kredit rupiah bank umum akan menyebabkan volume kredit rupiah bank umum turun sebesar 0,042 persen.
- Setiap peningkatan satu persen DPK rupiah bank umum akan menyebabkan volume kredit rupiah bank umum meningkat sebesar 1,126 persen.
- Setiap peningkatan satu persen IHK akan menyebabkan volume kredit rupiah bank umum meningkat sebesar 0,865 persen.

5.1.2.2 Koefisien Determinasi

Berdasarkan hasil estimasi sebagaimana terlihat pada Tabel 5.3, diperoleh nilai koefisien determinasi yang disesuaikan (*adjusted R²*) sebesar 0,982 yang berarti

98,2 persen variasi dari variabel terikat dapat diterangkan oleh semua variabel bebas, sedangkan sisanya sebesar 1,8 persen diterangkan oleh variabel lain yang tidak diajukan dalam penelitian ini.

**Tabel 5.3 Koefisien Determinasi
Pengaruh Rasio GWM dan Variabel Lainnya
terhadap Volume Kredit**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.992 ^a	.984	.982	.10465

Sumber: *Output SPSS* versi 18.

Adapun dari Tabel 5.4, terlihat bahwa nilai F hitung sebesar 628,104 dengan nilai Sig .000 yang lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel bebas secara bersama-sama dapat menerangkan variabel terikat.

**Tabel 5.4. Hasil Uji F
Pengaruh GWM terhadap Volume Kredit**

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	27.512	4	6.878	628.104	.000 ^a
	Residual	.460	42	.011		
	Total	27.972	46			

Sumber: *Output SPSS* versi 18.

5.1.3 Hasil Uji Hipotesis

Berdasarkan hasil estimasi pada Tabel 5.2 dan persamaan 5.1 tersebut di atas, dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

a. Pengaruh rasio GWM rupiah terhadap Volume Kredit rupiah bank umum:

Dari hasil uji hipotesis sebagaimana terlihat pada Tabel 5.6, diperoleh nilai t hitung sebesar 1,943 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,59 (*one tailed test*) atau 0,295 (*two tailed test*). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa $H_{0,1}$

ditolak, yang berarti bahwa ada pengaruh positif variabel X_1 (rasio GWM rupiah) terhadap Y (volume kredit rupiah bank umum).

Pengaruh rasio GWM rupiah terhadap volume kredit rupiah bank umum relatif kecil yang ditunjukkan oleh nilai koefisien estimasi yang sebesar 0,016. Setiap peningkatan satu persen rasio GWM rupiah bank umum hanya akan menyebabkan volume kredit rupiah bank umum meningkat sebesar 0,016 persen.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Okamoto (2011) di Amerika Serikat bahwa tingkat *reserve requirement* berpengaruh negatif terhadap volume kredit bank. Namun, hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Gunadi and Harun (2011) bahwa dalam kondisi *Loan to Deposit* (LDR) yang rendah maka peningkatan GWM akan dapat meningkatkan LDR. Dari data LDR selama periode pengamatan (Tw.I/2000 - Tw.III/2011) diketahui bahwa rata-rata LDR bank umum di Indonesia adalah sebesar 56,18 persen atau relatif rendah dibandingkan target LDR yang ditetapkan Bank Indonesia saat ini sebesar 78 persen - 100 persen. Meskipun dalam enam tahun terakhir (2006-September 2011) rata-rata LDR sudah meningkat menjadi 87,14 persen (lihat Tabel 3.10).

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Juanda (2008) bahwa dalam jangka panjang kebijakan GWM berpengaruh positif terhadap penyaluran kredit dan DPK. Hal ini terjadi karena peningkatan GWM oleh Bank Sentral telah meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kondisi bank sehingga dalam jangka panjang terjadi peningkatan jumlah DPK yang dihimpun dari masyarakat dan juga peningkatan penyaluran kredit dari bank ke masyarakat.

b. Pengaruh Suku Bunga Kredit rupiah terhadap Volume Kredit rupiah bank umum:

Dari hasil uji hipotesis sebagaimana terlihat pada Tabel 5.6, diperoleh nilai t hitung sebesar -2,923 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,006 (*one tailed test*). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa $H_{0,2}$ ditolak, yang berarti

ada pengaruh negatif variabel X_2 (suku bunga kredit rupiah bank umum) terhadap Y (volume kredit rupiah bank umum).

Pengaruh suku bunga kredit terhadap volume kredit rupiah bank umum relatif kecil yang ditunjukkan oleh nilai koefisien estimasi yang sebesar -0,042. Setiap peningkatan satu persen suku bunga kredit rupiah bank umum hanya akan menyebabkan volume kredit rupiah bank umum turun sebesar 0,042 persen. Hal ini disebabkan meskipun suku bunga kredit rupiah bank umum di Indonesia dalam periode penelitian tergolong tinggi (rata-rata 15,89 persen) namun kredit dari bank masih menjadi andalan masyarakat untuk membiayai kebutuhannya (investasi, modal kerja dan konsumsi,) dibandingkan sumber pembiayaan lainnya misalnya melalui penerbitan saham (*rights issue*) dan obligasi di pasar modal.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Okamoto (2011) pada perekonomian Amerika Serikat dan Danisty (2009) pada perekonomian Indonesia.

c. Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) rupiah terhadap Volume Kredit rupiah bank umum:

Dari hasil uji hipotesis sebagaimana terlihat pada Tabel 5.6, diperoleh nilai t hitung sebesar 12,026 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 (*one tailed test*). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa $H_{0,3}$ ditolak, yang berarti ada pengaruh positif variabel X_3 (DPK rupiah bank umum) terhadap Y (volume kredit rupiah bank umum).

Pengaruh DPK rupiah bank umum terhadap volume kredit rupiah bank umum tergolong besar yang ditunjukkan oleh nilai koefisien estimasi yang sebesar 1,126. Setiap peningkatan satu persen DPK rupiah bank umum akan menyebabkan volume kredit rupiah bank umum meningkat sebesar 1,126 persen. Hal ini disebabkan DPK masih menjadi sumber utama dana bank umum dalam membiayai kredit yaitu mencapai sekitar 90 persen (Bank Indonesia, *Statistik Perbankan Indonesia*, Vol. 9 No.10, September, 2011).

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Pratama (2010).

d. Pengaruh Indeks Harga Konsumen (IHK) terhadap Volume Kredit rupiah bank umum:

Dari hasil uji hipotesis sebagaimana terlihat pada Tabel 5.6, diperoleh nilai t hitung sebesar 6,532 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 (*one tailed test*). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa $H_{0.4}$ ditolak, yang berarti ada pengaruh positif variabel X_4 (IHK) terhadap Y (volume kredit rupiah bank umum).

Pengaruh IHK terhadap volume kredit rupiah bank umum relatif kecil yang ditunjukkan oleh nilai koefisien estimasi sebesar 0,865. Setiap peningkatan satu persen IHK hanya akan menyebabkan volume kredit rupiah bank umum meningkat sebesar 0,865 persen.

Hubungan yang positif antara IHK dan volume kredit disebabkan dalam batas tertentu kenaikan tingkat inflasi mencerminkan adanya peningkatan kegiatan ekonomi, sehingga akan mendorong permintaan kredit. Namun apabila inflasi tergolong tinggi (30 s.d 100 persen) akan menyebabkan penurunan daya beli masyarakat, yang pada akhirnya dapat menurunkan permintaan kredit. Pada periode penelitian, rata-rata tingkat inflasi Indonesia adalah sebesar 8,07 persen sehingga masih tergolong dalam inflasi ringan karena di bawah 10 persen (Latumaerissa, 2011).

Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian Danistyoy (2009) yang menyimpulkan bahwa terdapat hubungan yang negatif antara inflasi dengan volume kredit. Perbedaan tersebut bisa disebabkan oleh perbedaan metode estimasi yang digunakan, dimana dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode *Ordinary Least Square* (OLS) sedangkan Danistyoy menggunakan metode *Two Stage Least Square* (2SLS). Kemungkinan lainnya adalah karena perbedaan periode penelitian dimana periode penelitian ini adalah Tw.I/2000 - Tw.III/2011 sedangkan periode penelitian Danistyoy adalah Tw.I/2005 - Tw. IV/2008.

5.2 Pengaruh perubahan rasio GWM dan Variabel Kontrol terhadap Suku Bunga Kredit Bank Umum

5.2.1 Analisis Deskriptif

Berdasarkan hasil olah statistik deskriptif dengan program SPSS, diperoleh gambaran statistik dari data variabel terikat dan variabel bebas yang digunakan untuk memperoleh persamaan regresi pengaruh rasio GWM dan variabel kontrol lainnya terhadap suku bunga kredit rupiah bank umum dalam periode penelitian (Tw.I/2000 s.d Tw. III/2011), sebagaimana terlihat pada Tabel 5.5.

Mengingat bahwa penjelasan mengenai sebagian variabel pada Tabel 5.5 telah diuraikan dalam sub bab 5.1, dalam sub ini hanya akan dijelaskan mengenai suku bunga bunga deposito satu bulan, LIBOR dan jumlah uang beredar (M2).

**Tabel 5.5 Statistik Deskriptif
Pengaruh Rasio GWM dan Variabel Lainnya
terhadap Suku Bunga Kredit**

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Stand. Deviation
Bunga Kredit	47	12,87	19,34	15,8951	1,89879
Rasio GWM	47	4,87	11,37	7,5262	2,44639
Bunga Deposito	47	5,86	16,07	9,4209	2,98086
LIBOR	47	0,19	6,64	2,6789	2,12678
Ln IHK	47	4,36	5,24	4,8464	0,2651
Ln M2	47	13,39	14,79	14,0421	0,41741

Sumber: *Output SPSS* versi 18.

Suku bunga deposito satu bulan bank umum selama periode penelitian paling tinggi sebesar 16,07 persen, yang terjadi pada Tw.IV/2001. Hal ini disebabkan pada periode tersebut perekonomian Indonesia dalam kondisi yang kurang bagus ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang relatif rendah (3,3 persen) dan laju inflasi IHK yang cukup tinggi (12,55 persen) sebagai dampak depresiasi mata uang Rupiah (Bank Indonesia 2002, Laporan Perekonomian Indonesia Tahun 2001).

Suku bunga LIBOR (*London Interbank Offered Rate*), tertinggi sebesar 6,64 persen, yang terjadi pada Tw. II/2000. Sedangkan LIBOR terendah sebesar 0,19 persen terjadi pada Tw. II/2011 akibat dari krisis finansial yang masih melanda

negara-negara maju (A.S dan Eropa) yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi yang rendah serta penerapan kebijakan *quantitative easing* (Bank Indonesia 2011b, Laporan Perekonomian Indonesia Tahun 2010).

Adapun jumlah uang beredar dalam arti luas (M2), paling tinggi sebesar 14,79 (log. natural) atau sebesar Rp2.643 triliun (nominal) yang terjadi pada Tw. III/2011 seiring dengan kondisi perekonomian Indonesia yang relatif baik. M2 terendah adalah sebesar 13,39 (log. natural) atau RpRp656 triliun (nominal) yang terjadi pada Tw.I/2000 disebabkan kondisi perekonomian Indonesia pada saat tersebut yang belum sepenuhnya pulih dari krisis ekonomi.

5.2.2 Uji Model Regresi Linier Berganda

5.2.2.1 Persamaan Regresi

Dengan menggunakan program SPSS versi 18, diperoleh hasil regresi sebagaimana terlihat pada Tabel 5.6 di bawah ini.

Tabel 5.6. Hasil Uji Hipotesis Pengaruh Rasio GWM dan Variabel Lainnya terhadap Suku Bunga Kredit

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	49.706	5.547		8.960	.000
	Rasio GWM	-.045	.055	-.058	-.811	.422
	Bunga Deposito	.396	.034	.622	11.735	.000
	LIBOR	-.145	.059	-.162	-2.476	.018
	ln IHK	1.790	.743	.250	2.409	.021
	ln M2	-3.240	.556	-.712	-5.826	.000

Sumber: *Output* SPSS versi 18.

Dari hasil regresi tersebut, dengan menggunakan persamaan 4.2 pada Bab 4, diperoleh persamaan estimasi atas model regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 49.706 - 0.045X_1 + 0.396X_2 - 0.145X_3 + 1.790 \ln X_4 - 3.240 \ln X_5 \quad (5.2)$$

$$t \quad (8.960) \quad (-0.811) \quad (11.735) \quad (-2.476) \quad (2.409) \quad (-5.826)$$

$$Adjusted R^2 = 0.921 \quad F = 107.857$$

dimana:

ln = logaritma natural

Y = rata-rata tertimbang suku bunga kredit rupiah bank umum (%)

X_1 = rasio GWM rupiah (%)

X_2 = suku bunga deposito rupiah bank umum berjangka waktu 1 bulan (%)

X_3 = LIBOR

X_4 = IHK

X_5 = Jumlah Uang Beredar (M2).

Berdasarkan persamaan regresi tersebut di atas dapat, dapat diestimasi sebagai berikut:

- a. Setiap peningkatan satu persen suku bunga deposito rupiah berjangka waktu satu bulan bank umum akan menyebabkan rata-rata tertimbang suku bunga kredit rupiah bank umum meningkat sebesar 0,396 persen.
- b. Setiap peningkatan satu persen LIBOR akan menyebabkan rata-rata tertimbang suku bunga kredit rupiah bank umum menurun sebesar 0,145 persen.
- c. Setiap peningkatan satu persen IHK akan menyebabkan rata-rata tertimbang suku bunga kredit rupiah bank umum meningkat sebesar 1,790 persen.
- d. Setiap peningkatan satu persen jumlah uang beredar (M2) akan menyebabkan rata-rata tertimbang suku bunga kredit rupiah bank umum menurun sebesar 3,240 persen.

Adapun variabel rasio GWM rupiah meskipun berkorelasi secara negatif terhadap rata-rata tertimbang suku bunga kredit rupiah bank umum, namun tidak signifikan secara statistik sehingga koefisien regresi yang dihasilkan tidak dapat digunakan untuk keperluan estimasi.

5.2.2.2 Koefisien Determinasi

Berdasarkan hasil estimasi sebagaimana terlihat pada Tabel 5.7, diperoleh nilai koefisien determinasi yang disesuaikan (*adjusted R²*) yaitu sebesar 0,921 yang berarti 92,1 persen variasi dari variabel terikat dapat diterangkan oleh semua variabel

bebas, sedangkan sisanya sebesar 7,9 persen diterangkan oleh variabel lain yang tidak diajukan dalam penelitian ini.

**Tabel 5.7 Koefisien Determinasi^b
Pengaruh Rasio GWM dan Variabel Lainnya
terhadap Suku Bunga Kredit**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.964 ^a	.929	.921	.53461

Sumber: *Output* SPSS versi 18.

Adapun dari Tabel 5.8, terlihat bahwa nilai F hitung sebesar 107,857 dengan nilai Sig 0.000 yang lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel bebas secara bersama-sama dapat menerangkan variabel terikat.

**Tabel 5.8. Hasil Uji F
Pengaruh GWM Rupiah dan Variabel Lainnya
terhadap Suku Bunga Kredit**

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	154.131	5	30.826	107.857	.000 ^a
	Residual	11.718	41	.286		
	Total	165.849	46			

Sumber: *Output* SPSS versi 18.

5.2.3 Hasil Uji Hipotesis

Berdasarkan hasil regresi pada Tabel 5.6 dan persamaan 5.2 tersebut di atas, dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

a. Pengaruh rasio GWM Rupiah terhadap Rata-rata Tertimbang Suku Bunga Kredit Rupiah Bank Umum:

Dari hasil uji hipotesis sebagaimana terlihat pada Tabel 5.6, diperoleh nilai t hitung sebesar -0,811 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,422. Apabila dilihat

dari nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan $H_{0.1}$ diterima, yang berarti bahwa tidak ada pengaruh variabel X_1 (rasio GWM rupiah) terhadap Y (rata-rata tertimbang suku bunga kredit rupiah bank umum).

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Okamoto (2011) di Amerika Serikat bahwa tingkat *reserve requirement* berpengaruh positif terhadap suku bunga kredit bank.

Hal tersebut kemungkinan disebabkan rata-rata rasio GWM rupiah selama periode penelitian tergolong masih rendah yaitu 7,53 persen, sebagaimana telah dijelaskan dalam analisis deskriptif (Sub Bab 5.1.1). Rasio GWM rupiah mulai tergolong cukup tinggi (di atas 10 persen) sejak periode Tw. I/2011 seiring dengan penerapan ketentuan Bank Indonesia yang baru (PBI No.12/19/PBI/2010 tanggal 4 Oktober 2010) dimana untuk GWM yang dikaitkan dengan LDR, baru diberlakukan sejak Maret 2011.

Selain itu, berdasarkan laporan perhitungan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) atau *prime lending rate* bank pada periode Maret - September 2011 diketahui bahwa biaya GWM (termasuk dalam komponen biaya regulasi) tergolong masih kecil yaitu rata-rata sebesar 0,62 persen dari rata-rata SBDK yang sebesar 11,37 persen (lihat Tabel 2.3).

b. Pengaruh Suku Bunga Deposito Rupiah 1 Bulan terhadap Rata-rata Tertimbang Suku Bunga Kredit Rupiah Bank Umum:

Berdasarkan hasil uji hipotesis sebagaimana terlihat pada Tabel 5.6, diperoleh nilai t hitung sebesar 11,735 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Apabila dilihat dari nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa $H_{0.2}$ ditolak, yang berarti ada hubungan positif antara variabel dependen X_2 (suku bunga deposito rupiah 1 bulan) dengan variabel independen Y (rata-rata tertimbang suku bunga kredit rupiah bank umum).

Pengaruh suku bunga deposito rupiah 1 bulan bank umum terhadap rata-rata tertimbang suku bunga kredit rupiah bank umum relatif kecil yang ditunjukkan oleh nilai koefisien estimasi yang sebesar 0,396. Setiap peningkatan

satu persen suku bunga deposito rupiah bank umum berjangka waktu satu bulan hanya akan menyebabkan rata-rata tertimbang suku bunga kredit rupiah bank umum meningkat sebesar 0,396 persen.

Sebaliknya, jika terjadi penurunan suku bunga deposito rupiah bank umum berjangka waktu satu bulan sebesar satu persen maka hanya akan menyebabkan rata-rata tertimbang suku bunga kredit rupiah bank umum turun sebesar 0,396 persen. Hal ini kemungkinan karena manajemen bank berupaya untuk tetap mempertahankan marjin keuntungan yang relatif tinggi sehingga penurunan suku bunga kredit tidak sebesar penurunan suku bunga deposito.

c. Pengaruh LIBOR terhadap Rata-rata Tertimbang Suku Bunga Kredit Rupiah Bank Umum:

Berdasarkan hasil uji hipotesis sebagaimana terlihat pada Tabel 5.6, diperoleh nilai t hitung sebesar -2,476 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,018. Apabila dilihat dari nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa $H_{0,3}$ ditolak, yang berarti ada hubungan negatif variabel dependen X_3 (LIBOR) terhadap variabel independen Y (rata-rata tertimbang suku bunga kredit rupiah bank umum).

Pengaruh LIBOR terhadap rata-rata tertimbang suku bunga kredit rupiah bank umum relatif kecil yang ditunjukkan oleh nilai koefisien estimasi yang sebesar -0,145. Setiap penurunan satu persen LIBOR hanya akan menyebabkan suku bunga kredit rupiah bank umum meningkat sebesar 0,145 persen.

Hasil uji tersebut dapat dijelaskan bahwa kelompok bank umum di Indonesia masih mengandalkan DPK sebagai sumber pendanaan utama untuk membiayai kredit yaitu mencapai sekitar 90 persen (lihat Sub Bab 5.1.3 butir c). Di lain pihak porsi pinjaman jangka panjang yang diterima dari bank dan atau lembaga keuangan lain termasuk dari luar negeri relatif kecil yaitu sekitar 1 persen (Bank Indonesia, *Statistik Perbankan Indonesia*, Vol. 9 No.10, September, 2011), sehingga suku bunga kredit bank umum di Indonesia kurang sensitif terhadap suku bunga internasional misalnya LIBOR. Disamping itu, sebagaimana telah diuraikan

pada analisis deskriptif (Sub Bab 5.2), akhir-akhir ini suku bunga LIBOR menurun tajam menjadi di bawah satu persen sebagai dampak krisis finansial di negara-negara maju, sementara suku bunga kredit rupiah bank umum masih relatif tinggi (minimum 12,87 persen).

d. Pengaruh Indeks Harga Konsumen (IHK) terhadap Rata-rata Tertimbang Suku Bunga Kredit Rupiah Bank Umum:

Dari hasil uji hipotesis sebagaimana terlihat pada Tabel 5.6, diperoleh nilai t hitung sebesar 2,409 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,021. Apabila dilihat dari nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa $H_{0,4}$ ditolak, yang berarti ada hubungan positif antara variabel dependen X_4 (IHK) terhadap variabel independen Y (rata-rata tertimbang suku bunga kredit rupiah bank umum).

Pengaruh IHK terhadap rata-rata tertimbang suku bunga kredit rupiah bank umum relatif besar yang ditunjukkan oleh nilai koefisien estimasi yang sebesar 1,790. Setiap peningkatan satu persen IHK akan menyebabkan suku bunga kredit rupiah bank umum meningkat sebesar 1,790 persen. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan (2004).

Hasil uji tersebut dapat dijelaskan bahwa suku bunga kredit rupiah bank umum sangat dipengaruhi oleh tingkat inflasi (IHK). Bank akan menetapkan suku bunga kredit yang ditawarkan kepada nasabah debitur secara riil tetap positif (di atas laju inflasi) untuk menjaga imbal hasil yang diterima (*return*) bank tidak tergerus inflasi.

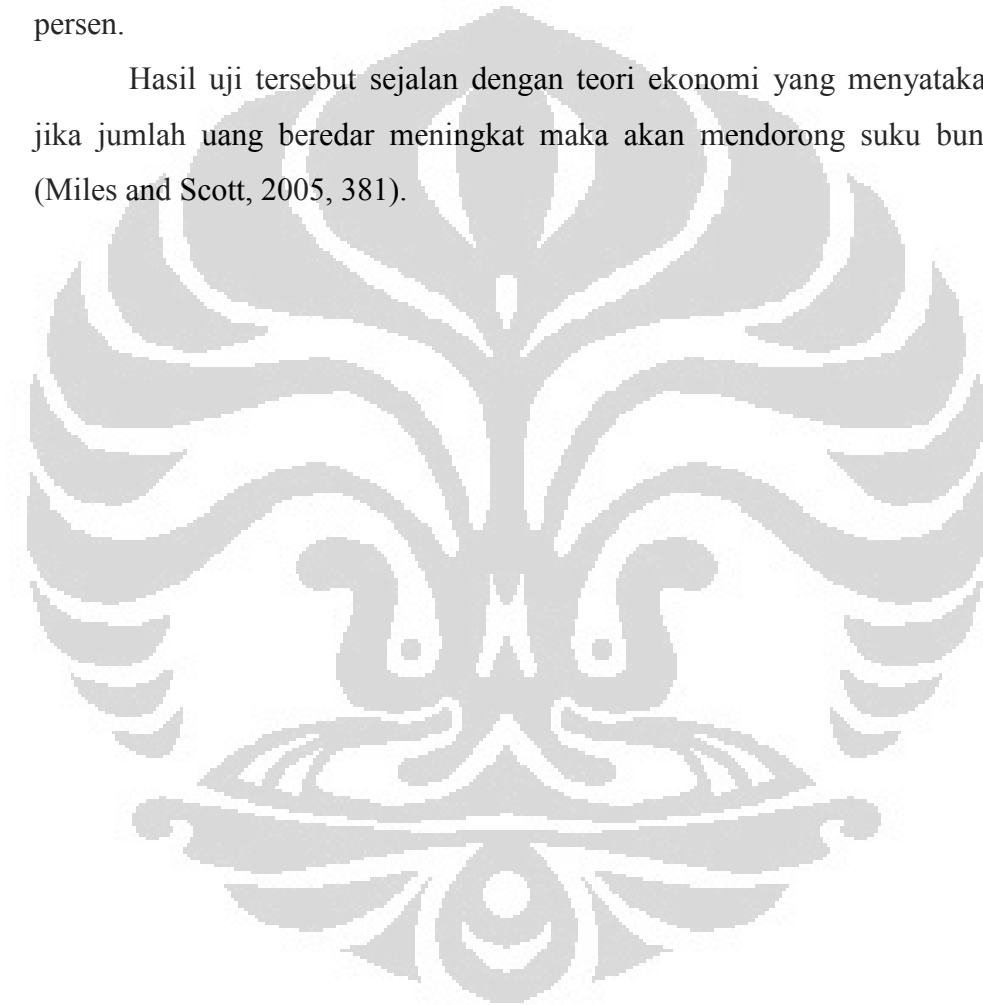
e. Pengaruh Jumlah Uang Beredar (M2) terhadap Rata-rata Tertimbang Suku Bunga Kredit Rupiah Bank Umum:

Berdasarkan hasil uji hipotesis sebagaimana terlihat pada Tabel 5.6, diperoleh nilai t hitung sebesar -5,826 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Apabila dilihat dari nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa $H_{0,5}$ ditolak, yang berarti ada hubungan negatif antara variabel

dependen X_5 (Jumlah Uang Beredar/M2) terhadap variabel independen Y (rata-rata tertimbang suku bunga kredit rupiah bank umum).

Pengaruh Jumlah Uang Beredar (M2) terhadap rata-rata tertimbang suku bunga kredit rupiah bank umum relatif besar yang ditunjukkan oleh nilai koefisien estimasi yang sebesar -3,240. Setiap peningkatan satu persen M2 akan menyebabkan suku bunga kredit rupiah bank umum menurun sebesar -3,240 persen.

Hasil uji tersebut sejalan dengan teori ekonomi yang menyatakan bahwa jika jumlah uang beredar meningkat maka akan mendorong suku bunga turun (Miles and Scott, 2005, 381).



BAB 6

SIMPULAN DAN SARAN

6.1. Simpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan atas hasil dua model regresi linier berganda, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaruh rasio GWM Rupiah (sebagai variabel utama penelitian) dan variabel lainnya (sebagai variabel kontrol) terhadap Volume Kredit Rupiah Bank Umum:
 - a. Rasio GWM rupiah berpengaruh positif terhadap volume kredit rupiah bank umum, tetapi pengaruhnya relatif kecil. Kecilnya pengaruh rasio GWM rupiah terhadap volume kredit rupiah pada bank umum disebabkan dalam periode penelitian secara rata-rata rasio GWM rupiah masih relatif kecil. Selain itu, rata-rata LDR selama periode penelitian masih relatif rendah yang disebabkan belum semua dana bank disalurkan dalam bentuk kredit sehingga terdapat sebagian dana yang ditempatkan dalam aktiva produktif lainnya (antara lain penempatan dana antar bank serta surat-surat berharga seperti SUN, SBI dan Obligasi Korporasi). Ketentuan Bank Indonesia yang baru mengenai GWM yang mulai berlaku sejak Oktober 2010 untuk GWM Primer dan Sekunder dan mulai berlaku sejak Maret 2011 untuk GWM LDR, pengaruhnya terhadap volume kredit bank umum nampaknya belum tertangkap dalam model regresi karena datanya yang relatif masih sedikit. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Okamoto (2011) di Amerika Serikat bahwa tingkat *reserve requirement* berpengaruh negatif terhadap volume kredit bank. Namun, hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Gunadi and Harun (2011) dan Juanda (2008) untuk perekonomian Indonesia.
 - b. Suku bunga kredit rupiah berpengaruh negatif terhadap volume kredit rupiah bank umum, sehingga sejalan dengan teori ekonomi serta hasil penelitian Okamoto (2011) di Amerika Serikat dan Danistyoyo (2009) di Indonesia. Pengaruh suku bunga kredit terhadap volume kredit rupiah bank umum relatif kecil sehingga kenaikan suku bunga kredit tidak terlalu berpengaruh terhadap

permintaan kredit. Hal ini mengindikasikan masih dominannya kredit bank dalam memenuhi kebutuhan masyarakat atas kredit investasi, modal kerja dan konsumsi.

- c. Dana Pihak Ketiga (DPK) rupiah bank umum berpengaruh positif terhadap terhadap volume kredit rupiah bank umum. Pengaruh DPK rupiah bank umum terhadap volume kredit rupiah bank umum tergolong besar. Hal ini disebabkan DPK masih menjadi sumber dana utama bagi bank umum untuk membiayai kredit. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Pratama (2010).
 - d. Indeks Harga Konsumen (IHK) berpengaruh positif terhadap volume kredit rupiah bank umum. Hubungan yang positif antara IHK dan volume kredit disebabkan dalam batas tertentu kenaikan tingkat inflasi mencerminkan adanya peningkatan kegiatan ekonomi, sehingga akan mendorong permintaan kredit. Pada periode penelitian, rata-rata tingkat inflasi Indonesia adalah sebesar 8,07 persen sehingga tergolong dalam inflasi ringan karena masih di bawah 10 persen. Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian Danistyoyo (2009) yang menyimpulkan bahwa terdapat hubungan yang negatif antara inflasi dengan volume kredit. Perbedaan tersebut bisa disebabkan oleh perbedaan metode estimasi yang digunakan dan perbedaan periode penelitian.
2. Pengaruh rasio GWM Rupiah (sebagai variabel utama penelitian) dan variabel lainnya (sebagai variabel kontrol) terhadap Suku Bunga Kredit Rupiah Bank Umum:
 - a. Rasio GWM rupiah tidak berpengaruh terhadap suku bunga kredit rupiah bank umum. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Okamoto (2011) di Amerika Serikat bahwa tingkat *reserve requirement* berpengaruh positif terhadap suku bunga kredit bank. Hal tersebut kemungkinan disebabkan rata-rata rasio GWM rupiah selama periode penelitian masih tergolong rendah dan persentase biaya GWM (termasuk dalam komponen

biaya regulasi) masih relatif kecil dalam perhitungan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) bank umum.

- b. Suku bunga deposito rupiah 1 bulan berpengaruh positif terhadap suku bunga kredit rupiah bank umum, namun pengaruhnya relatif kecil. Hubungan yang positif diantara dua variabel tersebut disebabkan deposito satu bulan masih menjadi sumber utama dana bank umum. Adapun relatif kecilnya hubungan antara suku bunga deposito 1 bulan dengan suku bunga kredit kemungkinan disebabkan manajemen bank berupaya untuk tetap mempertahankan marjin keuntungan yang relatif tinggi. Dengan demikian meskipun terdapat penurunan suku bunga deposito, misalnya sebesar satu persen, hanya akan menyebabkan penurunan suku bunga kredit dengan persentase yang lebih kecil.
- c. LIBOR berpengaruh negatif terhadap suku bunga kredit rupiah bank umum, namun pengaruhnya relatif kecil. Hal ini disebabkan masih relatif rendahnya pinjaman luar negeri sebagai sumber pendanaan bank umum. Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian Hanurawati (2007) dan Kurniawan (2004) bahwa suku bunga luar negeri (SIBOR) berpengaruh positif terhadap suku bunga kredit yang kemungkinan disebabkan perbedaan dalam periode penelitian dan metode estimasi yang digunakan.
- d. IHK berpengaruh positif terhadap suku bunga kredit rupiah bank umum dan pengaruhnya relatif besar. Hal ini disebabkan suku bunga kredit bank mengikuti tingkat inflasi dan besarnya suku bunga kredit selalu berada di atas tingkat inflasi untuk mempertahankan imbal hasil (*return*) tetap positif.
- e. Jumlah Uang Beredar (M2) berpengaruh negatif terhadap suku bunga kredit rupiah bank umum dan pengaruhnya relatif besar. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori ekonomi yang menyatakan bahwa jika jumlah uang beredar meningkat maka akan mendorong suku bunga untuk turun.

6.2. Keterbatasan Penelitian

Terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini yaitu:

1. Penelitian ini menggunakan data *time series* triwulanan dan hanya mencakup periode Triwulan I/2000 sampai dengan Triwulan IV/2011 serta sebagian besar data bersumber dari laporan publikasi Bank Indonesia.
2. Obyek penelitian adalah bank umum secara agregat sehingga tidak dapat menangkap variasi pada bank baik secara individu maupun per segmen (Bank Persero, BUSN Devisa, BUSN Non Devisa, BPD, Bank Campuran dan Bank Asing) serta per jenis penggunaan kredit (konsumsi, modal kerja dan investasi).
3. Adanya permasalahan autokorelasi pada variabel pengganggu (*error term*) pada hasil pengujian dua model regresi linier berganda (*multiple regression*) yang digunakan. Menurut Gujarati and Porter (2011), permasalahan autokorelasi merupakan hal yang sering ditemui pada penelitian dengan menggunakan data *time series*, yang disebabkan oleh adanya kelembaman data (*inertia*), bias spesifikasi model, fenomena laba-laba (*cob web phenomenon*), manipulasi data (misalnya dengan interpolasi data), maupun karena adanya kelambanan waktu (*time lags*). Berdasarkan kriteria BLUE (*Best Linier Unbiased Estimators*) pada metode estimasi OLS (*Ordinary Least Square*), parameter estimasi dari model regresi linier yang terdapat permasalahan autokorelasi tetap memenuhi unsur linier dan tidak bias (*unbiased*) tetapi tidak lagi memenuhi unsur *best* karena variannya tidak minimum. Salah satu cara untuk mengatasi permasalahan autokorelasi adalah dengan menerapkan metode estimasi GLS (*Generalised Least Square*). Penulis telah mencoba melakukan pengujian terhadap model GLS tersebut, namun hasil regresi menunjukkan bahwa terdapat permasalahan baru berupa multikolinieritas diantara beberapa variabel bebas. Oleh karena itu penelitian ini masih tetap menggunakan hasil regresi metode OLS.

6.3. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelelitian tersebut di atas, maka saran yang dapat direkomendasikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti Selanjutnya dan Akademisi:
 - a. Obyek penelitian dibedakan berdasarkan segmen bank (Bank Persero, BUSN, BPD, Bank Campuran dan Bank Asing), berdasarkan bank konvensional dan bank syariah serta berdasarkan jenis penggunaan kredit (konsumsi, modal kerja dan investasi).
 - b. Data penelitian diperbanyak dengan menggunakan data bulanan.
 - c. Melakukan penelitian mengenai besaran rasio GWM yang optimal sehingga tidak berdampak buruk bagi bank dan masyarakat dalam bentuk penurunan volume kredit dan peningkatan suku bunga kredit.
2. Bagi Manajemen Bank:
 - a. Manajemen bank perlu mempertimbangkan efisiensi dalam melakukan ekspansi usaha agar dapat menekan suku bunga kredit, yaitu dengan melakukan penghimpunan dana masyarakat yang memiliki *cost* yang lebih rendah daripada deposito. Beberapa hal yang dapat ditempuh adalah meningkatkan tabungan dan giro, menerbitkan saham (*rights issue*) atau obligasi, maupun meminjam dana pada bank atau lembaga keuangan internasional dengan memanfaatkan momentum rendahnya suku bunga internasional saat ini (LIBOR).
 - b. Manajemen bank perlu meningkatkan upaya penyaluran kredit untuk meningkatkan LDR terkait dengan adanya penerapan ketentuan rasio GWM yang dikaitkan dengan LDR sejak Maret 2011.

3. Bagi Bank Indonesia sebagai Otoritas Moneter dan Pengawasan Bank (sebelum secara resmi beralih ke Otoritas Jasa Keuangan/OJK):
 - a. Dapat tetap melanjutkan penggunaan GWM sebagai salah satu instrumen moneter untuk mengendalikan inflasi mengingat rasio GWM berpengaruh positif terhadap volume kredit bank umum meskipun pengaruhnya relatif kecil serta rasio GWM tidak berpengaruh terhadap suku bunga kredit bank umum. Hal tersebut kemungkinan disebabkan rasio GWM saat ini yang masih relatif kecil (belum mencapai titik optimal). Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut bekerjasama dengan peneliti/akademisi untuk mendapatkan rasio GWM yang optimal sehingga kebijakan GWM dapat efektif dalam mengendalikan inflasi namun tidak berdampak merugikan bagi bank dan masyarakat.
 - b. Tetap melanjutkan upaya pengendalian inflasi mengingat inflasi berpengaruh positif terhadap suku bunga kredit. Dengan inflasi yang rendah diharapkan suku bunga kredit juga dapat ditekan.
4. Bagi Masyarakat:

Masyarakat pemilik dana, baik ritel maupun korporasi, perlu mencari alternatif investasi selain menyimpan dana di bank, misalnya menempatkan dana di pasar modal dalam bentuk investasi saham, obligasi atau reksadana. Dalam jangka panjang investasi masyarakat di pasar modal akan semakin mengembangkan pasar modal dan mendorong bank untuk mencari sumber pendanaan yang lebih murah selain deposito.

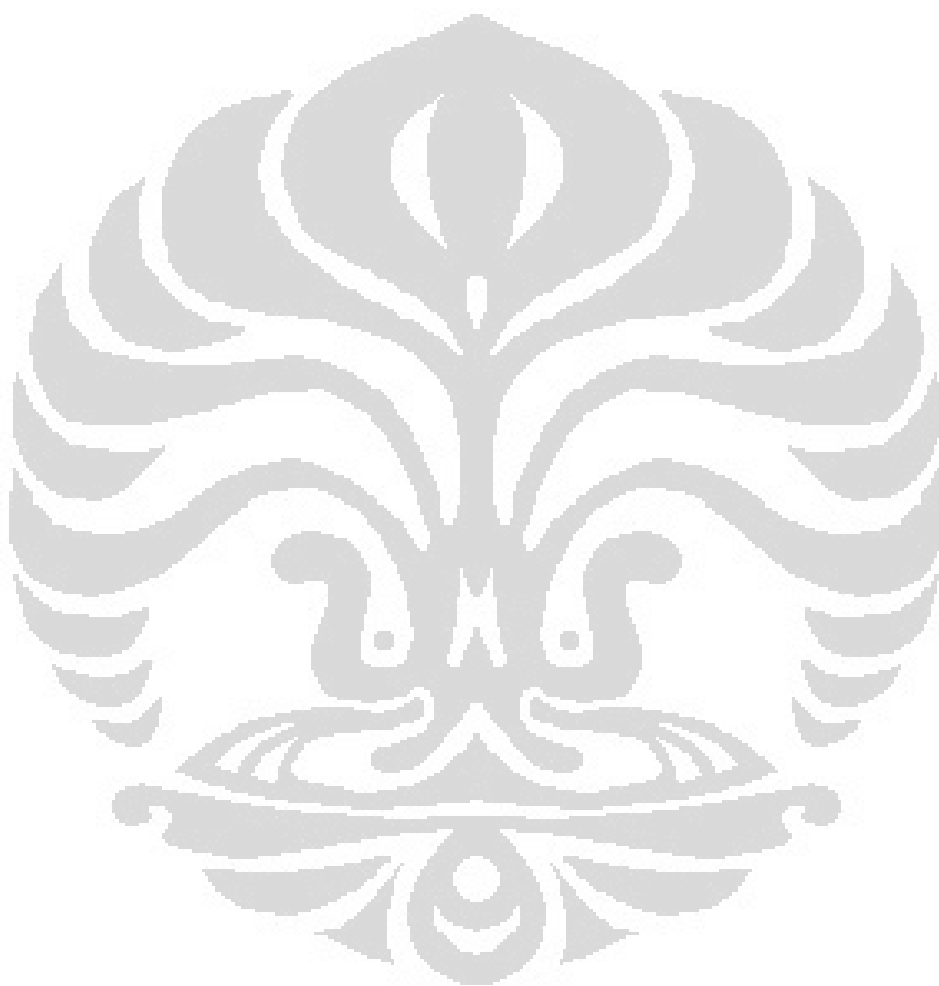
DAFTAR PUSTAKA

- Bank Indonesia (2002). *Laporan Perekonomian Indonesia Tahun 2001*. Jakarta.
- Bank Indonesia (2006). *Sejarah Bank Indonesia Periode V: 1997-2009*. Jakarta.
- Bank Indonesia (2007). Sasaran Inflasi. *Working Paper*. Jakarta.
- Bank Indonesia (2010). *Laporan Perekonomian Indonesia Tahun 2009*. Jakarta.
- Bank Indonesia (2010b). Giro Wajib Minimum Sebagai Instrumen Moneter. *Working Paper*.
- Bank Indonesia (2011a). *Operasi Moneter*. Materi Sosialisasi Direktorat Pengelolaan Moneter kepada Pengawas Bank di Direktorat Pengawasan Bank 1, Bank Indonesia (tidak dipublikasikan). Jakarta.
- Bank Indonesia (2011b). *Laporan Perekonomian Indonesia Tahun 2010*. Jakarta.
- Bank Indonesia (2011c). *Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia, Vol.XII, No.10, Oktober 2010*. Jakarta.
- Bank Indonesia (2011d). *Statistik Perbankan Indonesia, Oktober 2011*. Jakarta.
- Bank Indonesia (2011e). Perkembangan SBDK Perbankan Sampai Dengan September 2011. *Working Paper*. Jakarta.
- Bank Indonesia (2011, November 19). <http://www.bi.go.id/web/id/Moneter/>.
- Baye, Michael R. (2010). *Managerial Economics and Business Strategy* (7th ed.). McGraw Hill: International Edition.
- Bennet, Paul & Peristiani, Stavros. (2002, May). *Are reserve requirement Still Binding?*. Federal Reserve Bank of New York. Oktober,7 2011. <http://www.frb.org/research/epr/02v08n1/0205benn/0205benn.html>.
- Biro Pusat Statistik (2011, November 20). <http://www.bps.go.id/>.
- Danistyo, Gerry (2009). Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Permintaan dan Penawaran Kredit UMKM di Indonesia. *Tesis*. Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor.
- Elcom (2010). *Seri Belajar Kilat: SPSS 18*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Gujarati, Damodar N. & Porter, Dawn C. (2009). *Basic Econometric* (5th ed.). McGraw Hill: International Edition.

- Gunadi, Iman & Harun, Cicilia A. (2011). Revitalising Reserve Requirement in Banking Model: An Industrial Organisation Approach. *Occasional Paper No. 51*. Kuala Lumpur, Malaysia: The South East Asian Central Banks (SEACEN) Research and Training Centre (The SEACEN Centre).
- Hanurawati, Retno (2007). Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Suku Bunga Kredit Bank Umum di Indonesia Sebelum dan Sesudah Krisis Moneter Tahun 1997. *Tesis*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Hemedes, Carmen V. & Lapid, Dennis, D. (2005, July). A Review of Issues Concerning Reserve Requirements, 17-28. *Bangka Sentral Philippines Review*.
- Juanda, Bambang (2008, Desember). Kajian Pengaruh Kebijakan Giro Wajib Minimum (GWM) terhadap Beberapa Indikator Kinerja Perbankan. *Jupiter*, Edisi Khusus.
- Kurniawan, Taufik (2004, Desember). Determinan Tingkat Suku Bunga Pinjaman di Indonesia Tahun 1983-2002, 438-459. *Buletin Ekonomi, Moneter dan Perbankan*.
- Laksito, Triyoga (2010). Kondisi Pasar Perbankan Yang Mempengaruhi Tingkat Bunga Deposito Bank-bank Badan Usaha Milik Negara. *Tesis*. Magister Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.
- Latumaerissa, Julius R. (2011). *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Miles, David & Scott, Andrew. (2005). *Macroeconomics: Understanding The Wealth of Nations* (2nd ed.). England: John Willey & Sons Inc.
- Okamoto, Geoffrey W.S. (2011). The Effect of Bank Reserves Requirements on Lending Volume and Interest Rates Faced by Borrowers. *Tesis*. Georgetown University.
- Pratama, Billy Arma (2010). Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Penyaluran Kredit Perbankan (Studi pada Bank Umum di Indonesia Periode Tahun 2005-2009). *Tesis*. Universitas Sumatra Utara.
- Pyndick, Roberts S. & Rubinfeld, Daniel L. (1998). *Econometrics Models and Economic Forecasts* (4th ed.). McGraw Hill: International Edition.
- Saunders, Anthony & Cornett, Marcia Mellon. (2011). *Financial institutions Management: A Risk Management Approach* (7th ed.). McGraw Hill: International Edition.
- Suliyanto (2011). *Ekonometrika Terapan: Teori & Aplikasi Dengan SPSS*. Yogyakarta: Andi Offset.

Warganegara, Akmal Ranga Putra (2011). Determinan Net Interest Margin Industri Perbankan Indonesia. *Tesis*. Magister Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.

Zhang Xiaohui, Ji Zhihong & Cui Yong. (2009). Reserve requirement, reserve requirement tax and money control in China: 1984-2007. *Front. Econ. China*, 2009, 361-383.

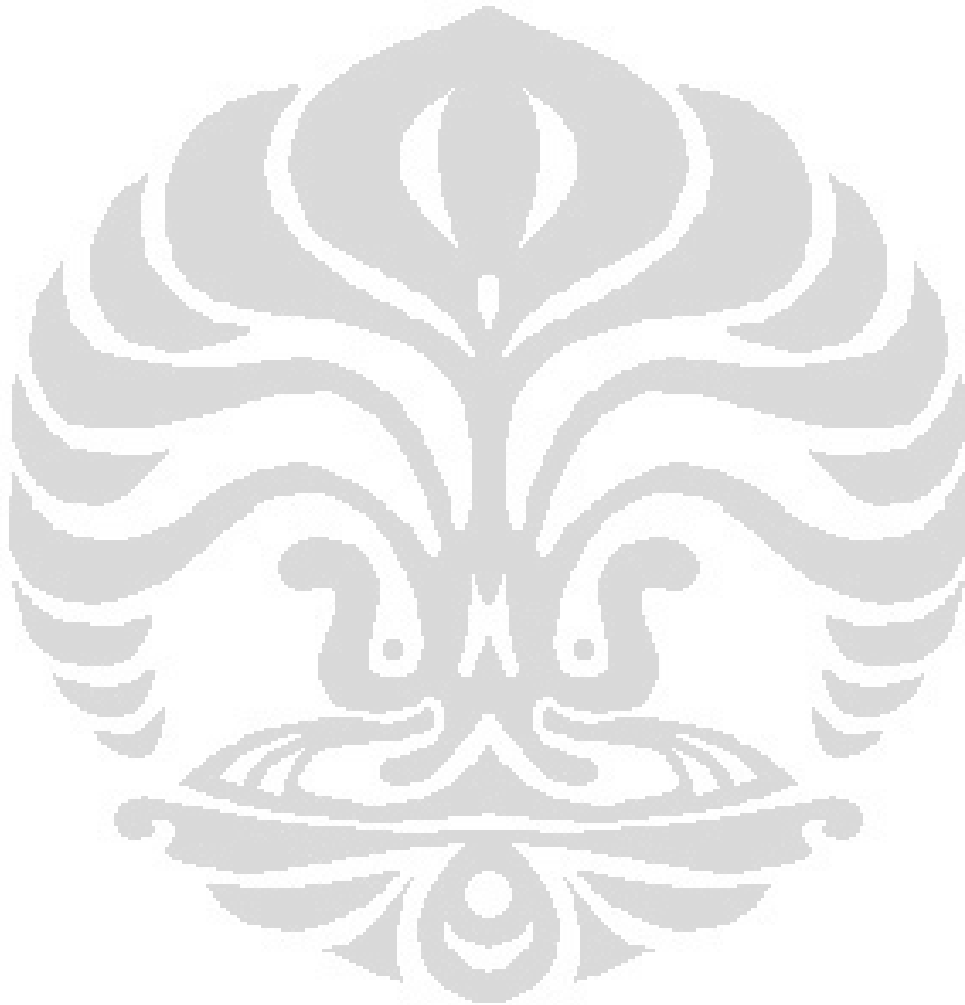




Lampiran 1: Data Penelitian Model Regresi Linier I
Pengaruh GWM dan Variabel Lain terhadap Volume Kredit (2000/I-2011/IV)

No.	Posisi	Ln Volume Kredit	Rasio GWM (%)	Suku Bunga Kredit (%)	Ln DPK	Ln IHK
1	2000/1	11,78	5,11	16,46	13,15	4,36
2	2000/2	11,81	5,26	16,21	13,16	4,38
3	2000/3	11,85	5,37	17,70	13,18	4,39
4	2000/4	11,93	5,13	18,08	13,23	4,44
5	2001/1	11,97	5,16	17,86	13,26	4,46
6	2001/2	12,06	5,12	18,32	13,27	4,49
7	2001/3	12,14	5,14	18,79	13,29	4,51
8	2001/4	12,22	4,87	19,08	13,37	4,55
9	2002/1	12,18	5,07	19,34	13,36	4,59
10	2002/2	12,27	5,04	19,27	13,39	4,60
11	2002/3	12,41	5,10	19,02	13,41	4,61
12	2002/4	12,49	4,99	18,75	13,44	4,65
13	2003/1	12,52	5,07	18,65	13,45	4,66
14	2003/2	12,58	5,07	18,13	13,47	4,67
15	2003/3	12,64	5,15	17,18	13,49	4,68
16	2003/4	12,71	5,10	16,35	13,54	4,70
17	2004/1	12,73	5,47	15,88	13,45	4,71
18	2004/2	12,80	5,41	15,33	13,48	4,73
19	2004/3	12,88	7,74	15,00	13,51	4,74
20	2004/4	12,97	7,74	14,62	13,56	4,76
21	2005/1	13,02	7,88	14,47	13,56	4,79
22	2005/2	13,10	7,72	14,39	13,60	4,80
23	2005/3	13,19	10,41	15,15	13,63	4,82
24	2005/4	13,24	10,13	16,36	13,68	4,92
25	2006/1	13,24	10,90	16,70	13,70	4,94
26	2006/2	13,27	10,66	16,72	13,75	4,95
27	2006/3	13,31	10,50	16,54	13,79	4,96
28	2006/4	13,36	10,51	15,97	13,85	4,98
29	2007/1	13,36	10,89	15,55	13,86	5,00
30	2007/2	13,43	10,39	15,00	13,89	5,00
31	2007/3	13,49	10,58	14,49	13,93	5,03
32	2007/4	13,57	9,76	14,13	14,02	5,05
33	2008/1	13,62	10,38	13,90	13,98	5,08
34	2008/2	13,72	9,83	13,89	14,03	5,11
35	2008/3	13,81	9,15	14,52	14,07	5,14
36	2008/4	13,86	5,21	15,50	14,14	5,14
37	2009/1	13,86	5,34	15,35	14,16	5,15
38	2009/2	13,91	5,21	15,13	14,20	5,14
39	2009/3	13,96	5,25	14,88	14,22	5,16
40	2009/4	14,02	7,75	14,52	14,28	5,17
41	2010/1	14,04	7,79	14,08	14,29	5,18
42	2010/2	14,12	7,75	13,72	14,35	5,19
43	2010/3	14,16	7,79	13,52	14,37	5,22
44	2010/4	14,21	10,41	13,34	14,48	5,24
45	2011/1	14,24	11,37	13,22	14,48	5,24
46	2011/2	14,31	11,32	13,14	14,53	4,84

47	2011/3	14,37	10,74	12,87	14,57	4,86
	Minimum	11,78	4,87	12,87	13,15	4,36
	Maximum	14,37	11,37	19,34	14,57	5,24
	Mean	13,12	7,53	15,89	13,76	4,85
	Stan. Deviation	0,78	2,45	1,90	0,42	0,27

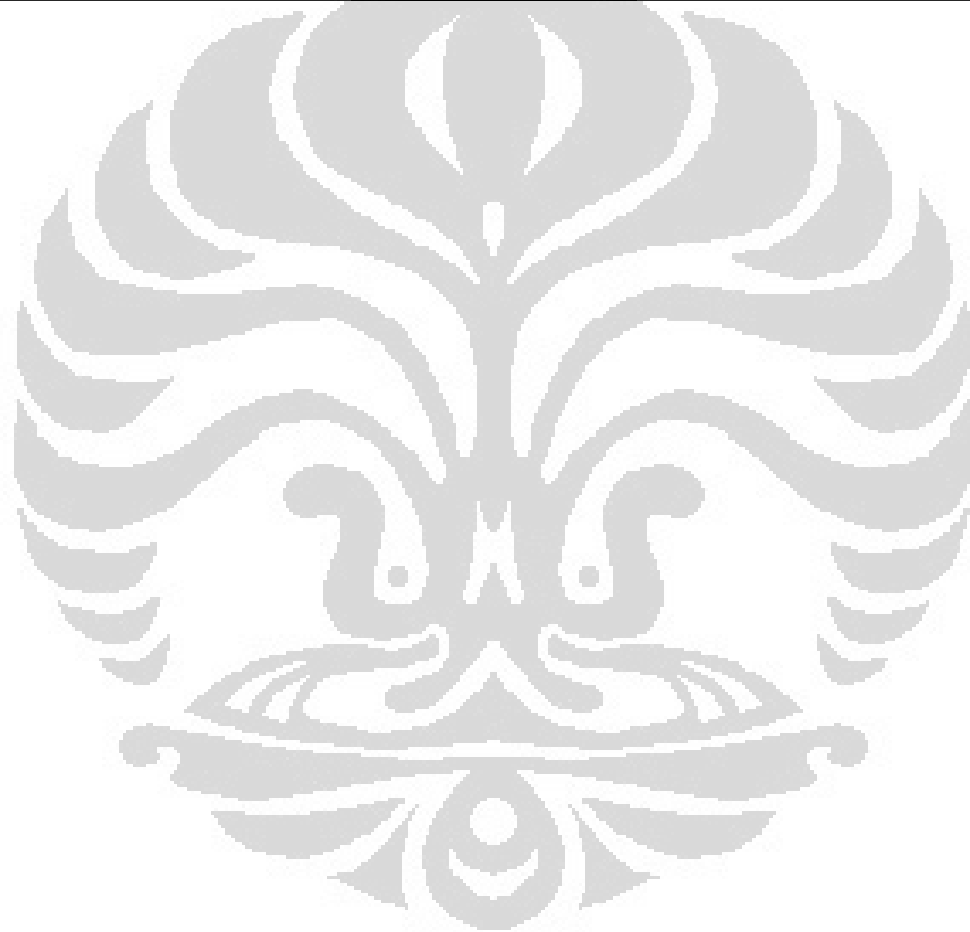


**Lampiran 1 (Lanjutan): Data Penelitian Model Regresi Linier I
Pengaruh GWM dan Variabel Lain terhadap Volume Kredit (2000/I-2011/IV)**

No.	Posisi	Volume Kredit (miliar Rp)	GWM (miliar Rp)	DPK (miliar Rp)	IHK
1	2000/1	130.875	26.177	512.735	77,96
2	2000/2	134.654	27.372	520.309	79,45
3	2000/3	139.763	28.409	529.078	80,83
4	2000/4	152.482	28.475	554.549	84,46
5	2001/1	158.023	29.670	575.204	86,24
6	2001/2	171.984	29.763	581.141	89,07
7	2001/3	187.953	30.496	593.551	91,35
8	2001/4	202.618	31.336	643.530	95,05
9	2002/1	194.091	32.274	636.002	98,39
10	2002/2	212.676	32.892	652.770	99,26
11	2002/3	245.141	34.071	667.816	100,88
12	2002/4	265.117	34.431	689.412	104,44
13	2003/1	274.419	35.128	693.030	105,44
14	2003/2	289.435	35.981	710.196	106,19
15	2003/3	308.082	37.101	720.673	107,27
16	2003/4	331.460	38.569	755.599	109,83
17	2004/1	339.078	37.887	692.134	110,83
18	2004/2	363.826	38.863	718.315	113,44
19	2004/3	393.560	57.018	736.778	114,00
20	2004/4	428.859	60.091	776.719	116,86
21	2005/1	449.517	60.814	771.801	120,59
22	2005/2	489.827	62.323	806.859	121,86
23	2005/3	535.050	86.876	834.252	124,33
24	2005/4	559.661	88.775	876.475	136,86
25	2006/1	562.822	96.869	889.080	139,57
26	2006/2	578.183	100.091	938.746	140,79
27	2006/3	601.383	102.285	974.296	142,42
28	2006/4	631.882	108.353	1.031.324	145,89
29	2007/1	632.812	114.097	1.047.584	148,67
30	2007/2	677.222	112.086	1.079.108	148,92
31	2007/3	718.566	118.566	1.121.150	152,32
32	2007/4	781.797	120.082	1.230.131	155,50
33	2008/1	820.658	122.360	1.179.300	160,81
34	2008/2	912.858	122.271	1.243.294	165,33
35	2008/3	993.209	117.939	1.289.098	170,15
36	2008/4	1.045.365	72.033	1.381.791	171,07
37	2009/1	1.048.575	75.333	1.410.394	171,69
38	2009/2	1.099.118	76.526	1.469.609	171,43
39	2009/3	1.150.234	78.411	1.492.638	174,98
40	2009/4	1.221.205	123.039	1.587.056	175,83

41	2010/1	1.253.756	124.620	1.600.765	177,58
42	2010/2	1.358.518	131.757	1.700.691	180,09
43	2010/3	1.416.546	135.519	1.740.139	185,12
44	2010/4	1.489.163	201.837	1.938.625	188,06
45	2011/1	1.527.505	220.790	1.942.172	189,39
46	2011/2	1.637.867	230.990	2.040.127	126,50
47	2011/3	1.736.818	228.698	2.129.430	128,89

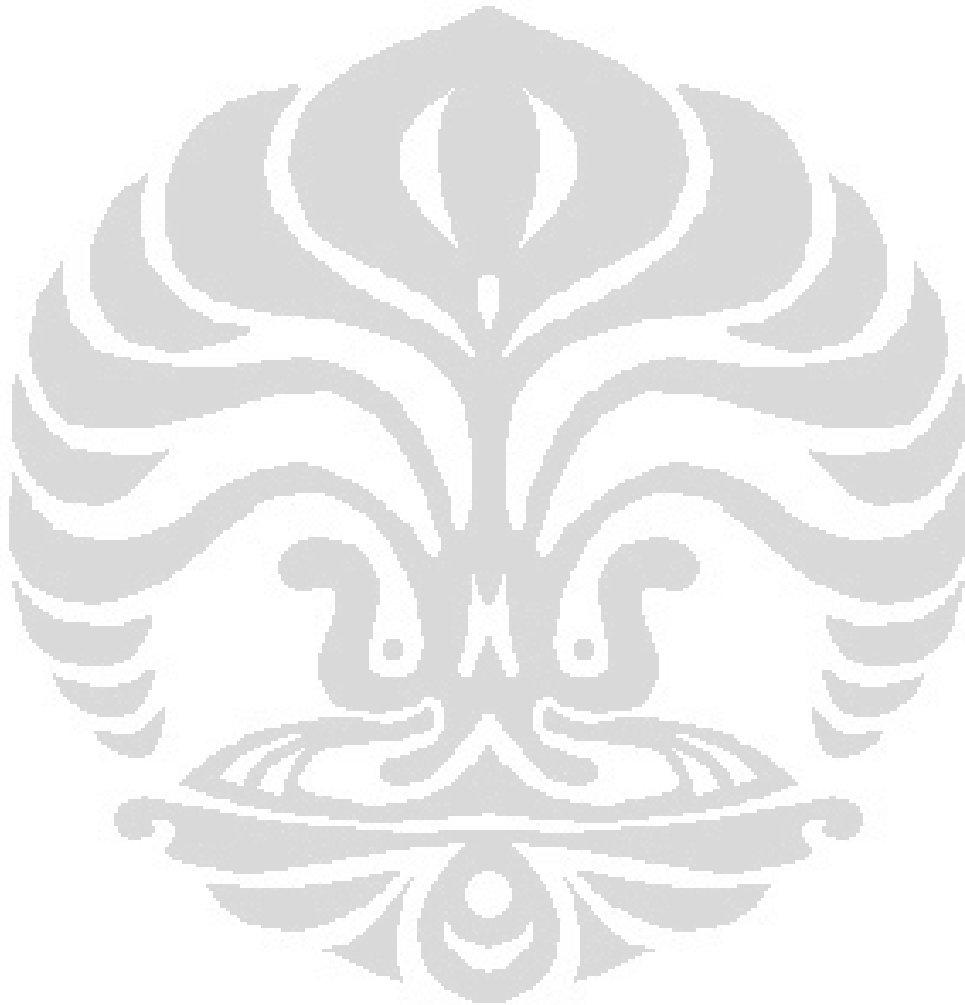
Minimum	130.875,00	26.177,00	512.735,00	77,96
Maximum	1.736.817,56	230.990,00	2.129.430,31	189,39
Mean	656.472,58	83.815,83	1.036.286,72	131,61
Standard Deviation	464.840,61	55.782,05	456.640,00	33,96

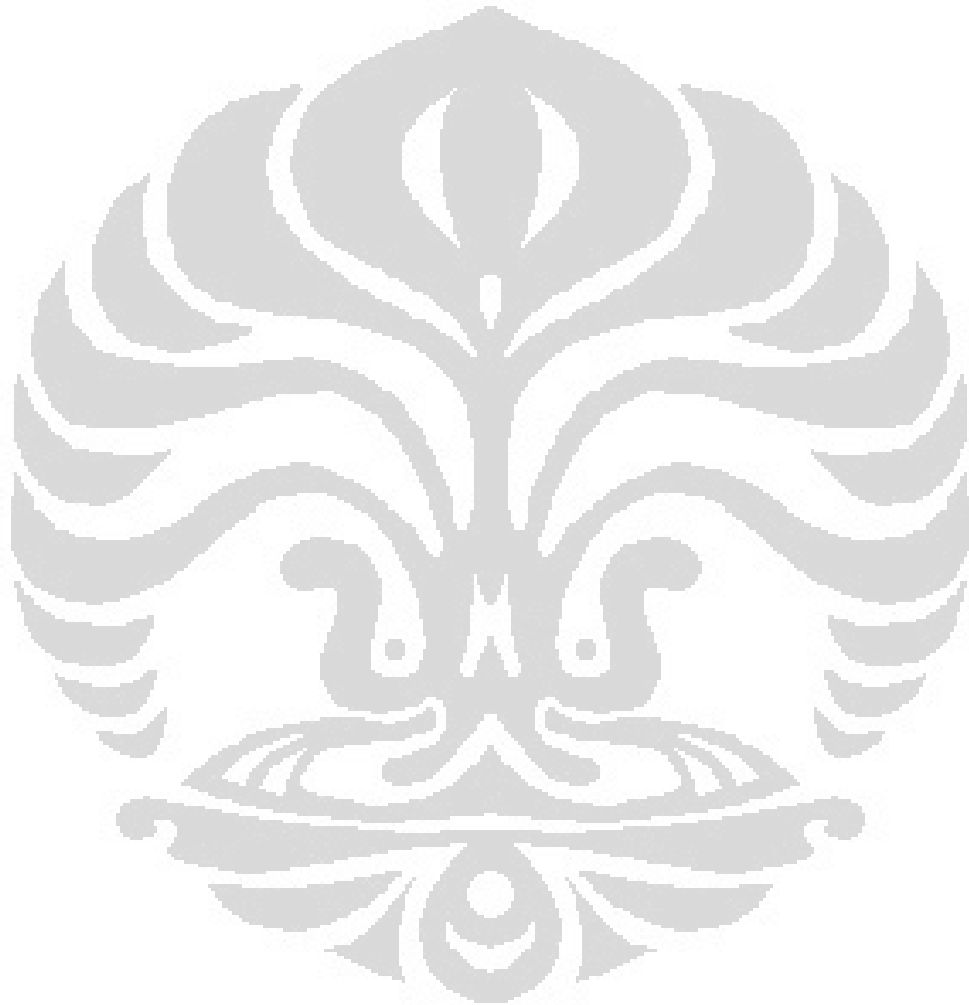


**Lampiran 2 (Lanjutan): Data Penelitian Model Regresi Linier 2
Pengaruh GWM dan Variabel Lain terhadap Suku Bunga Kredit (2000/I-2011/IV)**

No.	Posisi	Suku Bunga Kredit (%)	Rasio GWM (%)	Bunga Deposito 1 bl (%)	LIBOR (%)	Ln IHK	Ln JUB (M2)	JUB (M2)
1	2000/1	16,46	5,11	10,80	6,13	4,36	13,39	656.451
2	2000/2	16,21	5,26	10,37	6,64	4,38	13,44	684.335
3	2000/3	17,70	5,37	11,42	6,62	4,39	13,44	686.453
4	2000/4	18,08	5,13	11,96	6,56	4,44	13,52	747.028
5	2001/1	17,86	5,16	13,82	5,08	4,46	13,55	766.812
6	2001/2	18,32	5,12	14,01	3,86	4,49	13,59	796.440
7	2001/3	18,79	5,14	15,49	2,63	4,51	13,57	783.104
8	2001/4	19,08	4,87	16,07	1,87	4,55	13,65	844.053
9	2002/1	19,34	5,07	15,64	1,88	4,59	13,63	831.411
10	2002/2	19,27	5,04	14,76	1,84	4,60	13,64	838.635
11	2002/3	19,02	5,10	13,50	1,81	4,61	13,66	859.706
12	2002/4	18,75	4,99	12,81	1,38	4,65	13,69	883.908
13	2003/1	18,65	5,07	11,90	1,31	4,66	13,69	877.776
14	2003/2	18,13	5,07	10,31	1,14	4,67	13,70	894.213
15	2003/3	17,18	5,15	7,67	1,12	4,68	13,72	911.224
16	2003/4	16,35	5,10	6,62	1,12	4,70	13,77	955.692
17	2004/1	15,88	5,47	5,86	1,09	4,71	13,74	927.302
18	2004/2	15,33	5,41	6,23	1,37	4,73	13,79	973.398
19	2004/3	15,00	7,74	6,31	1,84	4,74	13,80	988.173
20	2004/4	14,62	7,74	6,43	2,40	4,76	13,85	1.033.877
21	2005/1	14,47	7,88	6,50	2,87	4,79	13,84	1.022.703
22	2005/2	14,39	7,72	6,98	3,34	4,80	13,89	1.076.526
23	2005/3	15,15	10,41	9,16	3,86	4,82	13,96	1.154.053
24	2005/4	16,36	10,13	11,98	4,39	4,92	14,00	1.202.762
25	2006/1	16,70	10,90	11,61	4,83	4,94	14,00	1.198.748
26	2006/2	16,72	10,66	11,34	5,34	4,95	14,04	1.257.785
27	2006/3	16,54	10,50	10,47	5,32	4,96	14,07	1.294.744
28	2006/4	15,97	10,51	8,96	5,32	4,98	14,14	1.382.493
29	2007/1	15,55	10,89	8,13	5,32	5,00	14,14	1.379.237
30	2007/2	15,00	10,39	7,46	5,32	5,00	14,19	1.454.577
31	2007/3	14,49	10,58	7,13	5,12	5,03	14,23	1.516.884
32	2007/4	14,13	9,76	7,19	4,60	5,05	14,32	1.649.662
33	2008/1	13,90	10,38	6,88	2,70	5,08	14,28	1.594.390
34	2008/2	13,89	9,83	7,19	2,46	5,11	14,35	1.703.381
35	2008/3	14,52	9,15	9,26	3,93	5,14	14,39	1.778.139
36	2008/4	15,50	5,21	10,75	0,43	5,14	14,46	1.895.839
37	2009/1	15,35	5,34	9,42	0,50	5,15	14,47	1.916.752
38	2009/2	15,13	5,21	8,52	0,31	5,14	14,50	1.977.532
39	2009/3	14,88	5,25	7,43	0,25	5,16	14,52	2.018.510
40	2009/4	14,52	7,75	6,87	0,23	5,17	14,58	2.141.384
41	2010/1	14,08	7,79	6,77	0,25	5,18	14,56	2.112.083
42	2010/2	13,72	7,75	6,79	0,35	5,19	14,62	2.231.144
43	2010/3	13,52	7,79	6,72	0,25	5,22	14,64	2.274.955
44	2010/4	13,34	10,41	6,83	0,26	5,24	14,72	2.471.206
45	2011/1	13,22	11,37	6,83	0,24	5,24	14,71	2.451.357
46	2011/2	13,14	11,32	6,82	0,19	4,84	14,74	2.522.784

47	2011/3	12,87	10,74	6,81	0,24	4,86	4,79	2.643.331
	Minimum	12,87	4,87	5,86	0,19	4,36	13,39	656.451,00
	Maximum	19,34	11,37	16,07	6,64	5,24	14,79	2.643.331,45
	Mean	15,89	7,53	9,42	2,68	4,85	14,04	1.367.296,86
	Stan.Deviation	1,95	2,46	3,08	2,17	0,27	0,43	605.671,42





**Lampiran 3: Hasil *Output* SPSS Model Regresi Linier I -
Pengaruh GWM dan Variabel Lain terhadap Volume Kredit (2000/I -
2011/IV)**

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
LnVolumeKredit	13,1219	,77980	47
RasioGWM	7,5262	2,44639	47
BungaKredit	15,8951	1,89879	47
LnDPK	13,7632	,41759	47
LnIHK	4,8464	,26510	47

Correlations

		LnVolumeKredit	RasioGWM	BungaKredit
Pearson Correlation	LnVolumeKredit	1,000	,639	-,831
	RasioGWM	,639	1,000	-,640
	BungaKredit	-,831	-,640	1,000
	LnDPK	,978	,581	-,797
	LnIHK	,939	,585	-,732
Sig. (1-tailed)	LnVolumeKredit	,000	,000	,000
	RasioGWM	,000	,000	,000
	BungaKredit	,000	,000	,000
	LnDPK	,000	,000	,000
	LnIHK	,000	,000	,000
N	LnVolumeKredit	47	47	47
	RasioGWM	47	47	47
	BungaKredit	47	47	47
	LnDPK	47	47	47
	LnIHK	47	47	47

Correlations

		LnDPK	LnIHK
Pearson Correlation	LnVolumeKredit	,978	,939
	RasioGWM	,581	,585
	BungaKredit	-,797	-,732
	LnDPK	1,000	,895
	LnIHK	,895	1,000
Sig. (1-tailed)	LnVolumeKredit	,000	,000
	RasioGWM	,000	,000
	BungaKredit	,000	,000
	LnDPK	,000	,000
	LnIHK	,000	,000
N	LnVolumeKredit	47	47
	RasioGWM	47	47
	BungaKredit	47	47
	LnDPK	47	47
	LnIHK	47	47

Variables Entered/Removed^b

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	LnIHK, RasioGWM, BungaKredit, LnDPK ^a	.	Enter

- a. All requested variables entered.
 b. Dependent Variable: LnVolumeKredit

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,992 ^a	,984	,982	,10465

- a. Predictors: (Constant), LnIHK, RasioGWM, BungaKredit, LnDPK
 b. Dependent Variable: LnVolumeKredit

Model Summary^b

Model	Change Statistics					Durbin-Watson
	R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	,984	628,104	4	42	,000	,482

- b. Dependent Variable: LnVolumeKredit

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	27,512	4	6,878	628,104	,000 ^a
	Residual	,460	42	,011		
	Total	27,972	46			

- a. Predictors: (Constant), LnIHK, RasioGWM, BungaKredit, LnDPK
 b. Dependent Variable: LnVolumeKredit

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-6,022	1,073		-5,610	,000
	RasioGWM	,016	,008	,051	1,943	,059
	BungaKredit	-,042	,014	-,103	-2,923	,006
	LnDPK	1,126	,093	,603	12,046	,000
	LnIHK	,865	,132	,294	6,532	,000

- a. Dependent Variable: LnVolumeKredit

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	RasioGWM	,561	1,782
	BungaKredit	,318	3,148
	LnDPK	,156	6,404
	LnIHK	,193	5,171

- a. Dependent Variable: LnVolumeKredit

Collinearity Diagnostics^a

Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions		
				(Constant)	RasioGWM	BungaKredit
1	1	4,904	1,000	,00	,00	,00
	2	,087	7,493	,00	,44	,01
	3	,008	25,281	,00	,56	,30
	4	,001	98,917	,16	,00	,37
	5	8,375E-5	241,990	,84	,00	,32

a. Dependent Variable: LnVolumeKredit

Collinearity Diagnostics^a

Model	Dimension	Variance Proportions	
		LnDPK	LnIHK
1	1	,00	,00
	2	,00	,00
	3	,00	,02
	4	,02	,55
	5	,98	,43

a. Dependent Variable: LnVolumeKredit

Residuals Statistics^a

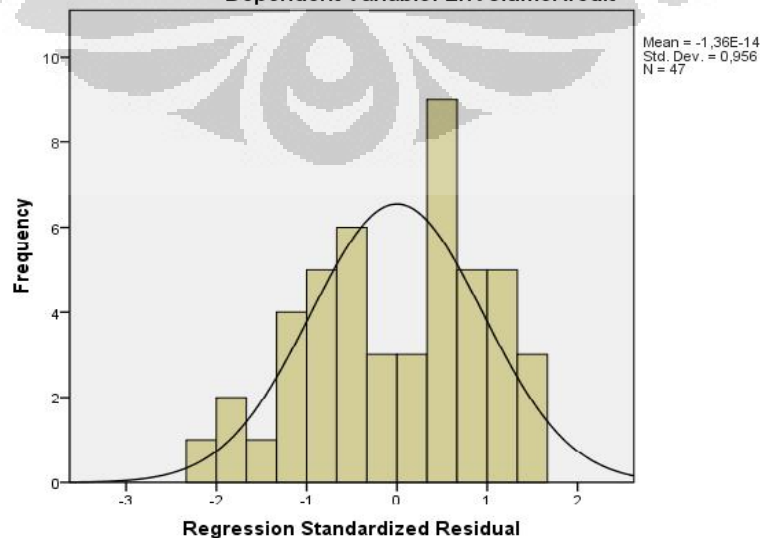
	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	11,9475	14,4451	13,1219	,77337	47
Residual	-,21433	,16234	,00000	,09999	47
Std. Predicted Value	-1,519	1,711	,000	1,000	47
Std. Residual	-2,048	1,551	,000	,956	47

a. Dependent Variable: LnVolumeKredit

Charts

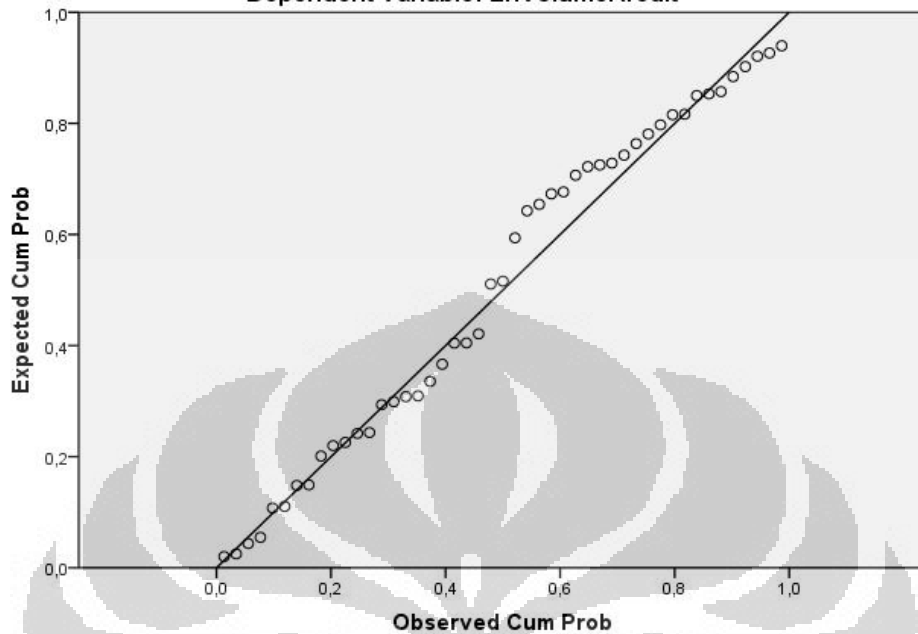
Histogram

Dependent Variable: LnVolumeKredit



Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: LnVolumeKredit



Descriptives

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	Variance
LnVolumeKredit	47	11,78	14,37	13,1219	,77980	,608
BungaKredit	47	12,87	19,34	15,8951	1,89879	3,605
LnDPK	47	13,15	14,57	13,7632	,41759	,174
LnIHK	47	4,36	5,24	4,8464	,26510	,070
Valid N (listwise)	47					

REGRESI MODEL 1-GLS UNTUK ATASI AUTO

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
NewLnVol.Kredit	12,9283	1,70321	47
NewRasioGWM	7,5262	2,44639	47
NewBungaKredit	15,8951	1,89879	47
NewLnDPK	13,7632	,41759	47
NewLnIHK	4,8464	,26510	47

Correlations

		NewLnVol.Kredit	NewRasioGWM	NewBungaKredit
Pearson Correlation	NewLnVol.Kredit	1,000	,407	-,415
	NewRasioGWM	,407	1,000	-,640
	NewBungaKredit	-,415	-,640	1,000
	NewLnDPK	,618	,581	-,797
	NewLnIHK	,643	,585	-,732
Sig. (1-tailed)	NewLnVol.Kredit	.	,002	,002
	NewRasioGWM	,002	.	,000
	NewBungaKredit	,002	,000	.
	NewLnDPK	,000	,000	,000
	NewLnIHK	,000	,000	,000
N	NewLnVol.Kredit	47	47	47
	NewRasioGWM	47	47	47
	NewBungaKredit	47	47	47
	NewLnDPK	47	47	47
	NewLnIHK	47	47	47

Correlations

		NewLnDPK	NewLnIHK
Pearson Correlation	NewLnVol.Kredit	,618	,643
	NewRasioGWM	,581	,585
	NewBungaKredit	-,797	-,732
	NewLnDPK	1,000	,895
	NewLnIHK	,895	1,000
Sig. (1-tailed)	NewLnVol.Kredit	,000	,000
	NewRasioGWM	,000	,000
	NewBungaKredit	,000	,000
	NewLnDPK	.	,000
	NewLnIHK	,000	.
N	NewLnVol.Kredit	47	47
	NewRasioGWM	47	47
	NewBungaKredit	47	47
	NewLnDPK	47	47
	NewLnIHK	47	47

Variables Entered/Removed^b

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	NewLnIHK, NewRasioGWM , NewBungaKredit, NewLnDPK ^a	.	Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: NewLnVol.Kredit

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,670 ^a	,449	,397	1,32281

a. Predictors: (Constant), NewLnIHK, NewRasioGWM, NewBungaKredit, NewLnDPK

b. Dependent Variable: NewLnVol.Kredit

Model Summary^b

Model	Change Statistics					Durbin-Watson
	R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	,449	8,565	4	42	,000	1,166

b. Dependent Variable: NewLnVol.Kredit

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	59,950	4	14,988	8,565	,000 ^a
	Residual	73,493	42	1,750		
	Total	133,443	46			

a. Predictors: (Constant), NewLnIHK, NewRasioGWM, NewBungaKredit, NewLnDPK

b. Dependent Variable: NewLnVol.Kredit

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-27,358	13,568		-2,016	,050
	NewRasioGWM	,074	,106	,106	,693	,492
	NewBungaKredit	,258	,182	,287	1,413	,165
	NewLnDPK	1,587	1,182	,389	1,343	,187
	NewLnIHK	2,846	1,673	,443	1,701	,096

a. Dependent Variable: NewLnVol.Kredit

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	NewRasioGWM	,561	1,782
	NewBungaKredit	,318	3,148
	NewLnDPK	,156	6,404
	NewLnIHK	,193	5,171

a. Dependent Variable: NewLnVol.Kredit

Collinearity Diagnostics^a

Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions		
				(Constant)	NewRasioGWM	NewBungaKredit
1	1	4,904	1,000	,00	,00	,00
	2	,087	7,493	,00	,44	,01
	3	,008	25,281	,00	,56	,30
	4	,001	98,917	,16	,00	,37
	5	8,375E-5	241,990	,84	,00	,32

a. Dependent Variable: NewLnVol.Kredit

Collinearity Diagnostics^a

Model	Dimension	Variance Proportions	
		NewLnDPK	NewLnIHK
1	1	,00	,00
	2	,00	,00
	3	,00	,02
	4	,02	,55
	5	,98	,43

a. Dependent Variable: NewLnVol.Kredit

Residuals Statistics^a

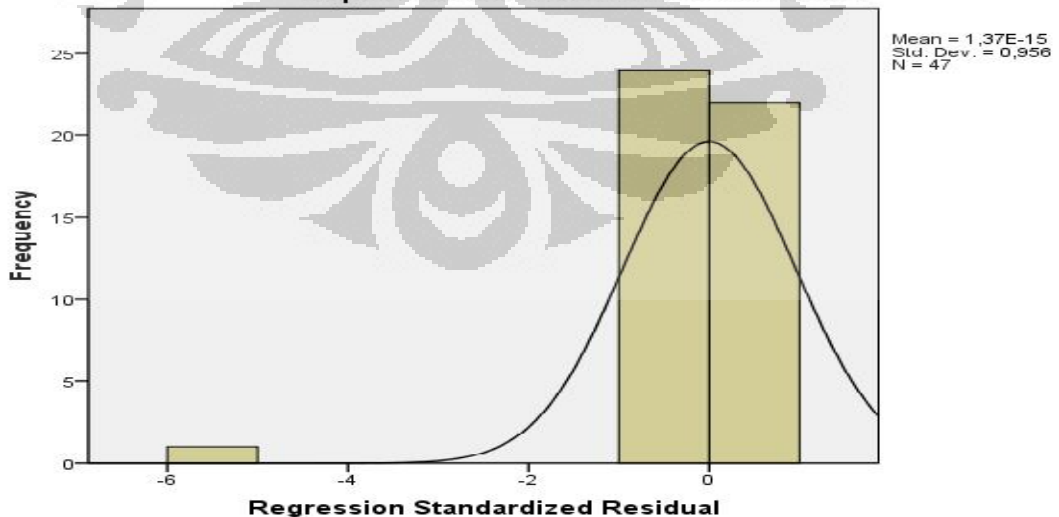
	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	10,5381	14,7808	12,9283	1,14161	47
Residual	-7,85812	1,25241	,00000	1,26399	47
Std. Predicted Value	-2,094	1,623	,000	1,000	47
Std. Residual	-5,940	,947	,000	,956	47

a. Dependent Variable: NewLnVol.Kredit

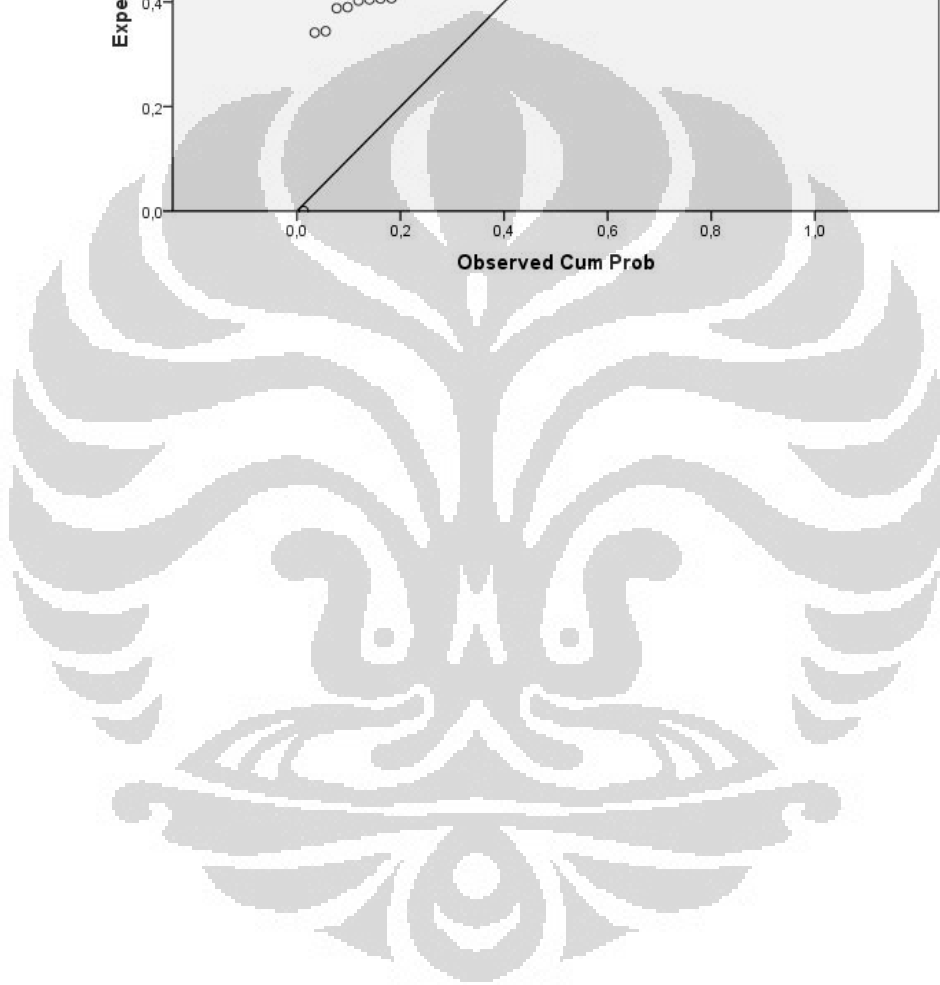
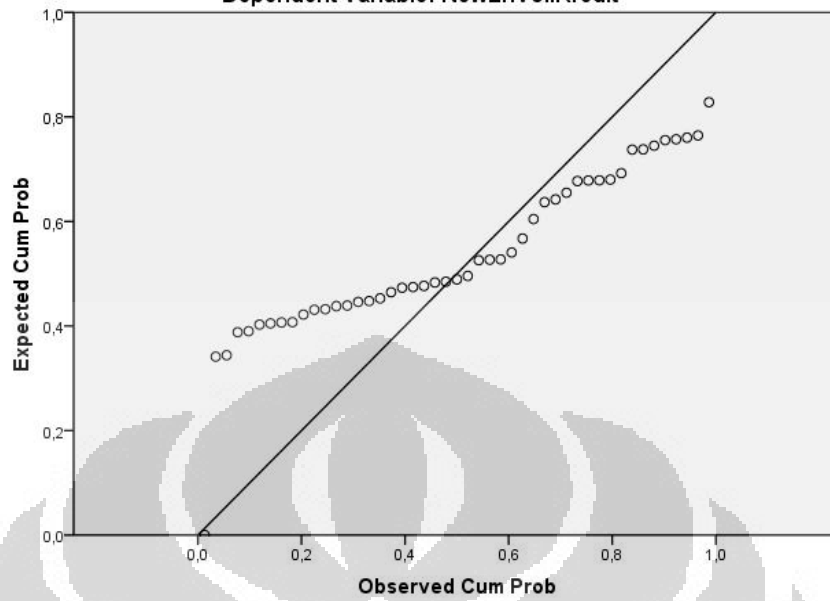
Charts

Histogram

Dependent Variable: NewLnVol.Kredit



Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual
Dependent Variable: NewLnVol.Kredit



Lampiran 4: Hasil *Output* SPSS Model Regresi Linier II - Pengaruh GWM dan Variabel Lain terhadap Suku Bunga Kredit (2000/I - 2011/IV)

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
BungaKredit	15,8951	1,89879	47
RasioGWM	7,5262	2,44639	47
BungaDeposito	9,4209	2,98086	47
LIBOR	2,6789	2,12678	47
LnIHK	4,8464	,26510	47
LnM2	14,0421	,41741	47

Correlations

		Bunga Kredit	Rasio GWM	Bunga Deposito	LIBOR
Pearson Correlation	BungaKredit	1,000	-,640	,876	,261
	RasioGWM	-,640	1,000	-,450	,178
	BungaDeposito	,876	-,450	1,000	,290
	LIBOR	,261	,178	,290	1,000
	LnIHK	-,732	,585	-,585	-,405
	LnM2	-,805	,589	-,591	-,498
Sig. (1-tailed)	BungaKredit		,000	,000	,038
	RasioGWM	,000		,001	,115
	BungaDeposito	,000	,001		,024
	LIBOR	,038	,115	,024	
	LnIHK	,000	,000	,000	,002
	LnM2	,000	,000	,000	,000
N	BungaKredit	47	47	47	47
	RasioGWM	47	47	47	47
	BungaDeposito	47	47	47	47
	LIBOR	47	47	47	47
	LnIHK	47	47	47	47
	LnM2	47	47	47	47

Correlations

		LnIHK	LnM2
Pearson Correlation	BungaKredit	-,732	-,805
	RasioGWM	,585	,589
	BungaDeposito	-,585	-,591
	LIBOR	-,405	-,498
	LnIHK	1,000	,913
	LnM2	,913	1,000
Sig. (1-tailed)	BungaKredit	,000	,000
	RasioGWM	,000	,000
	BungaDeposito	,000	,000
	LIBOR	,002	,000
	LnIHK		,000
	LnM2	,000	
N	BungaKredit	47	47
	RasioGWM	47	47
	BungaDeposito	47	47
	LIBOR	47	47
	LnIHK	47	47
	LnM2	47	47

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,964 ^a	,929	,921	,53461

a. Predictors: (Constant), LnM2, LIBOR, BungaDeposito, RasioGWM, LnIHK

b. Dependent Variable: BungaKredit

Model Summary^b

Model	Change Statistics					Durbin-Watson
	R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	,929	107,857	5	41	,000	,500

b. Dependent Variable: BungaKredit

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	154,131	5	30,826	107,857	,000 ^a
	Residual	11,718	41	,286		
	Total	165,849	46			

a. Predictors: (Constant), LnM2, LIBOR, BungaDeposito, RasioGWM, LnIHK

b. Dependent Variable: BungaKredit

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	49,706	5,547		8,960	,000
	RasioGWM	-,045	,055	-,058	-,811	,422
	BungaDeposito	,396	,034	,622	11,735	,000
	LIBOR	-,145	,059	-,162	-2,476	,018
	LnIHK	1,790	,743	,250	2,409	,021
	LnM2	-3,240	,556	-,712	-5,826	,000

a. Dependent Variable: BungaKredit

Coefficients^a

Model		Correlations			Collinearity Statistics	
		Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
1	(Constant)					
	RasioGWM	-,640	-,126	-,034	,341	2,929
	BungaDeposito	,876	,878	,487	,613	1,631
	LIBOR	,261	-,361	-,103	,401	2,493
	LnIHK	-,732	,352	,100	,160	6,247
	LnM2	-,805	-,673	-,242	,115	8,672

a. Dependent Variable: BungaKredit

Collinearity Diagnostics^a

Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions		
				(Constant)	RasioGWM	BungaDeposito
1	1	5,515	1,000	,00	,00	,00
	2	,328	4,101	,00	,00	,00
	3	,132	6,471	,00	,11	,22
	4	,025	14,861	,00	,45	,67
	5	,001	99,167	,13	,23	,10
	6	6,469E-5	291,975	,87	,21	,01

a. Dependent Variable: BungaKredit

Collinearity Diagnostics^a

Model	Dimension	Variance Proportions		
		LIBOR	LnIHK	LnM2
1	1	,00	,00	,00
	2	,39	,00	,00
	3	,01	,00	,00
	4	,12	,00	,00
	5	,18	,50	,00
	6	,30	,50	1,00

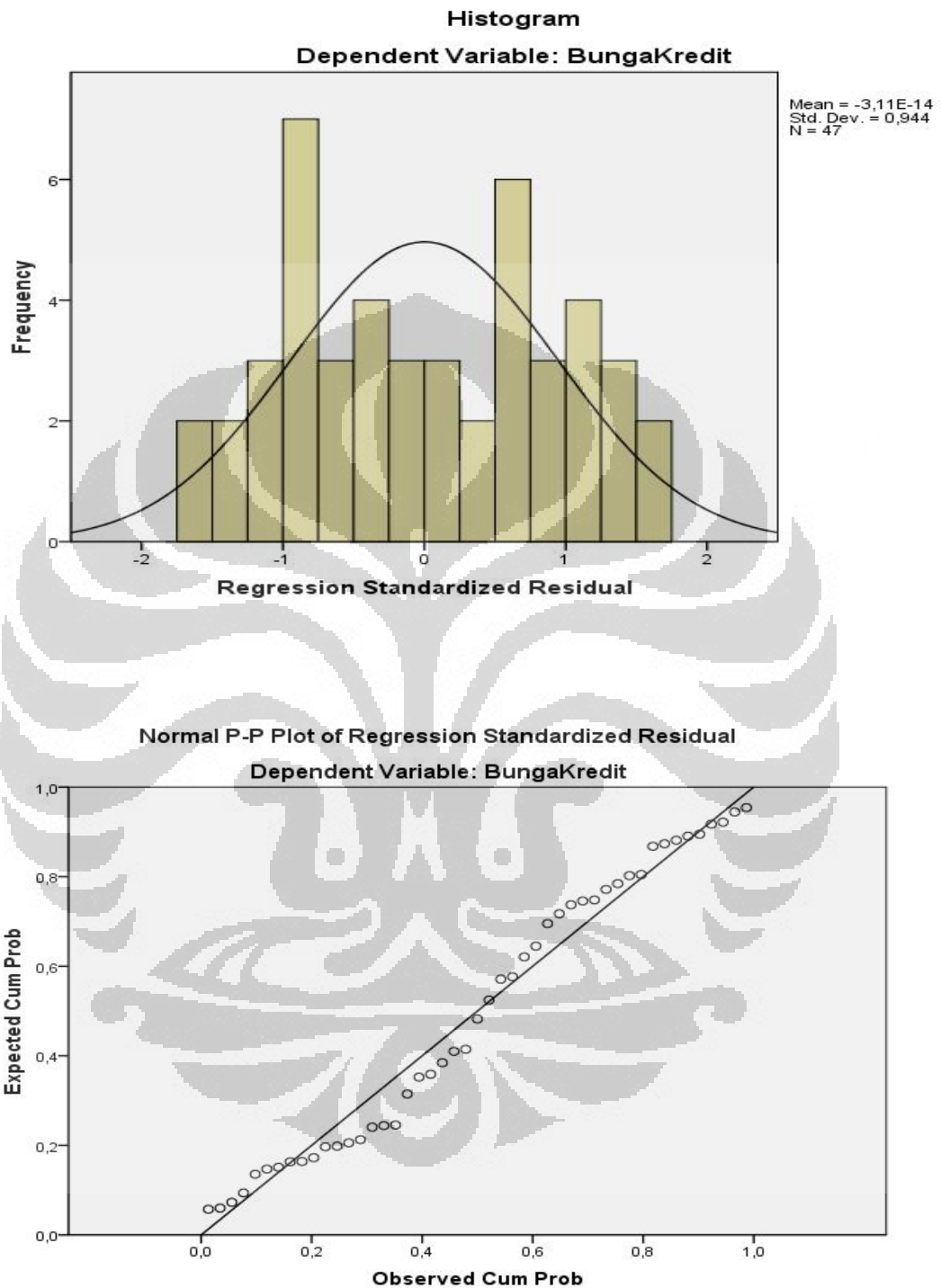
a. Dependent Variable: BungaKredit

Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	12,6714	19,5061	15,8951	1,83048	47
Residual	-,84318	,90088	,00000	,50472	47
Std. Predicted Value	-1,761	1,973	,000	1,000	47
Std. Residual	-1,577	1,685	,000	,944	47

a. Dependent Variable: BungaKredit

Charts



Lampiran 4 (lanjutan): Regresi Model 2- GLS Untuk Mengatasi Autokorelasi**Descriptive Statistics**

	Mean	Std. Deviation	N
NewBungaKredit	3,3833	,77566	47
NewRasioGWM	1,7550	1,03976	47
NewBungaDeposito	1,9920	1,14925	47
NewLIBOR	,4995	,80773	47
NewLnIHK	3,2396	2,76663	47

Correlations

		NewBungaKredit	NewRasioGWM	NewBungaDeposito
Pearson Correlation	NewBungaKredit	1,000	-,242	,687
	NewRasioGWM	-,242	1,000	-,196
	NewBungaDeposito	,687	-,196	1,000
	NewLIBOR	-,075	,362	,007
	NewLnIHK	-,147	-,166	,148
Sig. (1-tailed)	NewBungaKredit		,051	,000
	NewRasioGWM	,051		,093
	NewBungaDeposito	,000	,093	
	NewLIBOR	,307	,006	,480
	NewLnIHK	,161	,132	,161
N	NewBungaKredit	47	47	47
	NewRasioGWM	47	47	47
	NewBungaDeposito	47	47	47
	NewLIBOR	47	47	47
	NewLnIHK	47	47	47

Correlations

		NewLIBOR	NewLnIHK
Pearson Correlation	NewBungaKredit	-,075	-,147
	NewRasioGWM	,362	-,166
	NewBungaDeposito	,007	,148
	NewLIBOR	1,000	,197
	NewLnIHK	,197	1,000
Sig. (1-tailed)	NewBungaKredit	,307	,161
	NewRasioGWM	,006	,132
	NewBungaDeposito	,480	,161
	NewLIBOR		,092
	NewLnIHK	,092	
N	NewBungaKredit	47	47
	NewRasioGWM	47	47
	NewBungaDeposito	47	47
	NewLIBOR	47	47
	NewLnIHK	47	47

Variables Entered/Removed^b

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	NewLnIHK, NewBungaDeposito, NewLIBOR, NewRasioGWM ^a	.	Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: NewBungaKredit

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,747 ^a	,558	,516	,53968

a. Predictors: (Constant), NewLnIHK, NewBungaDeposito, NewLIBOR, NewRasioGWM

b. Dependent Variable: NewBungaKredit

Model Summary^b

Model	Change Statistics					Durbin-Watson
	R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	,558	13,256	4	42	,000	1,041

b. Dependent Variable: NewBungaKredit

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	15,443	4	3,861	13,256	,000 ^a
	Residual	12,233	42	,291		
	Total	27,676	46			

a. Predictors: (Constant), NewLnIHK, NewBungaDeposito, NewLIBOR, NewRasioGWM

b. Dependent Variable: NewBungaKredit

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2,905	,252		11,512	,000
	NewRasioGWM	-,123	,086	-,165	-1,425	,161
	NewBungaDeposito	,470	,071	,697	6,601	,000
	NewLIBOR	,034	,110	,035	,309	,759
	NewLnIHK	-,080	,031	-,285	-2,615	,012

a. Dependent Variable: NewBungaKredit

Coefficients^a

Model		Correlations			Collinearity Statistics	
		Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
1	(Constant)					
	NewRasioGWM	-,242	-,215	-,146	,783	1,277
	NewBungaDeposito	,687	,714	,677	,945	1,058
	NewLIBOR	-,075	,048	,032	,798	1,253
	NewLnIHK	-,147	-,374	-,268	,887	1,127

a. Dependent Variable: NewBungaKredit

Collinearity Diagnostics^a

Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions		
				(Constant)	NewRasioGWM	NewBungaDeposito
1	1	3,681	1,000	,01	,01	,01
	2	,624	2,429	,01	,00	,05
	3	,398	3,042	,01	,18	,00
	4	,232	3,980	,00	,19	,54
	5	,065	7,512	,97	,62	,40

a. Dependent Variable: NewBungaKredit

Collinearity Diagnostics^a

Model	Dimension	Variance Proportions	
		NewLIBOR	NewLnIHK
1	1	,02	,02
	2	,70	,02
	3	,04	,54
	4	,16	,26
	5	,08	,16

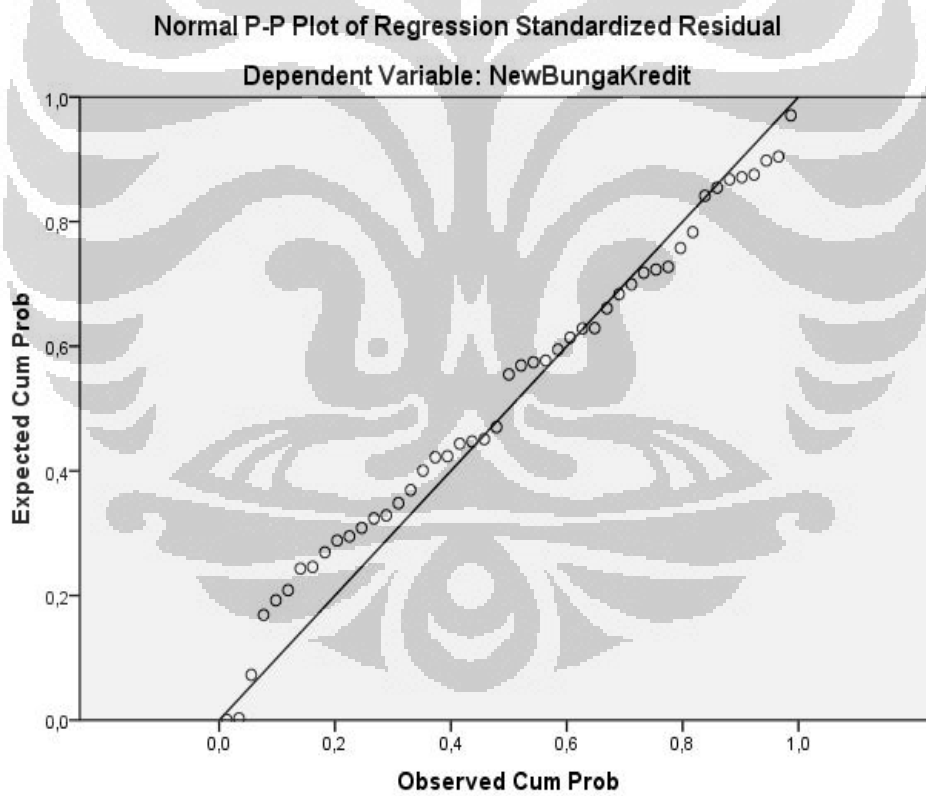
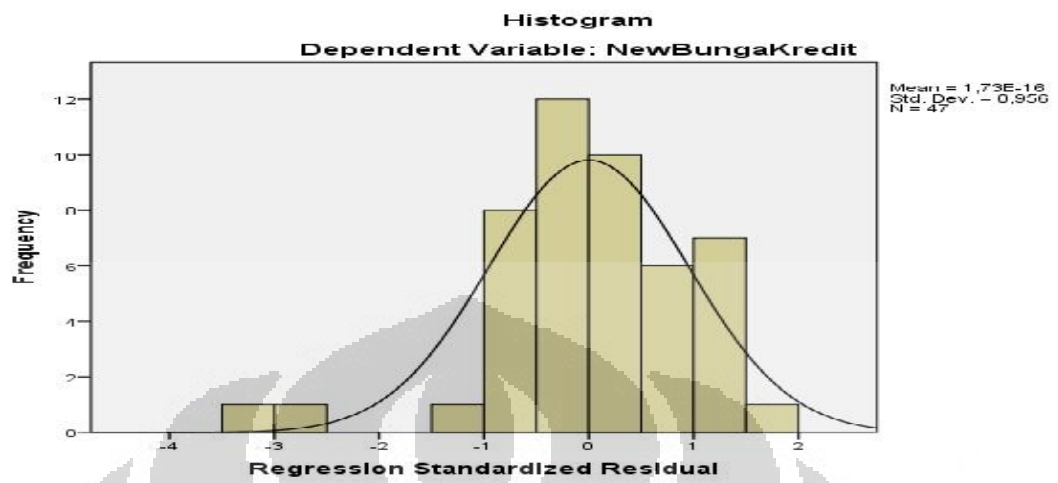
a. Dependent Variable: NewBungaKredit

Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	2,1101	4,6305	3,3833	,57942	47
Residual	-1,75644	1,01908	,00000	,51568	47
Std. Predicted Value	-2,197	2,152	,000	1,000	47
Std. Residual	-3,255	1,888	,000	,956	47

a. Dependent Variable: NewBungaKredit

Charts

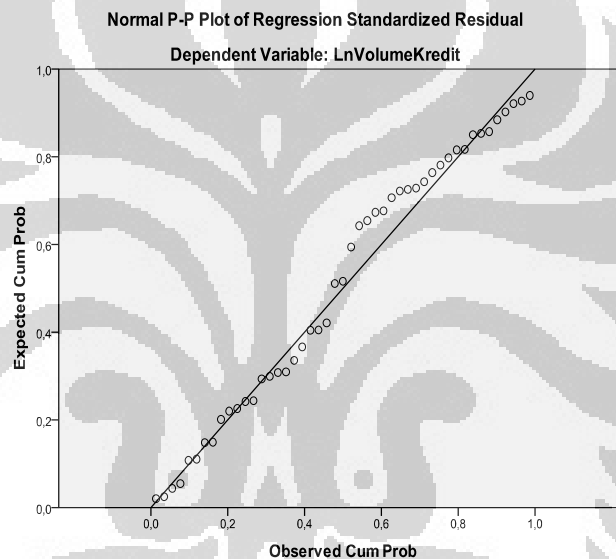


Lampiran 5: Uji Asumsi Klasik

**A. Uji Asumsi Klasik Model Regresi Linier I:
(Pengaruh Perubahan GWM dan Variabel Lainnya terhadap Volume Kredit)**

i. Uji Normalitas

Berdasarkan hasil pengujian SPSS, *Normal Probability Plot* (*Normal PP-Plot*) yang terbentuk adalah sebagaimana di bawah ini.



Dari grafik *Normal PP-Plot* tersebut di atas, nampak bahwa nilai *residual* yang telah distandarisasi (*standardized residual*) menyebar di selitar garis diagonal meskipun terdapat sedikit *plot* yang menyimpang dari garis regresi.

Selain dengan melihat grafik *Normal PP-Plot* tersebut di atas, uji normalitas juga dilakukan dengan Metode *Kolmogorov-Smirnov*, dengan hasil sebagai berikut:

Lampiran 5 (lanjutan): Uji Asumsi Klasik

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Standardized Residual
N		47
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,95553309
Most Extreme Differences	Absolute	,117
	Positive	,060
	Negative	-,117
Kolmogorov-Smirnov Z		,802
Asymp. Sig. (2-tailed)		,542

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Berdasarkan *output* tersebut di atas nampak bahwa nilai *Sig.* (2-tailed) sebesar $0,542 > 0,05$. Hal ini berarti bahwa nilai *residual* terstandarisasi dinyatakan menyebar secara normal.

ii. Uji Autokorelasi

Metode yang dapat diterapkan untuk mendeteksi autokorelasi adalah Uji *Durbin-Watson (DW-Test)*, dengan hasil sebagai berikut:

Model Summary^b

Model	Change Statistics					Durbin-Watson
	R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	,984	628,104	4	42	,000	,482

b. Dependent Variable: LnVolumeKredit

Berdasarkan *output* tersebut di atas nampak bahwa nilai *DW hitung* sebesar 0,482. Nilai *DW tabel* pada tingkat keyakinan (*level of significance*) 0,05, jumlah variabel bebas (k)=5 dan jumlah pengamatan (n) = 47 adalah $dL=1,336$ dan $dU=1,720$. Mengingat bahwa $DW hitung < dL$ maka terdapat permasalahan autokorelasi positif.

Menurut Gujarati dan Porter (2011), permasalahan autokorelasi umum terjadi pada penggunaan data *time series* yang disebabkan oleh:

- Adanya kelembaman (*inertia*) seperti pada data pendapatan nasional, indeks harga konsumen, data produksi, data kesempatan kerja, data pengangguran yang menunjukkan pola konjungtur (naik bersama-sama atau turun bersama-sama). Dengan situasi tersebut data observasi pada

Lampiran 5 (lanjutan): Uji Asumsi Klasik

periode sebelumnya dan sekarang kemungkinan besar akan saling tergantung (*interdependence*).

- b. Adanya fenomena laba-laba (*cobweb phenomenon*), terutama pada komoditi sektor pertanian dimana reaksi penawaran terhadap perubahan harga terjadi setelah melalui tenggang waktu (*getation period*).
- c. Manipulasi data, misalnya karena data PDB biasanya tersedia dalam bentuk tahunan, apabila peneliti ingin mendapatkan data PDB kuartalan maka harus melakukan interpolasi data. Interpolasi data tersebut menimbulkan pola fluktuasi yang tersembunyi, yang mengakibatkan munculnya pola sistematis dalam unsur pengganggu (*error term*) dan akhirnya menimbulkan masalah autokorelasi.
- d. Adanya kelambanan waktu (*time lags*), misalnya pengeluaran konsumsi periode sekarang antara lain ditentukan oleh pengeluaran konsumsi pada periode sebelumnya atau dikenal sebagai *regresi model autoregresif* sehingga unsur pengganggu (*error term*) akan memiliki pola sistematis.

Akibat dari adanya permasalahan autokorelasi, penaksir OLS tetap tidak bias (*unbiased*) tetapi tidak lagi efisien (memiliki varian minimum) sehingga tidak bersifat BUE (*best unbiased estimators*).

Untuk mengatasi gejala autokorelasi tersebut, Gujarati dan Porter (2011) menyarankan untuk melakukan transformasi data dari persamaan linier biasa menjadi persamaan GLS (*Generalised Least Square*).

Hasil *output* SPSS terhadap data yang telah ditransformasikan menjadi persamaan GLS adalah sebagai berikut:

Lampiran 5 (lanjutan): Uji Asumsi Klasik

Model Summary^b

Model	Change Statistics					Durbin-Watson
	R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	,904	99,228	4	42	,000	1,171

b. Dependent Variable: NewLnVol.Kredit

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-2,170	,283		-7,672	,000
NewRasioGWM	,014	,009	,080	1,599	,117
NewBungaKredit	,015	,007	,115	2,355	,023
NewLnDPK	1,515	,100	,871	15,162	,000
NewLnIHK	,263	,130	,112	2,015	,050

Nilai *DW hitung* dari persamaan GLS adalah sebesar 1,171 sehingga lebih besar dari persamaan linier awal namun nilainya masih di bawah nilai *DW tabel* $dL=1,336$, sehingga masih terdapat gejala autokorelasi positif. Sedangkan disisi lain hubungan variabel suku bunga terhadap volume kredit berubah dari negatif menjadi positif. Sehubungan dengan hal tersebut, penelitian ini tetap menggunakan model persamaan regresi awal.

iii. Uji Multikolinieritas

Hasil analisis pada tabel *Coefficients* berikut menunjukkan keempat variabel bebas yang diteliti memiliki nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) yang jauh lebih kecil daripada 10, demikian juga nilai *Tolerance* adalah kurang dari 1 sehingga dapat disimpulkan dalam model regresi tersebut tidak terdapat masalah multikolinieritas.

Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
RasioGWM	,561	1,782
BungaKredit	,318	3,148
LnDPK	,156	6,404
LnIHK	,193	5,171

Lampiran 5 (lanjutan): Uji Asumsi Klasik

iv. Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan *output* SPSS menggunakan Metode *Rank-Spearman* sebagaimana di bawah, nilai *Sig. (1-tailed)* semua variabel bebas (rasio GWM, Suku Bunga Kredit, Ln DPK dan LN IHK) lebih besar dari 0,05 sehingga dalam model regresi tidak terdapat permasalahan heteroskedastisitas.

			Correlations		
			Abres	Rasio GWM	Bunga Kredit
Spearman's rho	Abres	Correlation Coefficient	1,000	,262*	-,284*
		Sig. (1-tailed)	.	,037	,027
		N	47	47	47
	RasioGWM	Correlation Coefficient	,262*	1,000	-,684**
		Sig. (1-tailed)	,037	.	,000
		N	47	47	47
	BungaKredit	Correlation Coefficient	-,284*	-,684**	1,000
		Sig. (1-tailed)	,027	,000	.
		N	47	47	47
	LnDPK	Correlation Coefficient	-,063	,663**	-,819**
		Sig. (1-tailed)	,337	,000	,000
		N	47	47	47
	LnIHK	Correlation Coefficient	-,156	,616**	-,747**
		Sig. (1-tailed)	,148	,000	,000
		N	47	47	47

*. Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed).

** . Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).

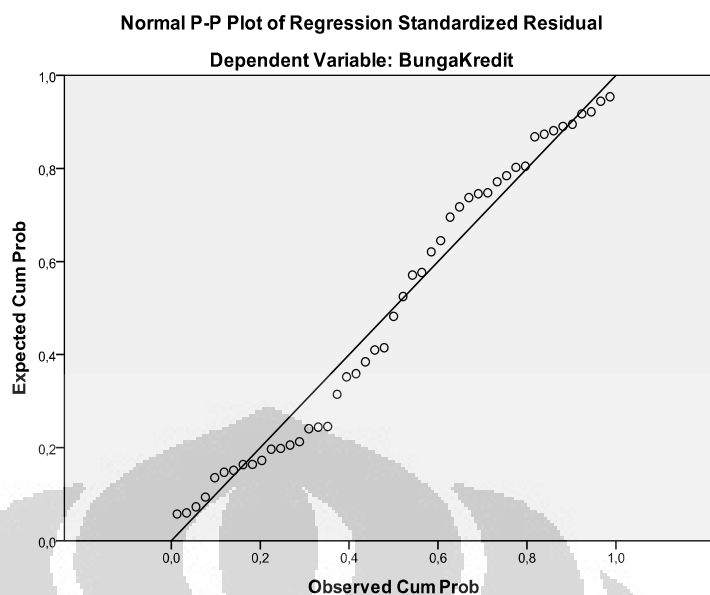
B. Uji Asumsi Klasik Model Regresi Linier II:

(Pengaruh Perubahan GWM dan Variabel Lainnya terhadap Suku Bunga Kredit)

i. Uji Normalitas

Berdasarkan hasil pengujian SPSS, *Normal Probability Plot* (*Normal PP-Plot*) yang terbentuk adalah sebagaimana di bawah ini.

Lampiran 5 (lanjutan): Uji Asumsi Klasik



Dari grafik *Normal PP-Plot* tersebut di atas, nampak bahwa nilai *residual* yang telah distandarisasi (*standardized residual*) menyebar di selitar garis diagonal meskipun terdapat sedikit *plot* yang menyimpang dari garis regresi.

Selain dengan melihat grafik *Normal PP-Plot* tersebut di atas, uji normalitas juga dilakukan dengan metode *Kolmogorov-Smirnov*, dengan hasil sebagai berikut:

One Sample Kolmogorov-Smirnov Tests		Standardized Residual
N		47
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,94408916
Most Extreme Differences	Absolute	,129
	Positive	,129
	Negative	-,090
Kolmogorov-Smirnov Z		,884
Asymp. Sig. (2-tailed)		,416

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Berdasarkan *output* tersebut di atas nampak bahwa nilai *Sig. (2-tailed)* sebesar $0,416 > 0,05$. Hal ini berarti bahwa nilai *residual* terstandarisasi dinyatakan menyebar secara normal.

Lampiran 5 (lanjutan): Uji Asumsi Klasik

ii. Uji Autokorelasi

Metode yang dapat diterapkan untuk mendeteksi autokorelasi adalah Uji *Durbin-Watson (DW-Test)*, dengan hasil sebagai berikut:

Model Summary^b

Model	Change Statistics					Durbin-Watson
	R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	,929	107,857	5	41	,000	,500

Berdasarkan *output* tersebut di atas nampak bahwa nilai *DW hitung* sebesar 0,500. Nilai *DW tabel* pada tingkat keyakinan (*level of significance*) 0.05, jumlah variabel bebas (k) = 5 dan jumlah pengamatan (n) = 47 adalah $dL=1,336$ dan $dU=1,720$. Mengingat bahwa $DW hitung < dL$ maka terdapat gejala autokorelasi positif, sama seperti pada model regresi 1 (Pengaruh GWM dan Variabel Lain terhadap Volume Kredit).

Untuk mengatasi gejala autokorelasi tersebut, dilakukan transformasi data dari persamaan linier biasa menjadi persamaan GLS (*Generalised Least Square*) dengan hasil sebagai berikut:

Model Summary^b

Model	Change Statistics					Durbin-Watson
	R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	,544	9,786	5	41	,000	1,141

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	8,612	3,197		2,694	,010
	NewRasioGWM	-,009	,096	-,013	-,098	,922
	NewBungaDeposito	,426	,075	,635	5,717	,000
	NewLIBOR	-,129	,120	-,135	-1,073	,289
	NewLnIHK	1,021	1,271	,102	,803	,426
	NewJUB	-2,076	1,085	-,279	-1,914	,063

a. Dependent Variable: NewBungaKredit

b. Dependent Variable: NewBungaKredit

Lampiran 5 (lanjutan): Uji Asumsi Klasik

Nilai *DW hitung* dari persamaan GLS adalah sebesar 1,141 atau lebih besar dari persamaan linier awal namun nilainya masih di bawah nilai *DW tabel* $dL=1,336$, sehingga masih terdapat gejala autokorelasi positif. Sedangkan di sisi lain parameter estimasi dari beberapa variabel bebas (rasio GWM, LIBOR dan IHK) berubah menjadi tidak signifikan. Sehubungan dengan hal tersebut, penelitian ini tetap menggunakan model persamaan regresi awal.

iii. Uji Multikolinieritas

Hasil analisis pada tabel *Coefficients* berikut menunjukkan keempat variabel bebas yang diteliti memiliki nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) yang lebih kecil daripada 10, demikian juga nilai *Tolerance* kurang dari 1 sehingga dapat disimpulkan dalam model regresi tersebut tidak terdapat masalah multikolinieritas.

Coefficients^a

Model	Correlations			Collinearity Statistics	
	Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
(Constant)					
Rasio GWM	-,640	-,126	-,034	,341	2,929
Bunga Deposito	,876	,878	,487	,613	1,631
LIBOR	,261	-,361	-,103	,401	2,493
LnIHK	-,732	,352	,100	,160	6,247
LnM2	-,805	-,673	-,242	,115	8,672

a. Dependent Variable: BungaKredit

iv. Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan *output* SPSS dengan menggunakan pengujian Metode *Rank-Spearman* sebagaimana di bawah, nilai *Sig. (1-tailed)* semua variabel bebas (rasio GWM, Bunga Deposito, LIBOR, Ln IHK dan Ln M2, Suku Bunga Kredit, Ln DPK dan LN IHK) lebih besar dari 0,05, sehingga dalam model regresi tidak terdapat permasalahan heteroskedastisitas.

Lampiran 5 (lanjutan): Uji Asumsi Klasik

Correlations

		abres	Rasio GWM	Bunga Deposito	LIBOR	LnIHK	LnM2
abres	Pearson Correlation	1	-,037	-,031	,339*	-,302*	-,374**
	Sig. (2-tailed)		,804	,835	,020	,039	,010
	N	47	47	47	47	47	47
RasioGWM	Pearson Correlation	-,037	1	-,450**	,178	,585**	,589**
	Sig. (2-tailed)	,804		,002	,230	,000	,000
	N	47	47	47	47	47	47
BungaDeposito	Pearson Correlation	-,031	-,450**	1	,290*	-,585**	-,591**
	Sig. (2-tailed)	,835	,002		,048	,000	,000
	N	47	47	47	47	47	47
LIBOR	Pearson Correlation	,339*	,178	,290*	1	-,405**	-,498**
	Sig. (2-tailed)	,020	,230	,048		,005	,000
	N	47	47	47	47	47	47
LnIHK	Pearson Correlation	-,302*	,585**	-,585**	-,405**	1	,913**
	Sig. (2-tailed)	,039	,000	,000	,005		,000
	N	47	47	47	47	47	47
LnM2	Pearson Correlation	-,374**	,589**	-,591**	-,498**	,913**	1
	Sig. (2-tailed)	,010	,000	,000	,000	,000	
	N	47	47	47	47	47	47

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).